

T  
364.133

HER ✓

2  
1998



ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENYELUNDUPAN  
(STUDI PADA MASYARAKAT PERBATASAN KAL-BAR DAN MALAYSIA)

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh:

Hermansyah  
NIM. B.002.95.0129

Pembimbing

Dr. I.S. Susanto, S.H.

PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
1998

ANALISIS KRIMINOLOGIS  
TERHADAP KEJAHATAN PENYELUNDUPAN  
(STUDI PADA MASYARAKAT PERBATASAN KAL-BAR DAN MALAYSIA)

Disusun Oleh:  
Hermansyah  
NIM. B. 002 95 0129

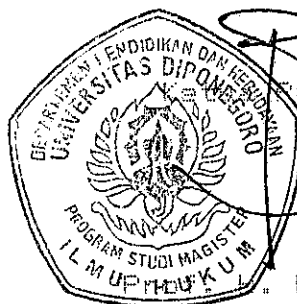
Dipertahankan di depan dewan Penjuji pada tanggal:  
29 April 1998

Tesis Ini Telah Diterima  
Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



Dr. I.S. Susanto, S.H.  
NIP. 130 324 139



Mengetahui,

Program Magister  
Ilmu Hukum



Dr. L. Purwahid Patrik, S.H.  
NIP. 130 307 058

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya Penulis telah berhasil menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini adalah merupakan syarat utama dalam menyelesaikan program Pascasarjana di bidang ilmu hukum pada Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan selesai jika tidak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan yang bersifat materil maupun moril, sehingga proses penulisan tesis ini berlangsung lancar. Oleh karena itu adalah tepat jika dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. I.S. Susanto, S.H. selaku pembimbing penulisan tesis ini, yang dengan ketelitian dan kesabarannya memberikan curahan ilmu pengetahuan sehingga menggugah kesadaran penulis untuk senantiasa terus belajar dan mencintai ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Pidana dan kriminologi.
2. Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Keuangan C.q. Dirjen Bea dan Cukai Kalimantan Barat, terutama Bapak Paima Selaku Kepala P.2 Pada Dirjen Bea dan Cukai Kalimantan Barat yang telah banyak memberikan informasi sehubungan dengan penyelesaian tesis ini.

3. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sehubungan dengan penyelesaian tesis ini.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat yang telah memberikan bantuan dana kepada Penulis, guna menunjang penyelesaian penulisan tesis ini.
5. Terakhir tak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas pengertian, dukungan serta do'a Nita Meylina, Fikri Aulia dan Syafika Aura selaku istri dan anak-anak penulis yang telah dengan sabar mendampingi penulis dalam menyelesaikan studi magister ilmu hukum pada Universitas Diponegoro.

Semoga hasil penelitian dan penulisan tesis ini bermanfaat bagi khalayak pembaca dan masyarakat pada umumnya serta dapat menambah khasanah pustaka di bidang ilmu hukum.

Semarang, 16 April 1998

P e n u l i s

## RINGKASAN

Fokus utama penelitian yang tertuang dalam tesis ini adalah tentang aktivitas penyelundupan yang terjadi pada masyarakat yang berada di daerah perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Utara (Malaysia). Dalam melihat aktivitas masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai penyelundupan ini, penulis menggunakan pendekatan kriminologi sebagai alat analisisnya utamanya. Kejahatan sebagai fenomena sosial memperlihatkan kompleksitas penyebab di dalamnya, kejahatan terjadi tidak hanya adanya niat seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang dianggap bertentangan oleh Undang-Undang, tetapi merupakan akumulasi dari sekian banyak kondisi pada sipelaku, baik kondisi yang sifatnya eksternal maupun internal yang melingkupi sipelaku sehingga pelaku melakukan perbuatan yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang. Sehingga dengan demikian kondisi demografi suatu wilayah, budaya, ekonomi, politik, struktur kekuasaan, sampai pada eksistensi penegak hukum dan peraturan perundang-undangan dapat merupakan faktor determinan pada suatu tindak kejahatan. Demikian juga halnya penyelundupan sebagai suatu kejahatan keberadaannya sudah cukup lama di tengah-tengah masyarakat, sehingga penyelundupan sebenarnya memperlihatkan aktivitas manusia/pelaku yang cukup kompleks di dalamnya. Mulai dari kondisi demografi, situasi ekonomi, budaya, serta seluruh aspek yang melingkupinya. Penyelundupan sebagai suatu bagian aktivitas manusia (terutama dalam bidang perdagangan antara dua negara) pada tarap permulaannya tidaklah dianggap oleh suatu kelompok masyarakat sebagai sesuatu aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang maupun hukum kebiasaan, bahkan sebaliknya perdagangan yang terjadi antara penduduk yang berdomisili diantara dua negara yang berbatasan langsung dapat diidentifikasi sebagai suatu bagian dari budaya mereka yang sudah cukup lama, sehingga dengan demikian aktivitas ini sudah lama dikenal oleh kelompok suatu masyarakat. Namun dengan berkembangnya konsep kedaulatan suatu negara, aktivitas yang semula dianggap bagian dari budaya mereka dianggap sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, yang dengan sendirinya pelaku yang merupakan bagian dari aktivitas tersebut dapat dikenakan hukuman terhadapnya. Demikian juga maksud dan tujuan dari aktivitas tersebut memperlihatkan arah perkembangan yang cukup berarti. Gejala perdagangan yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara illegal (artinya tidak didasarkan pada kesepakatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan) memperlihatkan perubahan yang mendasar. Semula aktivitas tersebut hanya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setempat, namun dewasa ini sudah mengarah pada usaha pencapaian keuntungan secara

ekonomi (*Economic Crime*) dan pada sisi lain aktivitas ini sudah mengarah pada diorganisasinya dengan rapi (*Organized Crime*) guna mempermudah mereka dalam melakukan aktivitas perdagangan yang illegal (penyelundupan) tersebut. Secara kriminologis, penyelundupan yang terjadi pada masyarakat dikedua perbatasan tersebut memang memperlihatkan kondisi yang cukup kompleks. Penyelundupan sebagai suatu bentuk kejahatan tidak dapat dipisahkan dari perilaku konsumen, keadaan atau ketersediaan suatu barang dengan tentunya harga yang terjangkau oleh masyarakat, bahkan kondisi aktivitas penegak hukum (*Law Enforcement*) dan peraturan perundang-undanganpun merupakan kondisi yang mempunyai keterkaitan (interdependensi) yang erat antara satu dengan yang lainnya. Kebutuhan konsumen atas suatu barang dan jasa (*good and services*) semakin hari memperlihatkan peningkatan seiring dengan meningkatnya tingkat kehidupan masyarakat. Pada satu sisi ketersediaan suatu barang sebagai elemen kebutuhan konsumen memperlihatkan jumlah yang kecil jika dibandingkan dengan permintaan (*Scarcity*), tingginya permintaan akan kebutuhan ini seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak konsumen untuk memilih (*right to choose*) barang yang merupakan kebutuhan dasar (*basic needs*) hidupnya kondisi demikian tentunya merupakan salah satu keadaan yang memberikan motivasi kepada seseorang atau sekelompok orang untuk berusaha memenuhi permintaan akan kebutuhan konsumen. Penyelundupan terjadi pada saat orang atau sekelompok orang merasa aturan yang ada guna melakukan transaksi perdagangan secara legal (*impor dan ekspor*) dianggap memperkecil kemungkinan margin keuntungan yang akan diperolehnya, sehingga cara illegal tersebut dilakukan. Kondisi ini dipertajam dengan tidak diketahuinya hak-hak lain yang dimiliki oleh konsumen misalnya hak untuk memperoleh informasi (*right to informed*), hak mendapatkan keamanan atas suatu produk (*right to safty*) sehingga barang yang diselundupkan tidak mengindahkan keamanan bagi konsumen. Demikian juga sikap toleransi sosial para penegak hukum (*Bea dan Cukai*) terhadap pelaku penyelundupan (terutama yang terorganisir) ditafsirkan oleh pelaku sebagai suatu sikap yang melegalkan aktivitas mereka. Kondisi ini pada satu sisi dilihat dari jumlah petugas yang ditempatkan di daerah perbatasan memang dirasakan kurang memadai, disamping memang terlihat seringnya aktivitas tawar-menawar (*bargaining activity*) antara petugas dengan masyarakat sebagai kompensasi yang harus dipenuhi oleh masyarakat terhadap ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap mereka. Terakhir persoalan Undang-Undang (UU No. 10 tahun 1995) juga memberikan kontribusi tidak langsung terhadap aktivitas masyarakat untuk melakukan kegiatan penyelundupan, terutama sistem sanksi yang diancamkan terhadap pelaku penyelundupan. Ada kesan seakan terjadinya tumpang tindih antara satu ancaman dengan ancaman tindak pidana

penyelundupan (Pasal 102 UU No.10 Tahun 1995), hal ini memberikan peluang kepada para penegak hukum untuk melakukan diskresi dengan mengutamakan ancaman administrasi berupa denda kepada pelaku yang dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan (UU No. 10 Tahun 1995). Demikian juga terlihat upaya sosialisasi peraturan perundang-undangan, terutama sanksi yang berat terhadap pelaku kejahatan penyelundupan dirasakan oleh masyarakat sendiri tidak ada dalam arti bahwa aktivitas masyarakat-terutama yang berdomisili di perbatasan-untuk melakukan penyelundupan tidak diiringi dengan rasa takut untuk dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sehingga dengan demikian perlu kiranya pendekatan yang terpadu serta adanya semacam gerakan moral (*moral action*) untuk dapat mengurangi aktivitas masyarakat yang illegal tersebut.

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
RINGKASAN .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
 BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN	1
B. PERUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT HASIL PENELITIAN	9
E. KERANGKA TEORI	11
F. METODELOGI PENELITIAN	23
G. SISTEMATIKA PENULISAN	31
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	35
A. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN STUDI KRIMINOLOGI DAN PERANANNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA	35
B. PERKEMBANGAN KEJAHATAN PENYELUNDUPAN	54
1. PENYELUNDUPAN SEBAGAI KEJAHATAN EKONOMI	56
2. PENYELUNDUPAN SEBAGAI KEJAHATAN YANG TERORGANISIR (ORGANIZED CRIME)	60
C. INTERAKSI ANTARA PELAKU PENYELUNDUPAN, KONSUMEN, PENEGAKAN HUKUM DAN UNDANG-UNDANG	66
1. Tinjauan Terhadap Pelaku Kejahatan	66
2. Tinjauan Terhadap Perilaku Konsumen	71
3. Tinjauan Upaya Penegakan Hukum Sebagai Organisasi, Birokrasi dan Sistem Peradilan Pidana	79



4. Tinjauan Terhadap Hukum (UU)	95
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. LETAK DAN KEADAAN GEOGRAFIS LOKASI PENELITIAN	105
1. Letak dan Keadaan Geografis Kabupaten Sanggau	105
2. Letak Geografi dan Keadaan Kecamatan Sekayam	111
B. PERKEMBANGAN KEJAHATAN PENYELUNDUPAN DI-KALIMANTAN BARAT	119
C. ANALISIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN	132
D. ANALISIS TERHADAP PRILAKU KONSUMEN	141
1. Analisis Prilaku Berdasarkan Pendekatan Kebutuhan Konsumen	144
2. Analisis Prilaku Berdasarkan Pendekatan Hak Konsumen (right Approach)	155
E. ANALISIS TERHADAP PENEGAK HUKUM	163
F. ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995	174
1. Ketentuan Sanksi	181
2. Sanksi Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995	186
 <b>BAB IV : P E N U T U P</b>	 192
A. KESIMPULAN	192
B. SARAN-SARAN	195

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah:

Salah satu persoalan sosial (*Social Problem*) yang ada pada setiap negara adalah kejahatan, bahkan keberadaan kejahatan dipermukaan bumi ini diakui setua peradaban manusia itu sendiri. Upaya yang dilakukan sebagai maksud untuk menghilangkan kejahatan dipermukaan bumi dirasakan suatu usaha yang sia-sia, mungkin usaha yang dapat dilakukan adalah pada upaya mengurangi kejahatan di tengah masyarakat.

Dewasa ini sulit sekali untuk mengadakan perbedaan antara kejahatan yang terkait di negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Dahulu sering dibedakan berdasarkan adanya perbedaan kultural, politik dan sosial pada setiap negara. Namun sebenarnya meskipun terdapat adanya perbedaan tersebut, dijumpai juga adanya persamaan-persamaan yaitu misalnya kejahatan selalu berkaitan dengan persoalan kualitas hidup manusia.

Apalagi dalam era globalisasi, di mana pada peta politik perbatasan antara negara memang memperlihatkan kejelasan, namun pada peta kompetitif, khususnya peta yang memperlihatkan arus riil uang dan kegiatan industri,

perbatasan ini sebagian besar sudah hilang.<sup>1</sup> Globalisasi ini juga akan terus terjadi dan akan menimbulkan interaksi, interkoneksi dan interdependensi (*interface*) antar bangsa.

Menurut **Muladi**, *interface* tersebut mau tidak mau akan mempengaruhi pelbagai tahap pengetahuan dan kesadaran (*awareness dan acquaintance*), baik perorangan maupun kolektif terhadap berbagai masalah (*Poleksosbud-miliptek*) dan dalam perkembangan selanjutnya akan mempengaruhi pula penilaian (*assesment*) dan perilaku (*behavior dan attitude*) yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Dalam hubungannya dengan kejahatan, maka terlihat adanya pergeseran bentuk kejahatan itu sendiri, kejahatan sudah bukan merupakan monopoli persoalan suatu negara, tetapi sudah merupakan persoalan global. Hal ini dikarenakan terjadinya *internasionalisasi kejahatan*.<sup>3</sup> Internasionalisasi kejahatan ini terjadi dikarenakan perkembangan kejahatan telah bersifat transnasional, melewati batas-batas negara dan menunjukkan adanya kerjasama kejahatan baik bersifat regional maupun

---

1. Kenichi Ohmae, *Dunia Tanpa Batas, Kekuatan dan Strategi di Dalam Ekonomi Yang Saling Mengait*, Alih Bahasa oleh F.X. Budiyanto, Penerbit Binarupa Aksara, cet-1, Tahun 1991, hal. i.

2. Prof. Dr. Muladi, SH. *Hukum Dan Hak Azasi Manusia*, Makalah Pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung-Ambarawa, Yang Diadakan Oleh Universitas Diponegoro dari tanggal 14 s/d 30 Nopember 1994, hal. 1.

3. *I b i d*

internasional. Hal ini nampaknya merupakan hal sampingan dari berkembangnya sarana transportasi dan komunikasi modern.<sup>4</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manifestasi kejahatan tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi sudah mengarah pada diorganisirnya (*Organized Crime*) dengan bermotifkan pada keuntungan ekonomi. Modus serta locus delicti dari kejahatan juga sudah tidak hanya ditujukan dalam negara saja, tetapi sudah diarahkan pada negara lain.

Meningkatnya kejahatan baik kuantitas maupun kualitas, membuat prihatin banyak negara dan dalam banyak kesempatan pertemuan Internasional, khususnya yang diadakan oleh PBB, terutama Sidang Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana di Wina, tanggal 21-31 Mei 1996, menegaskan perlu adanya prioritas dalam melihat bentuk dan jenis kejahatan. Kejahatan yang harus diwaspadai berdasarkan pertemuan tersebut adalah antara lain: Kejahatan Transnasional (terorganisir), Kejahatan ekonomi termasuk pemutihan uang, Kejahatan Lingkungan Hidup (*eco-crime*), Kejahatan Perkotaan, Kejahatan Kekerasaan, Kejahatan yang dilakukan Remaja, Perdagangan Senjata Api, Kekerasaan terhadap wanita, anak-anak,

---

4. Prof. Dr. Muladi, SH, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cet-I, Semarang, Tahun 1995, hal. 29.

**Penyelundupan** migran gelap dan tindak pidana korupsi.<sup>5</sup>

Demikian pula menurut Kiki Pranasari dan Adrianus Meliala ada beberapa kejahatan yang mempunyai perspektif ekonomis yang sering terjadi antara lain adalah meliputi: Kejahatan di sektor Perbankan dan Keuangan, Pemalsuan Uang, Surat Berharga dan Menifes Kapal Laut atau Udara, Penipuan Konsumen, Pembajakan, **Penyelundupan Barang**, Penggelapan pajak dan Korupsi.<sup>6</sup>

Dengan melihat letak dan posisi Indonesia yang terletak antara jalur perdagangan dan lalu lintas dunia, maka kejahatan **penyelundupan**, sangat potensial terjadi di Indonesia disamping bentuk kejahatan lainnya. Hal ini dikarenakan salah satu sifat dan bentuk dari kejahatan penyelundupan selalu melampaui batas suatu negara kenegara lain.

Salah satu wilayah Indonesia yang tingkat kuantitas kejahatan penyelundupan cukup tinggi adalah Kalimantan Barat, hal ini dikarenakan letak Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu **Malaysia**, terutama Serawak yang merupakan bagian dari Negara Malaysia Timur.

Dengan dibukanya jalur resmi antara Indonesia

---

5. Prof. Dr. Muladi, SH, *Op cit*, hal. 5.

6. Kiki Pranasari dan Adrianus Meliala, *Praktek Pemberian Keterangan Yang Tidak Benar (Fraudulent Misrepresentation) Suatu Modus Penyimpangan ekonomi*, Penerbit UI, tahun 1991, hal. 4.

(Kalimantan Barat) dengan Malaysia Timur (Serawak), maka terlihat banyak perubahan yang terjadi pada hampir setiap lapangan kehidupan baik sosial budaya, ekonomi, kependudukan maupun ketanagakerjaan. Sebagai contoh misalnya arus migrasi antara kedua daerah memperlihatkan adanya peningkatan yang cukup berarti. Hanya dari beberapa penelitian ternyata mereka yang bermigrasi dari Indonesia ke negara Serawak dilakukan secara illegal.<sup>7</sup>

Disamping itu dari penelitian lain yang dilakukan oleh Tim Peneliti Daerah Perbatasan ditemukan bahwa di daerah perbatasan masih terdapat kondisi yang dapat menghambat usaha pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, diantara kondisi tersebut adalah:

**Pertama:** Sejak lama telah berlangsung migrasi tenaga kerja musiman dari wilayah Indonesia menuju beberapa tempat di wilayah Serawak. Kepergian mereka ini kadang-kadang tanpa melalui prosedur keimigrasian yang berlaku, sehingga menimbulkan kesulitan bagi instansi yang berwenang melacak mereka serta memberikan bantuan pada saat diperlukan. Kekurangan tenaga kerja di wilayah perbatasan tersebut dapat menghambat program pembangunan yang ada.

**Kedua:** Arus barang melintasi garis perbatasan terlihat semakin meningkat. Arus ini hanya tampak menyusut pada waktu penjagaan dilakukan secara ketat, namun akan naik kembali apabila penjagaan mengendur. Penjagaan secara terus menerus dengan intensitas yang konstan merupakan hal yang sulit dilakukan apabila diingat bahwa garis perbatasan antara Propinsi Kalimantan Barat dengan Serawak Malaysia membentang

---

7. James Siagian, Pola Umum Migrasi Penduduk Perbatasan Kalimantan Barat-Serawak, Dalam Buletin Ringkasan Hasil-Hasil Penelitian, diterbitkan oleh Balai Penelitian Universitas Tanjungpura Pontianak, Vol. VIII, Tahun 1992, hal. 63.

dari Barat ke Timur mulai dari Laut Natuna sepanjang tidak kurang dari 800 Km<sup>2</sup> sampai ke Kecamatan Benua Martinus di ujung sebelah Timur.<sup>8</sup>

Khususnya terhadap persoalan kedua yang ada di daerah perbatasan, yaitu meningkatnya arus barang, maka hal ini mempengaruhi pada pola pekerjaan yang ada dalam masyarakat. yaitu banyak masyarakat atau penduduk yang beralih pekerjaan sebagai pengangkut barang atau sektor jasa, baik dengan cara digendong (Ambin) atau dengan sepeda atau sepeda motor (ojek).<sup>9</sup>

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka terlihat bahwa interaksi sosial antara masyarakat yang ada pada perbatasan cukup tinggi. Hal ini tentunya membawa pada dampak, baik dampak positif maupun negatif yang harus diperhatikan. Meningkatnya arus barang yang illegal tentunya sangat berpengaruh pada tatanan kehidupan perekonomian masyarakat.

Penyelundupan barang yang dilakukan melalui perbatasan kedua negara memang memperlihatkan tingkat yang cukup memprihatinkan. Bahkan secara keseluruhan untuk Daerah Kalimantan Barat penyelundupan adalah kriminalitas yang menduduki peringkat kesembilan, setelah Pembunuhan, Penganiayaan, Asusila, Perjudian, Curat,

---

8. Tim Peneliti Daerah Perbatasan, Untan, Identifikasi Masalah Pembangunan Daerah Perbatasan Kalimantan Barat dan Serawak, Univeristas Tanjungpura, Pontianak, Tahun 1990.

9. Ign. Budiman, Dkk. Perubahan Sosial Masyarakat Perbatasan (Studi Kasus di Desa Jagoi, Kecamatan Seluas Kabupaten Sambas), Dalam Jurnal Penelitian, yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Universitas Tanjungpura Pontianak, Edisi Mei, Vol. I-Nomor 3 Tahun 1991, hal. 114.

Curas, Curanmor, dan Pencurian Kayu.

Sebagai suatu ilustrasi jumlah kejahatan penyelundupan yang terjadi di Kalimantan Barat, untuk tahun 1995 dilaporkan sebanyak 11 kasus dan diselesaikan hanya 1 kasus. Sedangkan pada tahun 1996 kejahatan penyelundupan yang dilaporkan sebanyak 1 kasus dan kasus tersebut dapat diselesaikan.<sup>10</sup>

Dari apa yang diuraikan tersebut, kiranya perlu dilakukan penelitian terhadap kejahatan penyelundupan ini, apalagi mengingat jenis kejahatan ini merupakan salah satu jenis kejahatan yang dalam operasionalnya selalu dilakukan secara terorganisir serta dengan bermotifkan ekonomi, serta akibatnya juga pada skala besar dapat mengancam kehidupan perekonomian Negara dan Masyarakat.

#### **B. Perumusan Masalah:**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan umum yang diajukan sebagai pokok kajian penelitian ini adalah : "Kondisi-kondisi (fisik maupun sosial) apakah sehingga masyarakat melakukan kejahatan penyelundupan". Dari permasalahan umum tersebut, kiranya dapat diformulasikan beberapa permasalahan yang sifatnya lebih khusus lagi, yaitu:

---

10. Sumber: Dispen Polda Kal-Bar.



1. Mengapa masyarakat melakukan aktivitas penyelundupan.
2. Bagaimanakah hubungan antara perilaku masyarakat (kejahatan penyelundupan) dengan Prilaku konsumen (*Consumer behavior*).
3. Bagaimanakah pengaruh penegakan hukum terhadap kejahatan penyelundupan.
4. Bagaimanakah pengaruh Hukum (Undang-Undang) terhadap prilaku masyarakat (penyelundup).

### C. Tujuan Penelitian:

Secara umum tujuan dari suatu penelitian menurut Sellitz, sebagaimana dikutip oleh Soeryono Soekanto, adalah:

*".....to discover answers to question through the application of scientific procedures. These procedures have been developed in order to increase the likelihood that the information gathered will be relevant to the question asked and will be reliable and unbiased".<sup>11</sup>*

Berdasarkan tujuan umum seperti tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang kondusif (baik kondisi sosial maupun kondisi fisik) terhadap terjadinya perilaku penyelundupan.
2. Untuk mengetahui sistem hukum dalam mempengaruhi

---

11. DR. Soerjono Soekanto, SH, MA. Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, cet-II, Tahun 1982, hal. 9.

aktivitas masyarakat dalam melakukan penyelundupan.

3. Untuk mengetahui perilaku konsumen dalam mempengaruhi aktivitas penyelundupan.
4. Untuk mengetahui persepsi dan tindakan penegak hukum (*Law enforcement*) terhadap kejahatan penyelundupan yang dilakukan oleh masyarakat.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian:**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, dapat berbentuk manfaat teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari suatu penelitian tentunya sangat erat kaitannya dengan objek kajian suatu bidang ilmu pengetahuan serta kedudukan suatu bidang ilmu pengetahuan itu sendiri terhadap keseluruhan sistem ilmu yang menjadi induknya. Kriminologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan, dalam perkembangannya memang belum mendapatkan kesatuan pendapat terhadap asal mula dan kedudukan ilmu tersebut dalam sistem ilmu pengetahuan. Mereka ada yang berpendapat bahwa kriminologi merupakan bagian dari Sosiologi, namun ada juga yang berpendapat lain, misalnya Marc Ancel kriminologi adalah merupakan bagian dari "*Modern*

*criminal science*".<sup>12</sup>

Sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan (*study of crime*) dan sebagai bagian dari "*Modern criminal science*", maka manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah antara lain: Memberikan sumbangan pemikiran kritis dan alternatif terhadap interaksi antara perilaku penyelundupan dengan perilaku konsumen, sistem hukum serta proses penegakan hukum itu sendiri.

## 2. Manfaat Praktis

Sedangkan dari sisi praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran sistem hukum pidana, terutama yang menyangkut kriminalisasi, memberikan sumbangan pemikiran terhadap kualitas penegakan hukum, serta dapat memberikan solusi terhadap perilaku konsumen yang mempunyai hubungan fungsional terhadap perilaku penyelundupan yang dilakukan oleh masyarakat.

---

12. Marc Ancel, *Social Defence, A Modern approach to Criminal Problem*, London, Roustledge & Kegan Paul, 1965, Dalam Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, cet-I Tahun 1996, hal 23.

### E. Kerangka Teori:

Kejahatan sebagai fenomena sosial memperlihatkan kompleksitas persoalan di dalamnya, dan keberadaannya di tengah masyarakat inheren terhadap keberadaan masyarakat itu sendiri. Seperti pendapat Frank Tannenbaum yang dikutip oleh Sahetapy bahwa: "*Crime is eternal-as eternal as society*"<sup>13</sup>, Oleh karena itu menurut pendapat Korn & McCorkle "*Crime is not only normal but inevitable*".<sup>14</sup>

Karena kompleksnya esensi kejahatan (*Crime*), maka upaya memberikan definisi terhadap kejahatan dirasakan sebagai suatu hal yang sangat sulit, demikian juga upaya pemahaman terhadap kejahatan itu sendiri. Gwynn Nettler pernah memberikan gambaran mengenai sulitnya serta relatifnya pengertian akan kejahatan sebagai:

*The blind man who felt the elephant's ear thought the animal resembled the leaf of the banana plant, The Philosopher who grasped his tail described the elephant as like a rope. The one who felt the elephant's flank thought the animal was like a mud wall. And the one who felt his leg believed the*

---

13. DR. J.E. Sahetapy, S.H. Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik, Penerbit, Bandung, tahun 1981, hal. 10.

14. Rochard R. Korn & Lloyd W. McCorkle, *Criminology and Penology*, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1963, hal. 276.

*elephant to be like the trunk of tree.*<sup>15</sup>

Dari pendapat **Gwynn Nettler** ini kiranya dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kesamaan mengenai definisi terhadap kejahatan.

Salah satu kejahatan yang keberadaannya merupakan masalah yang sudah lama adalah penyelundupan.<sup>16</sup> Jika dilihat dari terminologi, maka arti penyelundupan secara yuridis sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 pada pasal 1 ayat 2 adalah: Tindak Pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (Ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (Impor).<sup>17</sup>

Sedangkan pengertian penyelundupan (*Smuggling*) menurut **The Lexicon Webster Dictionary** adalah: *"To Import or Export secretly and contrary to law without payment of legally required duties"*.<sup>18</sup> Dari pengertian tersebut di atas terlihat adanya persamaan antara pengertian yang terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967,

---

15. Gwynn Nettler, *Explaining Crime*, McGraw-Hill Book Company, Second Edition, hal 336.

16. DR. A. Hamzah, S.H. *Delik Penyelundupan*, Disesuaikan Dengan INPRES Nomor 4 Tahun 1985, Penerbit Akademika Pressindo CV, Edisi Pertama, Cet-II, Tahun 1988, hal. v.

17. *I b i d*, hal. 1.

18. *The Lexicon Webster Dictionary*, By The English-Language Institute of Amerika Inc, Vol II. hal. 916.

terutama pada pasal 1 ayat 2 dengan pengertian yang terdapat dalam kamus **The Lexicon Webster Dictionary** tersebut, yang hanya memberikan pengertian yang sempit dari penyelundupan itu sendiri, yaitu hanya menyangkut persoalan impor-ekspor barang saja.

Sebenarnya pengertian penyelundupan menurut **A. Hamzah** bukan istilah yuridis. Ia merupakan pengertian gejala sehari-hari, di mana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukan atau mengeluarkan barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu.<sup>19</sup> Latar belakang perbuatan demikian ialah untuk menghindari dari bea-cukai (faktor ekonomi), menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah seperti larangan membuat dan memiliki senjata api, amunisi dan semacamnya, narkotik (faktor keamanan). Jadi pengertian penyelundupan dalam masyarakat tentunya **lebih luas** jika dibandingkan pengertian penyelundupan yang diberikan batasan Undang-Undang (Keppres No. 73 Tahun 1967), yang hanya membatasi pada adanya pelanggaran terhadap ketentuan mengenai impor dan ekspor saja.

Jika dilihat secara yuridis formal, maka sebelumnya kejahatan penyelundupan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 Tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi, dan dari substansi

---

19. DR. A. Hamzah, S.H. Op cit, hal. 1.

yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi (UU No.7 Drt Tahun 1955) jelas merupakan tindak pidana ekonomi. Berdasarkan pada hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa penyelundupan yang diatur dalam peraturan tersebut sebelumnya merupakan bagian dari Hukum Perekonomian pada umumnya, yaitu sebagai keseluruhan peraturan, khususnya yang dibuat oleh pemerintah atau badan pemerintah, yang secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk mempengaruhi ekonomi di pasar-pasar.<sup>20</sup> Pasar dalam arti pertemuan antara penawaran dan permintaan. Jadi hukum perekonomian terwujud dalam perundangan perekonomian (*Sociaal-economische wetgeving*). Dalam perundangan itu diatur kehidupan ekonomi dari negara termasuk rakyatnya.<sup>21</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyelundupan merupakan salah satu kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi (*Economic Crime*).

A. Hamzah,<sup>22</sup> dan demikian juga Ninik Widiyanti<sup>23</sup> berpendapat bahwa penyelundupan dikategorikan sebagai delik ekonomi dikarenakan *Rechten Ordonantie* (Ordonansi

---

20. Prof. Sudarto, S.H. Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, Tahun 1981, hal 81.

21. *Ibid*.

22. DR. A. Hamzah, S.H. *Op cit*, hal. 15.

23. Dra. Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, S.H. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Penerbit Bina aksara, cet-I, Jakarta Tahun 1987, hal. 45.

Bea) dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 dimasukan ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi ( UU No. 7 Drt Tahun 1955).

Namun sekarang masalah penyelundupan (terutama yang menyangkut ekspor dan impor barang) secara yuridis formal tidak lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955, tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tersebut, terutama dalam pasal 117-nya telah secara tegas mencabut Rechten Ordonantie Staatsblad Tahun 1882 Nomor 240. Jika dilihat perbandingan pengertian penyelundupan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabean dengan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 terlihat adanya persamaan, hanya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, uang secara implisit tidak dimasukkan sebagai obyek dari penyelundupan.<sup>24</sup>

Ada satu hal yang cukup penting bahwa dengan dicabutnya Rechten Ordonantie tersebut oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995, masalah penyelundupan secara yuridis formal tidak lagi merupakan delik ekonomi, sebagaimana

---

24. Pengertian penyelundupan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 diatur dalam Bab XIV Tentang Ketentuan Pidana, Pasal 102 yang bunyinya sebagai berikut:

*Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*



sebelumnya dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955.

Namun demikian hal ini tidaklah berarti masalah penyelundupan tidak lagi merupakan tindak pidana dalam bidang ekonomi, karena suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana ekonomi, jika setidaknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan dilakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi yang pada dasarnya bersifat normal dan sah.
2. Perbuatan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara umum, tidak hanya kepentingan individual.
3. Perbuatan itu mencakup pula perbuatan di lingkungan bisnis yang merugikan perusahaan lain atau individu lain.<sup>25</sup>

Dalam aktivitasnya, penyelundupan (terutama terhadap barang ekspor dan impor) dapat berupa penyelundupan fisik maupun penyelundupan administrasi. Penyelundupan fisik terjadi bilamana seseorang melakukan kegiatan impor-ekspor tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan penyelundupan Administrasi terjadi adanya kesengajaan untuk memberikan informasi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.<sup>26</sup>

Bertolak dari pengertian penyelundupan dalam arti luas sebagaimana yang diberikan oleh A. Hamzah,

---

25. Prof. DR. Muladi S.H. dan DR. Barda Nawawi Arief, S.H. Bunga Rampai Hukum Pidana, Penerbit Alumni, cet-I, Bandung, Tahun 1992, hal. 20.

26. Leden Marpaung, S.H. Tindak Pidana Penyelundupan, Masalah dan Pencegahannya, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet-I, Jakarta Tahun 1991, hal. 5-6.

tersebut, maka penyelundupan dalam dimensi yang lebih luas, tidak hanya persoalan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Kepabean) saja, namun dalam perspektif kriminologi memperlihatkan fenomena yang sangat kompleks. Di dalamnya menyangkut perspektif ekonomi, sosial budaya masyarakat tertentu, termasuk juga perilaku konsumen, kebiasaan, dan karena penyelundupan merupakan kejahatan yang sifatnya melintasi batas suatu negara, maka di dalamnya juga akan menyangkut persoalan konsepsi Hankam dan Kedaulatan suatu negara.<sup>27</sup>

Terhadap faktor penyebab kejahatan penyelundupan ini Djoko Prakoso, dkk. misalnya mengatakan bahwa:

Bahwa banyak yang menjadi faktor penyebab kejahatan penyelundupan antara lain adalah keadaan teritorial Nusantara yang dikelilingi laut, adanya wilayah Indonesia yang lebih dekat ke luar negeri dari pada ke pusat perdagangan di dalam negeri, mentalitas oknum-oknum tertentu, kelemahan prasarana dan kelemahan administrasi berupa birokrasi.<sup>28</sup>

Lebih lanjut dikatakan oleh Djoko Prakoso bahwa dari analisis ternyata penyelundupan itu terjadi karena kebijaksanaan pemerintah yang mengadakan proteksi untuk barang-barang produksi dalam negeri sehingga membatasi

---

27. Mayjen. Pol. Drs. Koesparmono Irsan, Perkembangan Kejahatan Di Indonesia Dalam Era PJP II, Makalah Yang Disampaikan Pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung - Ambarawa, dari Tanggal 14 s/d 30 Nopember 1994, hal 11.

28. Djoko Prakoso, S.H. dkk. Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, Cet-I, Tahun 1987, hal. 3.

impor antara lain dengan sistem pembiayaan yang tinggi, karena itu barang impor berusaha masuk ke Indonesia lewat penyelundupan.<sup>29</sup>

Jika dilihat dari sisi obyeknya, maka tidak hanya barang saja yang dapat dilakukan penyelundupan, orangpun dapat merupakan obyek dari kegiatan penyelundupan, misalnya penyelundupan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, ataupun sebaliknya Tenaga Kerja Indonesia yang diselundupkan masuk ke Negara tetangga seperti Malaysia, dengan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku terhadap Tenaga Kerja yang ingin bekerja di Indonesia, maupun Tenaga Kerja Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.

Sebagai suatu kejahatan yang bermotivkan ekonomi, maka pengaruh negatif dari delik dalam bidang ekonomi ini pada negara berkembang pernah disampaikan oleh Khaleeq Naqvi, pada saat Kongres PBB ke-5 di Geneva pada tahun 1975, sebagai mana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, adalah:

*Offences against the economy had increased significantly in the recent past and had become the most important component of the national crime situation, particularly in the developing countries. Such crimes adversely affected the basic economic structure and, through their impact on savings, investment, rate of interest, foreign exchange availability and hence levels of output and employment, had negatively stressed the distribution of*

---

29. Ibid, hal. 5.

*national income*.<sup>30</sup>

Mendasarkan pada luas ruang lingkupnya kejahatan penyelundupan yang merupakan bagian dari kejahatan ekonomi serta akibat yang ditimbulkannya, maka adalah wajar jika perhatian terhadap kejahatan penyelundupan ini mendapatkan porsi yang cukup besar. bahkan perhatian masyarakat Internasional akan arti penting kejahatan ini telah dinyatakan secara tegas dalam pertemuan internasionalnya, misalnya dalam Kongres PBB ke-5 dan 6, yang sangat menekankan arti penting terhadap kejahatan dalam bidang ekonomi ini, yang salah satunya adalah penyelundupan (*smuggling*).

Keprihatinan terhadap kejahatan (penyelundupan), menuntut untuk dilakukan kajian yang mendalam terhadap sebab serta asal muasal kejahatan, yang merupakan salah satu substansi dari studi kriminologi.

Sebenarnya studi terhadap kejahatan pada umumnya, terutama dalam usaha untuk menemukan dan menerangkan kausa kejahatan telah dirintis sejak abad pertengahan, hanya pada waktu itu dilakukan belum secara sistematis dan ilmiah.<sup>31</sup> Dan masalah kausa kejahatan dalam kriminologi sendiri dirasakan sebagai hal yang sulit dan rumit. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan teori yang

---

30. Prof. DR. Muladi, S.H. dan DR. Barda Nawawi Arief, S.H. Op cit, hal 150.

31. DR. J.E. Sahetapy, S.H. Op cit, hal. 11.

merupakan upaya terhadap pemikiran formulasi terhadap kausa kejahatan.

Muladi, melihat bahwa perkembangan teori kriminologi mengalami perkembangan dengan mengatakan bahwa:

Studi teoritik tentang asal muasal kejahatan terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada Mulanya teori-teori kriminologi menekankan pada dimensi perilaku dan menjelaskannya dalam kerangka diferensiasi individual. Para penjahat dianggap berbeda dengan orang-orang lain dan dilihat sebagai orang yang secara moral cacat atau tidak sempurna (*to be morally difective*). Pelaku tindak pidana merupakan produk manusia yang mengalami degenarasi biologi dan psikis.

Tinjauan sosilogis kemudian berkembang, dan para ahli mulai mengkaji sosial environment sebagai faktor kriminogen. Pada mulanya perhatian diarahkan pada individu sebagai unit analisis, dan secara bertahap perhatian bergeser pada dampak kondisi-kondisi sosial. Sebab musabab mengapa orang melakukan kejahatan selalu dikaitkan dengan persoalan struktur sosial dalam suatu masyarakat.

Teori proses sosial yang berkembang kemudian menentang pandangan di atas. Apa yang dinamakan *labeling theory* memandang bahwa kejahatan tidak lain merupakan suatu label (etiket) yang melekat pada perbuatan dan orang. Kejahatan dipikirkan sebagai suatu status yang diterapkan pada suatu perilaku dan tidak sebagai bentuk khusus dari suatu perbuatan. Dalam kerangka ini, maka proses pembuatan dan penegakan hukum pidana memperoleh perhatian sentral.<sup>32</sup>

Terhadap perkembangan pemikiran teori kriminologi ini, I.S. Susanto<sup>33</sup> mengatakan bahwa pada garis besarnya pendekatan dalam kriminologi (naturalistik) dapat

---

32. Prof. DR. H. Muladi, S.H. Op cit, hal. 23.

33. DR. I.S. Susanto, S.H. Kejahatan Korporasi, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Cet-I Tahun 1995, hal 6-9. Lihat juga DR. I.S. Susanto, S.H. Kriminologi, Fakultas Hukum Undip, Semarang, Tahun 1995, hal. 3-12.

dibedakan dalam tiga bentuk sistem pemikiran atau aliran pemikiran atau dapat juga disebut paradigma, yang digunakan sebagai dasar kerangka pemikiran teori dan penelitian dalam memberikan penjelasan mengenai fenomena kejahatan. Ketiga aliran pemikiran tersebut adalah aliran pemikiran klasik, positive, dan kritis.

Terhadap perkembangan teori ini, serta dengan melihat kenyataan bahwa masing-masing teori mempunyai kelemahan di dalam memandang suatu kejahatan, maka I.S. Susanto, mengajukan pandangan ke mana sebaiknya kriminologi di Indonesia dikembangkan yaitu:

Untuk lebih banyak mempelajari proses terjadinya kejahatan/penjahat, dalam arti mempelajari kondisi-kondisi struktur, sosial, politik, budaya dan ekonomi yang mempengaruhi pembuatan perundang-undangan (pidana) dan bekerjanya hukum (pidana). Dalam mempelajari bekerjanya hukum, termasuk di dalamnya mempelajari hubungan interaksi diantara subyek-subyek yang terlibat dalam menghasilkan kejahatan, seperti pelanggar, korban, masyarakat serta penegak hukum.<sup>34</sup>

Dengan demikian terlihat bagaimana peranan bidang-bidang lain terhadap perkembangan pemikiran kriminologi.<sup>35</sup> Serta untuk mengkaji terhadap persoalan

---

34. DR. I.S. Susanto, S.H. Kecenderungan-Kecenderungan Dalam Ancangan Kriminologis Di Indonesia, Makalah Disampaikan Pada Seminar Kriminologi VI "National Trends In Crime" Diselenggarakan Atas Kerja Sama FH. Undip ASPEHUPIKI dan Program Kerja Sama Hukum Indonesia - Belanda, Semarang, 15 - 18 September, hal. 12.

35. Prof. Sudarto, S.H. Op cit, hal 157. Berpendapat bahwa:

"Dalam mempelajari kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat, karena menyangkut orang yang berbuat beserta lingkungannya, maka kriminologi tergantung pada hasil-hasil penemuan ilmu-ilmu pengetahuabn lain, misalnya: Antropologi, Sosiologi, Psikologi, Ekonomi, Kedokteran, Statistik. Dengan demikian maka sifat kriminologi dapat dikatakan interdisipliner. Ia memanfaatkan dan mengintegrasikan hasil-hasil penemuan dari berbagai disiplin dibidang kemasyarakatan dan

penyelundupan dengan menggunakan pendekatan kriminologis, maka adalah tepat jika digunakan dengan pendekatan kritis.<sup>36</sup> Dengan pendekatan kritis ini diharapkan akan mampu melihat dan menganalisa secara proporsional terhadap kondisi-kondisi yang kondusif terhadap terjadinya penyelundupan, baik dalam perspektif sosial budaya masyarakat, perspektif ekonomi, perilaku konsumen (*Consumer Behavior*), maupun proses penegakan hukum (*law enforcement*) oleh instansi yang berwenang (lembaga kepastian), bahkan dengan pendekatan kritis dapat kiranya dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah penyelundupan tersebut.

---

...Continued...

perilaku orang tersebut".

36. Terhadap "Kriminologi Kritis" di Indonesia, ternyata terdapat adanya pertentangan mengenai eksistensinya dalam kriminologi. Prof. DR. J.E. Sahetapy, S.H. Teori Kriminologi, Suatu Pengantar, Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, Cet-1, Tahun 1992, hal. 47-58. Misalnya tidak setuju jika "Kriminologi kritis" ini dikembangkan di Indonesia. Pendirian ini tidak hanya dikarenakan menurutnya "Kriminologi radikal" (maksudnya kriminologi kritis - pen) ini sedikit banyak bertentangan dengan Pancasila, melainkan karena adanya larangan menyebarkan paham marxisme.

Sedangkan I.S. Susanto berpendirian sebaliknya dan bahkan membantah bahwa "Kriminologi kritis" tidaklah identik dengan "Kriminologi marxis", lihat DR. I.S. Susanto, S.H. 1995. Op cit, hal. 6-12. juga DR. I.S. Susanto, S.H. Op cit, hal.8-13.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Tidak ada suatu kemutlakan metode<sup>37</sup> pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian, namun metode pendekatan yang digunakan sangatlah menentukan hasil yang diperoleh. Baik tidaknya metode pendekatan yang digunakan sangat ditentukan oleh beberapa hal, yaitu diantaranya tujuan penelitian itu sendiri, karekristik data yang diteliti, bidang ilmu, serta paradigma berpikir yang digunakan dalam upaya menganalisis suatu persoalan sangatlah menentukan metode pendekatan yang akan digunakan.

Hal ini seperti dikatakan oleh Ronny Hanitijo Soemintoro bahwa: "Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitasnya sendiri-sendiri, sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu, selalu disesuaikan

---

37. Menurut Robert Bogdan & Steven J. Taylor, Metode adalah *"The process, principle, and procedures by which we approach problems and seek answers. In the social sciences the term applies to how one conducts research"*, Dalam DR. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Cet-II, Tahun 1982, hal. 6.



dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>38</sup>

Dalam Kriminologi, penelitian bertujuan untuk memperoleh "pengetahuan" tentang seluk beluk kejahatan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisa, dan menafsirkan fakta-fakta (kejahatan) serta hubungannya dengan fakta-fakta yang lain seperti fakta sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum, hankam, struktur yang ada dalam masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan metode "ilmiah".<sup>39</sup>

Dengan mendasarkan pada hal tersebut di atas, serta paradigma kritis yang digunakan dalam penelitian ini maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode **yuridis sosiologis**, yaitu suatu metode pendekatan yang digunakan dalam rangka mengetahui interaksi antara hukum dengan kejahatan. Namun hukum di sini tidak dikonsepsikan sebagai gejala normatif yang mandiri (otonom) tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain.<sup>40</sup>

---

38. Ronny Hanitijo Soemitro, Penelitian Hukum Normatif, (Majalah Hukum No. 5 Tahun 1988), hal. 15.

39. DR. I.S. Susanto, S.H. Kriminologi, Op cit, hal. 25.

40. Ronny Hanitijo Soemitro, S.H. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Penerbit Ghalia Indonesia, cet-III, 1988, hal. 34.

Berdasarkan pada paradigma kritis (*Teori lebeling*) yang menekankan pada interaksi antara pelaku, korban dan penegak hukum, melalui observasi yang intensif (*Intensive Observation*), maka metode penelitiannya adalah Kualitatif.<sup>41</sup> Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti tidak mengandalkan diri pada angka-angka yang merupakan reduksi dari berbagai perilaku manusia, tapi pada pemahamannya pada "makna" yang diberikan oleh subyek penelitiannya pada berbagai situasi yang alami/nature setting.<sup>42</sup>

Alasan lain digunakannya metode penelitian yang kualitatif sifatnya berkenaan dengan tipe-tipe informasi yang diperoleh yaitu antara lain; berusaha mendeskripsikan latar belakang dan interaksi yang kompleks dari partisipan

---

41. Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan aplikasi*, Penerbit Y.A.3 Malang, Cet-I, Tahun 1990, hal. 2.

Menurutnya "Kehadiran penelitian kualitatif berkaitan erat dengan sifat unik dari realitas sosial dan dunia tingkah laku manusia itu sendiri. Keunikannya bersumber dari hakekat manusia sebagai makhluk psikis, sosial, dan budaya yang mengaitkan makna dan interpretasi dalam bersikap dan bertingkah laku; makna dan interpretasi itu sendiri dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Komplek sistem makna (*complex meaning system*) tersebut secara konstan digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam mengorganisasikan segenap sikap dan tingkah lakunya sehari-hari. Karena itu "dunia sosial dan tingkah laku manusia" barulah dapat dipahami secara benar apabila kita (baca: peneliti) mampu menarik "inferensi" melalui proses penghayatan terhadap sistem makna yang terstruktur dalam "dunia psikis, sosial dan budaya".

42. Harkristuti Harkrisnowo, *Metodologi Penelitian Dalam Kriminologi, Beberapa Alternatif*. Makalah Disampaikan Pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Yang Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Bandung - Semarang, dari Tanggal 14 s/d 30 Nopember 1994, hal. 8.

(masyarakat), eksplorasi untuk mengidentifikasi-tipe informasi baru yang dikumpulkan. Untuk memahami kejahatan (penyelundupan) yang terbatas sifatnya, namun dengan fokus yang mendalam dan rinci, mempersoalkan variabel-variabel atau domain yang ada sehingga dilakukannya kejahatan penyelundupan menurut pandangan dan definisi partisipan (masyarakat).

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian terhadap kejahatan penyelundupan ini dilakukan pada Kabupaten Sanggau, Kecamatan Sekayam dengan Desanya "Entikong". Adapun yang menjadi dasar diambilnya Desa Entikong sebagai lokasi penelitian dengan melihat realitas bahwa Entekong adalah satu-satunya pintu masuk resmi yang ada di daerah perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Malaysia Timur, yang sangat berpengaruh terhadap pranata kehidupan masyarakat setempat.

Disamping itu hubungan dan interaksi antara kedua masyarakat di daerah perbatasan tersebut sudah terjalin cukup lama, termasuk di dalamnya hubungan perdagangan antara kedua masyarakat yang ada di daerah tersebut.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Karena penelitian ini sifatnya kualitatif

dengan memfokuskan pada perilaku manusia dengan segala ciri-cirinya, maka Jenis data yang utama adalah data primer, yang diperoleh pada penelitian di lapangan. Di samping itu untuk menunjang kelengkapan dari data primer, maka dalam penelitian ini juga digunakan data sekunder baik berupa beberapa peraturan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti, jurnal penelitian untuk kemudian dilakukan analisis yang mendalam terhadap data tersebut.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah masyarakat yang berdomisili di daerah perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Malaysia Timur (Serawak). Namun guna kepentingan penelitian ini, agar diperoleh data seoptimal mungkin maka dipergunakan tehnik sampling, khususnya Purpossiv sampling.

Dengan mengingat arti pentingnya purposive sampling dalam penelitian kualitatif ini, maka sistem penyeberan sampelnya mengikuti sistem "*Snow ball sampling*",<sup>43</sup> dan akan berhenti bilamana sudah terlihat adanya indikasi tidak munculnya variasi atau informasi baru.

---

43. Sanapiah Faisal, Op cit, hal. 60.

Sebagai implikasi dari digunakannya purposive sampling dengan sistem sampelnya "*Snow ball sampling*", informan awal yang digunakan dalam penelitian ini adalah, antara lain:

- Satu orang masyarakat yang melakukan penyelundupan.
- Satu orang konsumen.
- satu orang penegak hukum (Bea Cukai, Polisi).

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Bertolak dari jenis penelitian kualitatif, maka agar diperoleh data yang memang dapat menggambarkan permasalahan dengan sesungguhnya, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan observasi terhadap persoalan yang akan dilakukan dalam penelitian. Hal ini dilakukan tentunya dengan mengingat segala keunggulan dan kekurangan masing-masing teknik tersebut, sehingga dapat saling melengkapi terhadap data yang diperoleh.<sup>44</sup>

## 6. Analisis Data

Terhadap data yang telah diperoleh, maka dilakukan analisis dengan menggunakan gabungan antara analisis domain, analisis taksonomis,

---

44. I b i d, hal. 61 & 77.

analisis komponensial serta analisis tema.

a. Analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup dalam suatu permasalahan yang sedang diteliti. Hasil analisis domain ini masih berupa pengetahuan/pengertian ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau katagori-katagori konseptual. Dalam penelitian ini pengetahuan atau pengertian yang diteliti pada tingkat analisis domain adalah menelusuri hubungan semantis yang bersifat universal antara pelaku penyelundupan, perilaku konsumen dan para aparat penegak hukum. Domain yang diteliti sebagai hasil dari kegiatan *grand tour* (melalui observasi dan wawancara) antara lain:

- Domain yang berkaitan dengan jenis.
- Domain yang berkaitan dengan ruang (spatial).
- Domain yang berkaitan dengan sebab akibat.
- Domain yang berkaitan dengan rasional atau alasan melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- Domain yang berkaitan dengan lokasi melakukan sesuatu.
- Domain yang berkaitan dengan cara melakukan/mencapai sesuatu.
- Domain yang berkaitan dengan fungsi.

- Domain yang berkaitan dengan urutan/tahap.
- Domain yang berkaitan dengan atribut atau karakteristik.

- b. **Analisis Taksonomis** dilakukan guna mengetahui domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena/fokus yang menjadi sasaran semula penelitian. Dalam analisis ini juga dilakukan analisis yang rinci dan mendalam terhadap struktur internal masing-masing domain dengan cara mengorganisasikan atau menghimpun eemen-elemen yang berkesamaan disuatu domain (*organizes similarities among elements in domain*).
- c. **Analisis komponensial** dilakukan guna mengetahui perbedaan atau kontras antar elemen dalam suatu domain.
- d. **Analisis tema (*discovering cultural*)** dilakukan guna mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain yang ada.

Ketiga analisis data yang disebutkan pertama dilakukan secara simultan disaat pengumpulan data di lapangan (analisis domain dipergunakan pada tahap eksplorasi menyeluruh, sedangkan analisis taksonomis dan komponensial dipergunakan pada tahap eksplorasi terfokus). Analisis data yang disebutkan terakhir (analisis tema) dilakukan setelah kegiatan

pengumpulan dan analisis data di lapangan.

## 7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini disusun berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas. Sebagai suatu karya ilmiah, maka tesis ini disusun dalam IV Bab yang masing-masing bab mempunyai subbab tersendiri yang menggambarkan fokus permasalahan yang diteliti.

Sistematika penulisan tesis ini dimulai dengan menguraikan Bab I sebagai Pendahuluan yang terdiri dari 7 (tujuh) subbab, yaitu latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Hasil Penelitian, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian serta Sistematika Penulisan. Substansi yang terkandung pada Bab I ini pada dasarnya adalah membahas latar belakang yang merupakan acuan guna penyusunan permasalahan penelitian. Fokus utama dalam latar belakang penelitian ini terutama menyangkut perkembangan bentuk kejahatan penyelundupan yang terjadi di masyarakat, terutama pada masyarakat perbatasan antara Kalimantan Barat dan Malaysia (Kalimantan Utara), terutama sekali difokuskan pada dua dimensi yaitu penyelundupan sebagai bentuk kejahatan ekonomi (*Economic Crimes*) dan kejahatan yang



dilakukan secara terorganisir (*Organized Crimes*), serta melihat bagaimana pengaruh aktivitas penyelundupan ini terhadap tatanan ekonomi pada umumnya. Di samping itu dalam Bab I ini juga diuraikan bahwa dalam melihat aktivitas penyelundupan ini digunakan pendekatan kriminologi sebagai alat analisis utamanya.

Bab II merupakan tinjauan pustaka sebagai kerangka dasar teoritis yang digunakan dalam melihat persoalan penyelundupan ini. Bab II ini terdiri dari 3 (tiga) subbab, yang masing-masing subbab membahas secara rinci perkembangan pemikiran teoritis terhadap persoalan yang berkaitan erat dengan permasalahan penyelundupan sebagai fokus utama dalam tesis ini. Subbab pertama menguraikan tentang perkembangan pemikiran studi kriminologi dan peranannya dalam Sistem Peradilan Pidana. Subbab kedua bersubstansikan pada perkembangan kejahatan penyelundupan baik dalam konteks sebagai kejahatan ekonomi (*Economic Crimes*) dan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir (*Organized Crimes*). Sedangkan substansi dari subbab ketiga berisikan pembahasan mengenai interaksi antara pelaku penyelundupan dengan konsumen, penegakan hukum serta undang-undang. Dengan demikian secara keseluruhan substansi Bab II dapat menggambarkan

secara komprehensif terhadap perkembangan kejahatan penyelundupan dengan segala implikasi teoritisnya.

Bab III berisi tentang hasil penelitian yang dan pembahasannya yang terdiri dari 6 (enam) subbab pembahasan. **Pertama** subbab tentang letak dan keadaan geografis lokasi penelitian terutama letak dan keadaan geografis Kabupaten Sanggau dan Kecamatan Sekayam yang merupakan salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan daerah perbatasan Malaysia dan Kalimantan Barat. **Kedua** subbab tentang perkembangan kejahatan penyelundupan di Kalimantan Barat, terutama yang terjadi pada masyarakat perbatasan (lokasi penelitian). **Ketiga** subbab yang berisikan tentang analisis terhadap pelaku kejahatan terutama masyarakat yang berdomisili di daerah perbatasan tersebut. **Keempat** subbab yang substansinya mengenai konsumen, terutama analisis yang didasarkan pada pendekatan kebutuhan konsumen (*Economic Approach*) maupun analisis yang mendasarkan pada hak konsumen (*Consumer Rights*). **Kelima** subbab yang substansinya merupakan analisis terhadap penegak hukum (Bea dan Cukai) terutama dilihat dari dimensi birokratis dengan segala aspek yang melingkupinya. **Keenam** subbab yang substansinya merupakan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang

Kepabeanaan, terutama sanksi yang ada dalam undang-undang tersebut. Keenam subbab tersebut di atas merupakan bagian yang sangat erat sekali (*interdependensi*) dan merupakan causa terhadap kejahatan penyelundupan.

Bab IV merupakan bab terakhir dari keseluruhan kerangka penyusunan tesis ini yang terdiri dari dua subbab, yaitu pertama subbab kesimpulan atas pembahasan permasalahan dan hasil temuan dilapangan serta subbab kedua merupakan saran yang direkomendasikan berdasarkan pada kesimpulan yang diperoleh.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN KRIMINOLOGI DAN PERANANNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Sebagai salah satu ilmu yang secara sistematis mempelajari kejahatan di dalam masyarakat, maka kriminologi dalam pertumbuhannya tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan disiplin ilmu lain misalnya antropologi kriminal, psikologi kriminal, psikiatri kriminal, sosiologi kriminal, statistik kriminal, viktimologi, penologi dan teori-teori umum peradilan pidana.

Kriminologi mempunyai sejarah sendiri yang ditandai oleh berbagai paradigma, perspektif berpikir yang berbeda, dominasi aliran-aliran (*the school of criminology*) maupun pelbagai pendekatan. Paradigma, perspektif, maupun pendekatan yang ada dalam kriminologi kesemuanya berupaya melihat, memahami, menafsirkan, menanggapi serta menjelaskan realitas kejahatan.

Secara garis besar terdapat dua aliran atau paradigma yang ada dalam kriminologi dalam upaya menjelaskan kejahatan yaitu penjelasan yang mendasarkan pada pendekatan *spritistik* atau *demonologik* dan pendekatan *naturalistik*. Kemudian khusus terhadap pendekatan yang *naturalistik*, I.S. susanto membagi menjadi tiga aliran yaitu aliran pemikiran klasik,

positiv dan kritis.<sup>45</sup>

Menurut Don. C. Gibbon *"The core concepts of the classical frame of reference were hedonism and free will"*.<sup>46</sup> Lebih lanjut dikatakan oleh Don S. Gibbon bahwa *"The conclusion from these premises was that criminals make deliberate, rational, hedonistically oriented decisions to engage in lawbreaking"*.<sup>47</sup> Demikian juga aliran klasik dalam memandang kejahatan dan penjahat dilihat semata-mata dari batasan undang-undang. Kejahatan didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, penjahat adalah setiap orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu dalam menilai untung ruginya melakukan kejahatan.

Oleh karena itu secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat (penguasa) terhadap hal ini adalah meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar

---

45. DR. I.S. Susanto, S.H. Kriminologi, Op cit, hal. 2-6. Lihat juga DR. I.S. Susanto, S.H. Kejahatan Korporasi, Op cit, hal. 5-8. Penjelasan yang rinci mengenai perkembangan pemikiran yang demonologis dan spiritistik serta varian teorinya, lihat juga Prof. J.E. Sahetapy, Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik, Op cit, hal. 12-32.

46. Don C. Gibbon. Society, Crime and Criminal Behavior. Prentice Hall. Englewood. New Jersey. 1992 hal. 16.

47. Ibid.

orang-orang tidak memilih untuk melakukan kejahatan.<sup>48</sup>

Sedangkan aliran pemikiran positiv, menurut **Michael R. Gottfredson dan Travis Hirschi** sangat bertolak belakang dengan aliran klasik, ide pengetahuannya bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia terbatas dalam arti sudah ditentukan sedangkan aliran klasik percaya pada kebebasan di dalam berkehendak.<sup>49</sup>

Faktor penentu tersebut baik berupa faktor biologik maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh perangkat biologiknya dan situasi kulturalnya. Implikasi terhadap kriminologi adalah bahwa para kriminolog yang positivistik menolak penjelasan yang berorientasi pada nilai, dan mengarahkan pada aspek-aspek yang dapat diukur dari pokok persoalannya dalam usaha mencari hubungan sebab akibat.<sup>50</sup>

Perkembangan berikutnya adalah kriminologi kritis- aliran yang menjadi sorotan utama dalam tulisan ini- yang kemunculannya sesudah pemikiran kritis dari disiplin

---

48. DR. I.S. Susanto. Op. cit.

49. Michael R. Gottfredson dan Travis Hirschi (editor). *Posistiv Criminology*, Sage Publication, 1987. hal. 9.

"...They learn that the positivist accepted the scientific idea that human behavior is determined, while the classicists believed in chooice or freedom of the will".

50. DR. I.S. Susanto, S.H. Op Cit.

ilmu lain seperti politik, ekonomi, sosiologi dan filsafat.<sup>51</sup> Secara etimologis saja terlihat adanya perbedaan paradigma antara aliran klasik, positif dan kritis ini dalam melihat kejahatan, hal ini dikarenakan sikap kritis menurut R.C Kwant adalah:

"Kata kritis berasal dari bahasa Yunani "Kriein" artinya "memisahkan", "Memerinci". Sehingga dapat dikatakan mempunyai sikap atau pemikiran yang kritis jika orang dapat membuat pemisahan, perincian antara yang bernilai dan bukan, arti dan bukan arti, baik dan jelek. Sehingga kritis adalah penilaian atas nilai".<sup>52</sup>

Pada sisi lain I.S. Susanto menggunakan istilah pendekatan kritis dalam pengertian yang agak umum. Menurutnyai:

Sebagai "cara pandang" yang lebih mengarahkan pada proses-proses terbentuknya realitas sosial. Cara pandang ini akan digunakan dalam membahas, memahami dan mempertanyakan realitas sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari, terutama dihubungkan dengan tujuan kehidupan masyarakat dan bernegara, yakni dalam mencapai masyarakat adil dan makmur sebagaimana tersurat dalam Pancasila dan

---

51. Khusus terhadap pemikiran kritis dalam filsafat, Franz Magnis Suseno, Berfilsafat Dari Konteks, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, tahun 1991, hal. 5. mengatakan bahwa:

"...Filsafat kritis adalah filsafat yang berfikir metodelis, logis, bertata tertib dan secara tegas mendasarkan diri pada fenomena-fenomena yang dialami oleh manusia-manusia yang nyata serta dihasilkan oleh ilmu-ilmu yang relevan. Filsafat ini dipertanggungjawabkan secara intelektual untuk melakukan apa yang sebetulnya diharapkan dari setiap orang yang tidak hanya mau membebek saja, yang tidak hanya mau menelan mentah-mentah apa yang sudah dikunyah sebelumnya oleh pihak-pihak lain. Yaitu untuk mengerti, memahami, mengartikan, menilai, mengkritik data-data dan fakta-fakta yang dihasilkan dalam pengalaman sehari-hari dan melalui ilmu-ilmu".

52. Prof. R.C. Kwant, Manusia dan Kritis, dalam P. Leenhouders, Manusia Dalam Lingkungannya, Refleksi Filsafat Tentang Manusia, (diterjemahkan oleh K.J. Veeger M.A.) Penerbit PT. Gramedia Jakarta, 1970, hal. 280.

UUD '45.<sup>53</sup>

Karena fokus serta cara studinya berbeda dengan kedua aliran sebelumnya (aliran klasik dan positiv), maka berbagai nama sering dijumpai terhadap aliran kriminologi kritis ini, misalnya J.E. Sahetapy memberi istilah dengan "kriminologi baru". disamping ada yang memberi nama "kriminologi radikal", "kriminologi sosialis", "Kriminologi sayap kiri", atau "Kriminologi marxis".<sup>54</sup>

Perbedaan paradigma antara kriminologi kritis dengan dua aliran sebelumnya (klasik dan positiv) menurut Gwynn Nettler terlihat dari proposisi yang mendasari aliran kriminologi tersebut yaitu antara lain: *Situated ideas, Critical Philosophy, Contra positivism, Crime defined, Unjust justice, Human right denied* dan *Liberation Promised*.<sup>55</sup>

Upaya melakukan penjelasan kejahatan sifatnya situasional (*Situated ideas*), yang sangat erat kaitannya dengan faktor waktu, dan lebih khusus lagi menyangkut kepentingan ekonomi. *Critical philosophy* dimaksudkan bahwa kriminologi kritis dalam upaya melihat dan menjelaskan perilaku jahat didasarkan pada filsafat

---

53. I.S. Susanto. Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial. Dalam Masalah-Masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum Undip, No. 9, Tahun XXII-1992, hal. 14.

54. DR. J.E. Sahetapy, S.H. Teori Kriminologi, Suatu Pengantar, Op cit, hal. 47.

55. Gwynn Nettler, Op Cit, hal. 207-211.



phenomenologi<sup>56</sup> yang mempunyai asumsi bahwa seseorang yang berpikir selalu dalam konteks waktu dan tempat, oleh karena itu tentu ada lebih dari satu cara berpikir.

*Contra Positivism* dimaksudkan bahwa kriminologi kritis tidak puas dengan cara berpikir kausal yang dilakukan oleh kriminologi konvensional, yang sifatnya mekanistik. Oleh karena itu kejahatan menurut kriminologi kritis adalah dirumuskan oleh mereka yang berkuasa, sehingga menurut Gwynn Nettler "*Crime is one of the words used to describe the wrongs we do ourselves and others*".<sup>57</sup> Demikian juga I.S. Susanto berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial,<sup>58</sup> artinya manakala masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu memenuhi

---

56. Drs. Ali Mudhofir, *Kamus Teori Dan Aliran Dalam Filsafat*. Penerbit Liberty Yogyakarta. Tahun 1988. Cet-I. Hal. 71.

Istilah fenomenologi berasal dari kata *fenomenon* dan biasanya diucapkan *fenomen* atau *gejala*. Menurut para filsuf fenomenologi, suatu fenomen tidak harus dapat diamati dengan indra. Suatu fenomen dapat juga dilihat secara rohani, tanpa lewat indra. Fenomen tidak harus suatu peristiwa. Bagi seorang penganut fenomenologi, yang dimaksud dengan fenomen adalah "apa yang menampakkan diri dalam dirinya sendiri, apa yang menampakkan diri seperti apa adanya, apa yang jelas di hadapan kita".

57. Ibid. hal.1

58. Menurut DR. I.S. Susanto. Tahun XXII-1992. Op cit. hal.14. Konstruksi sosial sangat berkaitan dengan realitas sosial. Realitas sosial dapat diartikan sebagai kenyataan tentang kejadian-kejadian dan sebagai gambaran tentang kenyataan atau pengetahuan tentang kenyataan. Yang pertama menggambarkan tentang kejadian-kejadian di dalam masyarakat yang dapat dilihat, didengar dan dibaca di dalam kehidupan sehari-hari atau dapat dipandang sebagai realitas tentang fenomena. Sedangkan yang kedua merupakan gambaran atau pengetahuan yang kita miliki tentang kenyataan sosial atau realitas konseptual. Kedua realitas sosial tersebut bukanlah suatu keadaan atau kenyataan yang adanya seakan-akan "jatuh dari langit" akan tetapi keberadaannya karena diadakan atau istilah sosiologisnya "sebagai konstruksi sosial".

batasan sebagai kejahatan. Ini berarti bahwa kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri yang dapat diidentifikasi dan dipelajari secara obyektif oleh ilmuwan sosial.<sup>59</sup>

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) menurut kriminologi kritis dalam aktivitasnya bersifat diskriminatif. Pada akhirnya kriminologi kritis berusaha atau menjanjikan kebebasan (*Liberation Promised*), dimana hak asasi manusia merupakan batu pijakan utamanya dalam melihat keseluruhan persoalan, baik proses kriminalisasi, sampai pada proses penegakan hukum.<sup>60</sup>

Sedangkan Ian Taylor et.al. yang merupakan pelopor bagi kriminologi baru (*New Criminology*), mengungkapkan bahwa pendekatan baru ini berusaha melakukan penelitian dan pemahaman ilmiah terhadap kejahatan, dan diperlukan guna dapat mengungkap:

*The Wider origins of the deviant act, Immediate origin of the deviant act, The actual act, Immediate origins of social reaction, Wider origin of deviant reaction, The outcome of the social reaction on deviant's further action, The nature of the deviant process as a whole.*<sup>61</sup>

Akar yang lebih luas dari perilaku menyimpang (*The*

---

59. DR. I.S. Susanto, S.H. Op Cit. hal. 8-13.

60. Gwynn Nettler Op cit. hal. 207-211.

61. Ian Taylor, et. al. *The New Criminology: for a social theory of deviance*. Rothledge & Kegan Paul. London and Boston. 1973. hal. 270-276.

*Wider origins of the deviant act*) dapat dijelaskan dengan melihat kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.

Kemudian kriminologi kritis juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pencetus yang langsung dari perilaku menyimpang (*Immediate origin of the deviant act*), sebagai akibat tanggapan, reaksi dan perwujudan tuntutan-tuntutan struktural dalam pengertian bahwa manusia mungkin secara sadar memilih jalan menyimpang sebagai cara pemecahan masalah-masalah pertentangan.

Kriminologi kritis juga bertujuan mempelajari hubungan antara tindakan nyata dengan keyakinan pelaku (*The actual act*), antara rasionalitas optimum yang dipilih manusia dengan perilaku yang dikerjakan dalam kenyataan, oleh karena selalu terdapat hubungan antara pilihan individu dengan tindakan. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah pemahaman atas dinamika sosial yang melatarbelakangi tindakan-tindakan.

Reaksi-reakasi sosial (*Immediate origins of social reaction*) yang dilakukan oleh orang-orang, kelompok-kelompok (penguasa) atau alat-alat pengendali sosial, terutama dengan menggunakan hukum pidana terhadap penyimpangan. Mempelajari akar yang luas daripada reaksi

sosial terhadap pelaku (*Wider origin of deviant reaction*). Reaksi pelaku atas reaksi sosial yang diberikan padanya (*The outcome of the social reaction on deviant's futher action*). Serta mempelajari sifat dari proses perilaku menyimpang secara keseluruhan (*The nature of the deviant process as a whole*) merupakan bidang kajian dari kriminologi kritis.<sup>62</sup>

Dengan demikian cara kriminologi kritis dalam studinya tidak hanya berhenti pada pengertian kejahatan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang (Aliran klasik dan positif) serta fenomenanya tetapi juga diarahkan pada proses pembuatan undang-undang (kriminalisasi) yang merupakan salah satu sarana pengendali sosial (*Social Control*), maupun bekerjanya hukum. Kriminologi kritis bukan sekedar mempelajari perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, akan tetapi juga perilaku dari agen-agen kontrol sosial (aparatus penegak hukum), di samping mempertanyakan dijadikannya tindakan-tindakan tertentu sebagai kejahatan. Khusus terhadap undang-undang studi kritis yang dapat dilakukan menurut I.S. Susanto adalah:

Terhadap perundang-undangan perlu dikaji tentang substansinya, yaitu seberapa jauh "cacat" yang dimilikinya, seperti kepentingan-kepentingan apa yang ada dibalik undang-undang, siapa atau kelompok masyarakat mana yang akan memperoleh

---

62. Ibid

keuntungan/manfaat lebih besar dari pengaturan atau sebaliknya yang akan dirugikan, apakah undang-undang tersebut sudah cukup adil, apakah sanksinya memadai dan manusiawi dan sebagainya.<sup>63</sup>

Demikian juga terhadap penegak hukum dengan menggunakan kriminologi kritis kiranya dapat diungkapkan "kepentingan-kepentingan" dan hal-hal lainnya yang melatarbelakangi tindakan aparat penegak hukum, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi dalam interaksinya dengan pelanggar, korban dan masyarakat pada umumnya sehingga menghasilkan penegakan hukum yang bersifat selektif.<sup>64</sup> Sementara dimensi korban tentunya menyangkut persepsinya tentang apa yang dipandang sebagai kejahatan, kepentingan yang ada, kesadaran dan sikap korban terhadap hak-haknya.<sup>65</sup>

Dari apa yang telah diuraikan tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa obyek studi kriminologi, terutama kriminologi kritis pada dasarnya adalah sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) itu sendiri, karena menurut James M. Henslin dalam mempertimbangkan kejahatan sebagai suatu masalah sosial, maka kita harus melihat juga paling tidak aspek yang nyata yaitu sistem

---

63. DR. I.S. Susanto. Tahun XXII-1992. Op cit. hal. 17.

64. Ibid.

65. Ibid.

peradilan pidana (*Criminal Justice System*).<sup>66</sup> Lebih lanjut James M. Hanslin mengatakan bahwa "*We cannot adequately understand crime as a social problem, however, without examining the system that deals with it*".<sup>67</sup> Hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana merupakan jaringan kerja antara lembaga yang berusaha mengatasi persoalan kejahatan, termasuk polisi, pengadilan dan penjara,<sup>68</sup> bahkan juga lembaga bantuan hukum dapat dimasukan dalam keseluruhan sistem peradilan pidana. Karena lembaga bantuan hukum merupakan salah satu institusi yang sangat respon terhadap persoalan kejahatan.

Menurut Muladi Sebagai suatu sistem, maka sistem peradilan pidana dalam aktivitasnya tidaklah dapat dilihat sebagai *Deterministic System* yang bekerjanya dapat ditentukan secara pasti, namun harus dilihat sebagai *Probabilistic System* yang hasilnya (*output*)

---

66. James M. Hanslin. *Social Problem*, Second Edition. Prentice Hall, Englewood Clifft, New Jersey. 1990, hal. 199.

"In considering crime as a social problem, we must also look at a less obvious aspect: the criminal justice system itself".

67. Ibid. hal. 201

68. Ibid. Hal 199. "The Criminal Justice System are the network of agencies that respond to crime, including the police, courts, jail, and prisons".

Bandingkan juga misalnya pengertian Criminal Justice System menurut Black's Law Dictionary, yang mengatakan "Criminal Justice System have to look as the network of courts and tribunals which deal with criminal law and its enforcement".

secara tidak pasti tidak dapat diduga.<sup>69</sup>

Menurut Alan Coffey et.al.<sup>70</sup> agar supaya pendekatan konsep peradilan pidana sebagai suatu sistem dapat dilihat, maka Alan Coffey et.al. menggunakan tiga komponen utama yaitu masukan dari sistem (*input*), proses dan hasil (*output*), dan output yang merupakan hasil dari suatu proses sistem tersebut merupakan umpan balik terhadap keseluruhan sistem.

Sedangkan menurut Gordon B. Davis mengatakan bahwa pemahaman pengertian system dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *Physical System* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *Abstract System* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.<sup>71</sup>

Jadi terlihat jelas bahwa dalam upaya memahami kejahatan dengan pendekatan kriminologi kritis pada dasarnya adalah melakukan studi terhadap peradilan pidana sebagai suatu sistem, yang di dalamnya banyak terkait institusi yang mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda

---

69. Prof. DR. H. Muladi, SH. 1995. Op cit. hal. 15.

70. Alan Coffey et.al. An Introduction to the Criminal Justice System And Proses. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey. hal. 84.

71. Gordon B. Davis. Management Information System Conceptual Foundation Structure and Development. Mc. Graw Hill. Yokyo, Sydney, 1974. hal 81-84. dalam Prof. Dr. H. Muladi. SH. Op cit. hal. 15.

namun antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya sangat terkait erat. Tentunya dalam hal ini melihat bagaimana sistem peradilan pidana tersebut melaksanakan peranan dan fungsinya, yang secara eksplisit maupun implisit berbagai ideologi, gagasan, serta kepentingan dalam merespon kejahatan sebagai masalah sosial dapat dilihat.

Kriminologi kritis ini secara relatif dapat dibedakan antara pendekatan "interaksionis" dan "konflik".<sup>72</sup> Menurut Frank P. Williams III dan Marilyn D. McShane interaksionis simbolik merupakan ciri perspektif Chicago yang mempunyai konsep bahwa perilaku manusia itu bukan bawaan dari lahir namun merupakan hasil atau produk lingkungan sosial.<sup>73</sup>

Persoalan mendasar dalam interaksionis adalah bagaimanakah masyarakat itu membentuk seseorang, atau bagaimanakah individu tersebut menciptakan, mempertahankan dan mengubah masyarakat. Dalam konteks kriminologi maka pendekatan interaksionis berusaha untuk menentukan mengapa tindakan-tindakan dan orang-orang tertentu didefinisikan sebagai kriminal dimasyarakat tertentu

---

72. DR. I.S. Susanto. Op. Cit.

73. Frank P. Williams III dan Marilyn D. McShane. *Criminological Theory*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1988. hal. 38-39.

*"Symbolic interactionism developed from a belief that human behaviour was the product of purely social symbols communicated between individuals.. the mind and the self are not innate but are products of the social environment".*



dengan cara mempelajari "**persepsi**" makna kejahatan yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Mereka juga mempelajari makna kejahatan yang dimiliki agen kontrol sosial dan orang-orang yang diberi batasan sebagai penjahat. Di samping itu juga dipelajari makna proses sosial yang dimiliki kelompok yang bersangkutan dalam mendefinisikan seseorang sebagai penjahat.<sup>74</sup>

Hal ini dikarenakan menurut **Weber** ada realitas di belakang struktur sosial yang makro, yang merupakan interaksi simbolik yang bermakna antara manusia.<sup>75</sup> Oleh karena itu dalam penjelasan perilaku devian para interaksionis menekankan pada peranan dari **makna** (*meaning*). **Goode** mengemukakan tiga kunci pangkal tolak untuk para interaksionis yaitu: **pertama** orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*). **kedua** makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat (*intimate others*), dan **ketiga** makna terus menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain dan situasi.<sup>76</sup> Sehingga **Gwynn Nettler** menempatkan penyebab perilaku kita dalam interpretasi kita

---

74. DR. I.S. Susanto. Op cit

75. Prof. DR. J.E. Sahetapy, SH. 1992. Op cit. hal.2.

76. Ibid

terhadap realitas.<sup>77</sup>

Sebaliknya pendekatan konflik lebih memfokuskan studinya dalam mempertanyakan "kekuasaan" dalam mendefinisikan kejahatan. Menurut kriminologi konflik, orang berbeda karena memiliki perbedaan kekuasaan dalam mempengaruhi perbuatan dan bekerjanya hukum. Secara umum dikatakan bahwa mereka yang memiliki tingkat kekuasaan yang lebih besar mempunyai kedudukan yang lebih baik (menguntungkan) dalam mendefinisikan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingannya sebagai kejahatan.

Pandangan konflik bertolak pangkal dari anggapan-anggapan dasar bahwa konflik merupakan gejala yang melekat pada setiap masyarakat, sehingga setiap masyarakat selalu berada dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir. Juga merupakan anggapan dasar bagi para penganut pendekatan konflik bahwa setiap unsur dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan untuk terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial, sedangkan setiap masyarakat terintegrasi karena dominasi oleh sekelompok orang-orang terhadap sekelompok orang-orang

---

77. Gwynn Nettler, Op Cit. hal. 264.

*"Symbolic interaktionism locates the causes of our behaviors in our interpretations of reality".*

lain.<sup>78</sup>

Konflik juga dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan (*Disequilibrium/imbalance*) aspek-aspek yang ada dalam masyarakat atau antara kelompok-kelompok sosial atau antara keduanya yaitu antara kelompok sosial dengan aspek-aspek yang ada dalam masyarakat.<sup>79</sup> Perbedaan dan ketidakseimbangan tersebut dapat bersumber dari kekuasaan yang dimiliki, penguasaan sumber-sumber ekonomi. Sehingga Menurut **James M. Haslin** dari perspektif konflik ini, kejahatan merupakan ciri yang melekat dari masyarakat, dimana setiap orang berkompetisi dalam memperoleh sumber atau barang yang langka dan terbatas.<sup>80</sup>

Dari pendekatan konflik ini, derivasi teori yang terkenal adalah teori labeling dengan **Howard Becker** sebagai tokoh utamanya, dan **Edwin Lemert**. Teori labeling pada dasarnya menyepakati bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu: **Pertama** adanya

---

78. Ronny Hanitijo Soemitro, SH. Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik. Penerbit CV. Agung Semarang, 1990. hal.6. Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, S.H. Masalah-Masalah Sosiologi Hukum. Penerbit Sinar Baru Bandung, Cet- I. 1984. hal. 35. Lihat Juga Ronny Hanitijo Soemitro. Studi Hukum Dan Masyarakat, Penerbit Alumni Bandung. 1985. hal 27

79. Ronald A. Hardean. et. al. Confronting Social Problems, West Publishing Company, St, Paul New York, 1984. hal. 9.

"Conflict theorists focus on disequilibrium (imbalance) between aspects of Societies or between other social groups or both".

80. James M. Henslin. Op cit. hal. 164.

"From the conflict perspective, violence is an inherent feature of human society. With people competing for scare and limited resources, violence is to be expected"

label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang diberi label. Hal ini akan menyebabkan masyarakat di sekitarnya memperhatikan terus-menerus orang yang diberi label tersebut. Kedua adanya label mungkin akan diterima oleh individu tersebut dan berusaha untuk menjalani sebagaimana label yang dilekatkan pada dirinya, dan salah satu proses tersebut akan menjelaskan kejahatan dan menciptakan karir penjahat.

H. Becker dalam melihat perilaku menyimpang (*deviance*) berpendapat:

Kelompok-kelompok sosial menciptakan penyimpangan dengan membuat aturan-aturan. Pelanggaran terhadap aturan merupakan penyimpangan. Aturan-aturan itu diterapkan pada orang-orang tertentu, dengan mencap mereka (*labeling*) sebagai orang diluar garis (*"outsider"*). Dari sudut pandangan ini, penyimpangan bukanlah suatu kualitas perbuatan yang dilakukan seseorang, melainkan lebih merupakan akibat penerapan aturan-aturan dan sanksi-sanksi oleh orang lain terhadap si pelanggar. Prilaku penyimpangan adalah mereka yang terkena cap, sedangkan perilaku menyimpang adalah perilaku yang dicap demikian oleh masyarakat.<sup>81</sup>

Dalam melihat kejahatan sebagai hasil kreasi dari kelompok sosial yang ada, maka menurut D. Stanley Eitzen kejahatan tersebut diciptakan dan dipertahankan pada tiga

---

81. Howard S. Becker. *Outsiders, Studies In The Sociology Of Deviance*. The Free Press. New York. 1973. hal. 9.

*"Social groups create deviance by making the rules whose infraction constitutes deviance, and by applying those rules to particular people and labeling them as outsiders. From this point of view, deviance is not a quality of the act the person commits, but rather a consequence of the application by others of rules and sanctions to an "offender". The deviant is one to whom that label has successfully been applied, deviant behavior is behavior that people so label."*

level yaitu, level atau **tingkat pertama** terjadi pada kelompok pembuat peraturan, terutama dalam hal ini adalah masyarakat. **Kedua** kejahatan tersebut diciptakan dan dipertahankan dalam hubungan interpersonal (*interpersonal relations*), dan **Ketiga** kejahatan diciptakan dan dipertahankan pada tingkat organisasi yang secara formal memproses perilaku menyimpang, di sini yang menjadi fokusnya adalah lembaga baik umum maupun privat yang memproses mereka yang tidak patuh (*wayward*) misalnya pengadilan, penjara dan rumah sakit jiwa.<sup>82</sup>

**Edwin Lemert** juga menjelaskan kejahatan dari perspektif reaksi sosial. **Lemert** menguraikan tentang proses-proses seseorang diasingkan sebagai pelaku penyimpangan dan akibatnya karir kehidupannya terorganisasikan atau terbentuk secara pribadi di sekitar status-status sebagai pelaku penyimpangan. Dalam kaitan ini **Lemert** memperkenalkan perbedaan utama antara penyimpangan primer (*primary deviant*) dan penyimpangan

---

82. D. Stanley Eitzen. *Crime and Justice, Social Problem*. Allyn and Bacon, Inc. Boston. 1986. hal. 432-433.

*From this perspective (labeling-pen) deviance is created and sustained at three levels.*

1. *The first level is that of collective rule making. The rules of society created deviance. What is deviant varies from society to society and from one period to another within a society.*
2. *The second level of creating and sustaining deviance is that of interpersonal relations.*
3. *Finally, there is the formal level of the organizational processing of deviants. Here the focus on the public and privat agencies that process the wayward, for examples: the courts, prisons, and mental hospital.*

sekunder (*Secunder deviant*).<sup>83</sup> Penyimpangan primer merupakan proses dengan mana cap (label) diberikan pada seseorang sedangkan penyimpangan sekunder adalah reaksi seseorang terhadap label yang diberikan masyarakat terhadap dirinya.<sup>84</sup>

Hal yang terpenting dalam upaya mengungkapkan kejahatan dengan pendekatan teori labeling ini adalah digunakannya metode mengukur/mengetahui adanya kejahatan dengan menggunakan *self report study* yaitu melakukan interviu terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap/tidak diketahui oleh pihak polisi.<sup>85</sup>

---

83. Frank P William III dan Marilyn D. McSane, Op cit, Hal. 88.

84. Ibid.

85. Ibid

## B. PERKEMBANGAN KEJAHATAN PENYELUNDUPAN

Dalam perkembangannya kejahatan telah mengalami perubahan baik pada tingkat kuantitas maupun kualitas. Meningkatnya kuantitas terlihat misalnya dari data yang dikeluarkan oleh instansi-instansi yang resmi,<sup>86</sup> sedangkan meningkatnya kualitas terlihat dari modus operandi serta tujuan-tujuan dari dilakukannya kejahatan sudah mulai bergeser, sehingga rasa ketakutan terhadap kejahatan (*Fear of Crime*) dalam masyarakat juga meningkat.

Meningkatnya kuantitas dan kualitas kejahatan ini tentunya sangat terkait erat dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga dan pranata-pranatan yang ada dalam masyarakat. Perubahan-perubahan kondisi ekonomi, sistem politik, situasi sosio-historik, nilai-nilai dan norma, hubungan-hubungan kekuasaan dan hukum yang berlangsung sering kali berdampak ganda. Pada satu sisi memperlihatkan hasil-hasil yang bermanfaat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam arti luas-termasuk terpenuhinya kebutuhan akan rasa aman-sedangkan pada sisi lain juga menghasilkan semakin kompleksnya

---

86. Dalam melihat perkembangan kejahatan secara kuantitatif yang berdasarkan data yang dikeluarkan oleh institusi resmi tentunya tidak dengan sikap "*taken for granted*". Hal ini didasarkan pada kenyataan banyaknya kejahatan yang tidak dilaporkan oleh masyarakat, atau yang lebih dikenal dengan istilah: "*Unreported Crime*", "*Hidden Crime*", disamping tentunya bertolak dari pengertian kejahatan sebagai suatu konstruksi sosial, di mana peran kepentingan dalam membuat laporan (statistik kriminal) tidak dapat dihindari.

interaksi faktor-faktor kriminogonik yang melatarbelakangi timbulnya pelbagai bentuk kejahatan.

Dilihat dari tujuan dilakukannya kejahatan yang bermotif ekonomi, serta diorganisirnya kejahatan sebagai salah satu cara dalam melakukan kejahatan merupakan dimensi baru dari kejahatan. Hal ini tentunya mempunyai dampak yang cukup luas baik pada tataran mikro berupa kerugian yang dialami oleh korban kejahatan maupun pada tataran makro berupa terancamnya tujuan dan hasil-hasil pembangunan.

Penyelundupan sebagai salah satu bentuk kejahatan (berdasarkan Undang-Undang) merupakan aktivitas yang dalam perkembangannya mengalami perubahan. Perubahan tersebut misalnya terlihat semula hanya merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kelangkaan barang sebagai bagian dari kebutuhan manusia, namun dewasa ini telah mengalami perubahan menjadi suatu bentuk kejahatan yang didominasi kepentingan ekonomi berupa pencarian keuntungan (*profit oriented*). Demikian juga jika dilihat dari bagaimana penyelundupan tersebut dilakukan, telah mengarah pada diorganisirnya masyarakat dalam melaksanakan aktivitas penyelundupan tersebut (*Organized Crime*). Oleh karena itu penyelundupan dapat digambarkan sebagai kejahatan terhadap ekonomi (*Economic Crime*) dan kejahatan yang diorganisir (*Organized Crime*).



## 1. Penyelundupan Sebagai Kejahatan Ekonomi (*Economic Crime*)

Dalam membicarakan penyelundupan sebagai kejahatan dalam bidang ekonomi, tentunya menemui kesulitan jika titik tolaknya didasarkan pada pendekatan normativ semata, yaitu berdasarkan pada pengertian undang-undang. Hal ini dikarenakan terdapat adanya perbedaan titik pandang dalam melihat serta mendefinisikan kejahatan dalam bidang ekonomi.

Dengan pendekatan **normativ positivisme**,<sup>87</sup> kejahatan ekonomi baru terjadi jika perbuatan tersebut oleh undang-undang dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai kejahatan ekonomi, dan sifatnya menjadi tindak pidana khusus. Sepanjang suatu perbuatan tidak diklasifikasikan atau dikualifikasi sebagai kejahatan ekonomi, maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai kejahatan dalam bidang ekonomi, meskipun jika dilihat substansi perbuatan tersebut sangat berkaitan erat dengan persoalan ekonomi.

Pendekatan normatif positivistik ini pada satu sisi memang ada benarnya, karena diperlukan dalam kegiatan penegakan hukum. Dengan diklasifikasinya suatu perbuatan menjadi tindak pidana ekonomi

---

87. Beberapa Sarjana yang melihat kejahatan ekonomi berdasarkan pada pendekatan normativ ini misalnya: DR. A. Hamzah, S.H. *Hukum Pidana Ekonomi*. Penerbit Erlangga, 1983. hal. 17. dan R. Wiyono, S.H. *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi Indonesia*, Penerbit Alumni, 1983. hal4-14.

(biasanya menjadi tindak pidana khusus), maka beberapa pengecualian dari tindak pidana umumnya dapat diterapkan. Namun demikian menurut **Mardjono Reksodiputro**, bagi kegiatan yang bersifat ilmu pengetahuan pengertian di atas adalah terlalu sempit.<sup>88</sup> Sehingga pengertian dari kejahatan ekonomi dapat dan perlu diperluas dalam arti tidak hanya mendasarkan pengertian undang-undang saja.<sup>89</sup>

Dengan mendasarkan pada ruang lingkup kejahatan dalam arti luas ini, maka akan ditemui beberapa istilah yang berbeda namun kesemuanya secara substansi membicarakan kejahatan dalam bidang ekonomi, misalnya istilah "*Economic Crimes, Crimes as business, Business Crimes, Abuse of Economic Power* atau *Economic Abuse*".<sup>90</sup>

Upaya memberikan pengertian atau definisi terhadap kejahatan ekonomi memang dirasakan hal yang sulit. Namun demikian ada beberapa sarjana yang berusaha memberikan pengertian kejahatan ekonomi,

---

88. Mardjono Reksodiputro. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu. Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. Cet-1. 1994. hal. 48.

89. Menurut Dr. Barda Nawawi Arief, SH. Kejahatan Ekonomi dapat juga dilihat secara luas yaitu semua tindak pidana di luar UU-TPE yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara yang sehat. Dalam Prof. Dr. Muladi, S.H. dan Dr. Barda Nawawi arief, SH. Tahun 1992. Op cit. hal. 152.

90. Ibid. hal. 153.

Conklin misalnya memberikan definisi kejahatan ekonomi sebagai:

*Business crime is an illegal act, punishable by a criminal sanction, which is committed by an individual or a corporation in the course of legitimate occupation or pursuit in the individual or commercial sector for the purpose of obtaining money or property, avoiding the payment of money or the loss of property, or obtaining business or personal advantage.*<sup>91</sup>

Sedangkan Marjono Reksodiputro memberikan pengertian kejahatan ekonomi adalah: Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam perekonomian dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana.<sup>92</sup> Sedangkan Muladi dalam memberikan pengertian kejahatan ekonomi menyimpulkan setidaknya ada tiga unsur dari kejahatan ekonomi, yaitu antara lain:

1. Perbuatan dilakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi yang pada dasarnya bersifat normal dan sah.
2. Perbuatan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara umum, tidak hanya kepentingan individual.
3. Perbuatan itu mencakup pula perbuatan di lingkungan bisnis yang merugikan perusahaan lain atau individu lain.<sup>93</sup>

Dari definisi dan pengertian serta ruang lingkup kejahatan ekonomi seperti tersebut di atas, ada

---

91. Steven Box. *Power, Crime and Mystification*. Tavistock Publication. London and New York. Hal. 20.

92. *Op cit.* hal. 50.

93. Prof. Dr. Muladi, S.H. dan Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. *Op cit.* hal 20.

beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu antara lain pelaku kejahatannya, sifat atau cara kejahatan tersebut dilakukan serta bagaimana dampaknya terhadap sistem perekonomian pada umumnya.

Jika pelaku kejahatan ekonomi (penyelundupan) dilakukan oleh individu secara teoritis tidaklah menemui kesukaran, dalam arti upaya melakukan penegakan hukum (pidana) relatif dengan mudah dapat dilaksanakan. Namun apabila dilakukan oleh korporasi dalam hubungannya dengan pekerjaan yang sah terutama dalam sektor ekonomi, maka persoalan tidaklah mudah, karena sifatnya yang kompleks, berbagai kepentingan terlibat di dalamnya, pelakunya sering dari kalangan sosio-ekonomi atas (*White Collar Crime*), di samping secara teoritis terdapat kesulitan doktrin hukum pidana (di Indonesia) dalam melihat kejahatan yang dilakukan oleh korporasi (*Corporate Crime*), serta adanya inkonsistensi sistem hukum sehubungan dengan pertanggungjawaban korporasi serta adanya perbedaan perhatian antara kriminologi dengan para yuris dalam mengembangkan secara teoritik terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>94</sup>

---

94. I.S. Susanto. *The Spectrum Of Corporate Crime In Indonesia*, Hirodai-Undip of Law and Political Review. Diponegoro University Press Semarang-Indonesia, 1993. hal.38-39.  
 Since 1955 (in Act No. 7/1955) has been introducing the criminal responsibility of corporation, but in fact, practically, our criminal court never recognize or apply it, and to assume that only human nature who handles and organizes corporation could be viewed as an "addresat" of the

Pada sisi lain sulitnya upaya penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi (*Corporate Crime*)<sup>95</sup> dikarenakan begitu besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh korporasi misalnya kekuasaan ekonomi, sosial sampai pada kekuasaan politik. Di samping itu seringnya terjadi kolusi dengan pejabat yang berwenang berupa suap atau uang pelicin.<sup>96</sup> serta segala kegiatan atau aktivitasnya selalu ditutupi dengan kegiatan-kegiatan sosial sehingga orang awam akan sulit untuk melihat bentuk nyata kejahatan korporasi.

## 2. Penyelundupan Sebagai Kejahatan Yang Terorganisir (*Organized Crime*)

Keberadaan kejahatan terorganisir dalam masyarakat dewasa ini sudah menjadi kenyataan (*reality*), terlebih lagi dalam era globalisasi, kejahatan terorganisasi ini turut juga berkembang.

...Continued...

stipulation. There are some reasons for that:

- a. The general principles of the Criminal Code still assume that an offence can only be committed by a natural person and cannot legally be seen as an object of criminal responsibility.
- b. the inconsistency of legal system concerning the matter of criminal responsibility of the corporation.
- c. The lack of attention among criminologists and legal scholars (criminal law scholars) in developing theoretical approaches to the corporation criminal responsibility.

95. Menurut Marshall B. Clinard and Peter C. Yeager: *A corporate crime is any act committed by corporations that is punished by state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law.* Dalam Marshall B. Clinard and Peter C. Yeager. *Corporate Crime*. The Free Press, New York. 1980. hal. 16.

96. I.S. Susanto, 1995. *Op cit.* hal 21.

Demikian juga di Indonesia, keberadaan kejahatan terorganisir ini sudah merupakan kenyataan, dan menjadi perbincangan yang cukup hangat.<sup>97</sup>

Namun demikian menurut **Denny F. Pace** masyarakat masih sering bersikap sabar terhadap jenis kejahatan ini. Hal ini dikarenakan mereka (masyarakat/warga negara) tidak menyadari akan bentuk dan besarnya jenis kejahatan ini, dan walaupun mereka menyadari akan keberadaannya, masyarakat tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh (*concerned*) dikarenakan mereka tidak mengetahui pengaruhnya terhadap mereka.<sup>98</sup>

Hampir sama dengan kejahatan korporasi, upaya memberikan definisi kejahatan terorganisir (*Organized crime*) dirasakan hal yang cukup sulit, karena diantara banyak para sarjana tidak ada kesepakatan mengenai definisi ataupun pengertian dari kejahatan terorganisir. Namun demikian ada beberapa sarjana yang mencoba untuk memberikan defisi ataupun pengertian

---

97. Mantan Kapolda Metro Jaya, Mayjen M. Hindarto misalnya mengakui adanya perkembangan kejahatan yang mengarah pada ciri-ciri terbentuknya "mafia". oleh karena itu menurutnya apat bertekat untuk membasmi benih-benih merebaknya kejahatan yang terorganisir ini di Indonesia (Forum Keadilan, No. 15 Tahun III). Demikian juga terbunuhnya raja judi Nyo Beng Seng, dapat menjadi indikasi bahwa negara Indonesia tidak akan luput dari kejahatan terorganisir ini, minimal Indonesia telah menjadi salah satu daerah operasional dari kejahatan ini (Forum Keadilan, No. 9 Tahun IV, 14 Agustus 1995)

98. Denny F. Pace. *Concepts of Vice, Narcotics, and Organized Crime*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, Third Edition. 1991. hal. 12.

*"Citizens tolerate so much organized crime because they are not actually aware of its form or magnitude, and when they are aware of its existence, they are not concerned because they do not know how it effects them".*

terhadap kejahatan terorganisir tersebut.

Larry J. Siegel, misalnya mencoba memberikan definisi kejahatan terorganisir (organized crime) sebagai aktivitas konspirasi, yang meliputi perencanaan yang besar dalam perencanaan dan melaksanakan perilaku illegal atau mengejar tujuan yang sah dengan menggunakan cara-cara yang illegal.<sup>99</sup> Sedangkan menurut D. Stanley Eitzen, *Organized Crime is a business operation that seeks profit by supplying illegal goods and services*.<sup>100</sup>

Sedangkan Harry E. Allen et.al. tidak memberikan pengertian atau definisi mengenai kejahatan terorganisir, namun mencoba memberikan karakteristik suatu kejahatan yang terorganisir. Dikatakan oleh Harry E. Allen. et.al. bahwa:

*Organized crime consists of networks of person engaged in the systematic dispensation of illegal goods and services, usually within specific geographic areas. Generally, the enterprises operate with a bureaucratic type of organizational structure affording a division of labor, specialization with delineated relationships, a hierarchical chain of command, and a mutually agreed-upon set of obligations and privileges based on work role, secrecy, loyalty, and a code of*

---

99. Larry J. Siegel, *Criminology*, West Publishing Company, St. Paul, 1989, hal. 337.

"Organized Crime is conspiratorial activity, involving the coordination of numerous persons in the planning and execution of illegal acts or in the pursuit of legitimate objective by unlawful means".

100. D. Stanley Eitzen, *Crime and Justice, Social Problems*, Allyn and Bacon, Inc. Third Edition, 1986, hal. 430.

*conduct*.<sup>101</sup>

Hampir sama dengan pendapat tersebut di atas, menurut Mulyana W. Kusumah kejahatan terorganisir pada umumnya mempunyai ciri antara lain:

1. Terdapat struktur hirarki yang menunjukkan semacam rantai komando dan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melaksanakan tujuan-tujuan organisasi merupakan ciri khas yang melekat. Disamping itu, kejahatan terorganisasi melakukan perencanaan ekstensif yang mencakup rencana operasi, manajemen personalia, hubungan dengan tokoh-tokoh politik dan polisi serta pembagian keuntungan.
2. Esselon yang lebih tinggi mempunyai kekebalan relatif terhadap hukum berkat penyuapan-penyuapan terhadap pejabat-pejabat penegak hukum, tekanan politis untuk melindungi kegiatan-kegiatan kriminal atau peran serta langsung dari oknum-oknum penegak hukum dalam bisnis kejahatan terorganisasi ini.<sup>102</sup>

Dari apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dirasakan adanya kesulitan untuk mengetahui secara pasti mengenai kejahatan terorganisir ini dalam aktivitasnya, karena sifatnya yang membentuk jaringan yang sangat kompleks, baik yang menyangkut jaringan kerja, hubungan antara sesama kelompok serta sifat kerahasiaan (*secrecy*), loyalitas serta dimilikinya aturan atau etika perilaku (*code of conduct*) yang diciptakannya sebagai bagian dari sistem yang harus ada dalam kejahatan terorganisir ini. Sehingga secara

---

101. Harry E. Allen, et. al. *Crime and Punishment, An Introduction to Criminology*. The Free Press. New York, 1981. hal. 178.

102. Mulyana W. Kusumah. *Kejahatan dan Penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi*. Penerbit Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jakarta. 1988. Hal. 101.



langsung jaringan aktivitas kejahatan dari kejahatan terorganisir sulit untuk diperlihatkan dan hampir tidak mungkin untuk dibuktikan.<sup>103</sup>

Setidak-tidaknya ada empat keadaan atau faktor sehingga kejahatan terorganisir ini tumbuh subur di dalam masyarakat yaitu antara lain: **Pertama** karena adanya permintaan akan barang dan jasa, **kedua** terjadinya korupsi diantara para aparat penegak hukum, **ketiga** adanya perilaku yang menyimpang dan intimidasi serta **keempat** adanya kejahatan yang beroperasi baik dalam konteks lokal, regional, nasional maupun internasional.<sup>104</sup>

Penyelundupan sebagai salah bentuk kejahatan yang terorganisir di samping bentuk kejahatan lainnya seperti sindikat narkotik internasional, sindikat besar perdagangan narkotik, keberadaannya di Indonesia telah diakui oleh kalangan penegak hukum. Munculnya kejahatan terorganisir ini dikarenakan sejumlah kondisi sosial pendukung antara lain:

Tuntutan atas pelayanan, produk dan kegiatan tertentu oleh sebagian warga masyarakat yang

---

103. Denny P. Pace. Op cit.

*"The direct link of criminal activity to organized crime is difficult to show and almost impossible to prove".*

104. D. Stanley Eitzen, Op cit. hal. 451

*Organized crime thrives because of (a) the demand for illegal goods and services; (b) corruption among the police and government officials; (c) violence and intimidation; and (d) its well-organized operation at all levels-locally, regionally, nationally, and internationally.*

menimbulkan adanya konsumen potensial. Didalam kejahatan terorganisir terdapat kategori-kategori posisi yang ditempati antara lain: importir, distributor besar yang juga melakukan usaha-usaha legal, distributor pengedar, penjual setempat. Yang terakhir ini sesungguhnya bukan anggota organisasi akan tetapi sebagai pemakai dan menjadi alat organisasi dalam membantu pengedaran.<sup>105</sup>

Dengan demikian berdasarkan pada bentuk kejahatan yang terorganisir, maka pelaku penyelundupan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat cenderung hanya merupakan bagian dari mata rantai kejahatan terorganisir, sehingga sering keberadaannya dalam rangkaian kejahatan terorganisir tersebut tidak disadari oleh masyarakat sebagai pelaku kejahatan penyelundupan. Sehingga penyelundupan sebagai salah satu bentuk kejahatan dalam bidang ekonomi, serta kejahatan yang terorganisir oleh masyarakat Internasional diakui sebagai salah satu bentuk kejahatan yang sukar dijangkau oleh hukum (*beyond the reach of the law*).<sup>106</sup>

---

105. Mulyana W. Kusumah. Op cit. 1988. Hal. 101.

106. Sixth United Nations Congress On The Prevention of Crime and The Treatment Of Offender, Caracas, Venezuela, 15 Agustus-5-September 1980.

159. The committee distinguished between two main types offences beyond the reach of the law. These were (a) offences which, strictly speaking, were not crime but were, nevertheless, harmful to societies, and (b) those which were legally defined as crimes but with respect to which the law enforcement agencies were relatively powerless because of the high economic or political status of their perpetrators, or because the circumstances under which they had been committed were such as to decrease the likelihood of their being reported and prosecuted. There could also be various interface between them. Examples of such offences included bribery and corruption, organized crime, economic abuses, such as tax avasion, credit and customs fraud, embezzlement and misappropriation of public funds, violotions of currency regulation, speculation and swindling inland transactions, smuggling (pen)...."

### C. INTERAKSI ANTARA PELAKU PENYULUNDUPAN, KONSUMEN, PENEGAKAN HUKUM DAN UNDANG-UNDANG

Dalam melihat bagaimana suatu tindak pidana atau kejahatan terjadi dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan kriminologi kritis, maka yang ditekankan adalah bagaimana memahami interaksi antara pelaku kejahatan, korban, undang-undang serta upaya penegakan hukumnya (aparatnya). Hal ini tentunya sangat berbeda jika dalam melihat suatu kejahatan dengan pendekatan kriminologi klasik ataupun positif, yang sangat mengutamakan pada faktor-faktor yang menimbulkan (causa) kejahatan. Namun hal ini tidaklah berarti bahwa causa kejahatan dalam pendekatan kriminologi kritis menjadi tidak penting, namun hal ini bukan menjadi sorotan utamanya.

Sebagai upaya mendiskripsikan kejahatan penyelundupan, maka akan dilihat bagaimana interaksi antara pelaku kejahatan, korban yang dalam hal ini konsumen, undang-undang serta penegak hukumnya sendiri, tentunya keseluruhan aspek tersebut saling berhubungan erat satu dengan yang lainnya.

#### 1. Tinjauan Terhadap Pelaku Kejahatan

Upaya memahami pelaku kejahatan penyelundupan dirasakan sangat sukar, hal ini tentunya jika dihubungkan dengan karakteristik kejahatan penyelun-

dupan baik sebagai kejahatan dalam bidang ekonomi, kejahatan korporasi (*Corporate Crime*) maupun kejahatan

Penyelundupan sebagai kejahatan dalam bidang ekonomi jelas memperlihatkan kepentingan dan latar belakang ekonomi sangat dominan sekali sehingga seseorang melakukan kejahatan, bahkan dalam perspektif ekonomi (pandangan para ekonom) tindakannya merupakan suatu pilihan yang rasional. Menurut L. Von Mises<sup>107</sup> hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku manusia merupakan pilihan, manusia bebas bertindak dan kebebasan bertindak ini dimengerti sebagai perilaku yang secara langsung ditujukan pada pilihan yang merupakan tujuan individu.

Dari penelitian memang terlihat adanya korelasi antara kondisi ekonomi disatu pihak dengan kejahatan dipihak lain. W.A. Bonger misalnya pernah membuktikan adanya hubungan tersebut, menurutnya di samping "kesulitan obyektif" yang dialami masyarakat juga "kesulitan subyektif" seperti penganguran merupakan hal yang menentukan.

Secara teoritik (peranan faktor sosio-

---

107. Gwynn Nettler, Op cit. hal. 174.

"Economist assume that human behavior-particularly that called "action" or "conduct"- is chosen. Human action is voluntary action, and voluntary action is understood as behavior directed toward goals selected by individual".

struktural) M. Harvey Brenner mengidentifikasi beberapa pandangan yang berbeda mengenai latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi terhadap kejahatan, yakni:

- a. Penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja akan menimbulkan kegiatan-kegiatan industri illegal.
- b. Terdapatnya bentuk-bentuk "inovasi" sebagai akibat kesenjangan antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosio-struktural untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonmi, banyak warga masyarakat yang kurang mempunyai kesempatan mencapai tujuan-tujuan sosial dan menjadi "innovator" potensial yang cenderung mengambil bentuk pelanggaran hukum.
- c. Perkembangan karir kejahatan dapat terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah.
- d. Pada beberapa tipe keperibadian tertentu, krisis ekonomi akan menimbulkan frustasi oleh karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk-bentuk perilaku agresif.
- e. Pada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami tekanan ekonmi terdapat kemungkinan besar bagi berkembangnya sub kebudayaan delinkuen.
- f. Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah warga masyarakat yang menganggur dan kehilangan penghasilannya cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menjadi penganggur pula dan dengan begitu lebih memungkinkan dirancang dan dilakukannya suatu kejahatan.<sup>108</sup>

Namun apabila dilihat dengan pendekatan kriminologi kritis, maka terlihat bahwa latar belakang seseorang melakukan kejahatan adalah merupakan reaksi

---

108. Mulyana W. Kusumah. Kriminologi dan Masalah Kejahatan (suatu Pengantar Ringkas). Penerbit PT Armico, Bandung, 1984. hal. 34-35.

atas kondisi kehidupan kelas seseorang dan senantiasa berbeda-beda bergantung pada struktur-struktur politik dan ekonomi masyarakat.

**Willian J. Chambliss** menjelaskan bahwa perspektif teoritik yang menyertai pertanyaan mengapa sejumlah orang melakukan kejahatan membawa pada pandangan tentang kebudayaan, norma-norma, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan sebagai dasar pembentukan perilaku dan dengan begitu mengingkari struktur politik dan ekonomi.<sup>109</sup> Secara ringkas tentunya posisi ini menegaskan bahwa di dalam setiap sistem ekonomi dan politik terdapat kontradiksi-kontradiksi mendasar dan orang bertindak secara sadar walaupun dihambat oleh warisan tradisi, kepercayaan, pranata-pranata yang ada untuk mengatasi kontradiksi-kontradiksi ini.

Demikian juga **David M. Gordon** menyatakan bahwa kejahatan adalah respons-respon rasional terhadap bekerjanya sistem ekonomi dominan yang ditandai oleh persaingan serta pelbagai bentuk ketidakmerataan. Pelaku kejahatan adalah orang-orang yang bertindak secara rasional untuk bereaksi terhadap kondisi-kondisi kehidupan golongan sosialnya di dalam masyarakat.<sup>110</sup>

---

109. Ibid, hal. 36.

110. Ibid, hal. 37.

Jika diperhatikan lebih dalam memang fakta memperlihatkan bahwa kejahatan-kejahatan tertentu kiranya dapat dipandang sebagai pernyataan kekurangan-kekurangan pemenuhan kebutuhan hidup yang disebabkan dan dipertahankan oleh struktur-struktur sosial ekonomi yang bersangkutan. Misalnya pencurian dilakukan berkenaan kebutuhan ekonomi yang mendesak serta ketidakadilan pembagian pendapatan masyarakat. Kejahatan terhadap harta benda dapat disebabkan oleh keserakahan yang dirangsang oleh alat-alat produksi dan sarana reklame kapitalis, dan kejahatan dengan kekerasan lebih merupakan suatu penyaluran rasa harga diri yang mengalami frustrasi dalam masyarakat yang mengandung kontradiksi-kontradiksi.

## 2. Tinjauan Terhadap Prilaku Konsumen

Penyelundupan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang bermotivkan kepada pertimbangan ekonomi, maka tidaklah dapat dipisahkan bagaimana prilaku konsumen sebagai subyek hukum<sup>111</sup> di dalam memberikan makna terhadap pelaku sehingga dilakukannya kejahatan penyelundupan. Apalagi jika kejahatan tersebut sudah berbentuk kejahatan korporasi, eksistensi konsumen di dalam keseluruhan aktivitasnya merupakan suatu keniscayaan, artinya bahwa prilaku konsumen terutama terhadap keinginan pemenuhan akan kebutuhan hidupnya merupakan kondisi yang cukup kondusif sehingga korporasi melakukan penyimpangan dalam aktivitasnya.

---

111. Konsumen sebagai subyek hukum belum dimuat dalam hukum positif (Indonesia). Hal ini dikarenakan Undang-Undang mengenai Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) belum diwujudkan. Namun demikian dalam Tap MPR tentang GBHN, konsumen telah mendapatkan perhatian, misalnya:

- TAP MPR No. IV/MPR/1978, Bab IV (Pola Umum Pelita III) D. (Ekonomi) butir 7 (Perdagangan), termuat: "Dengan makin sempurnanya sistem perdagangan, maka akan makin meningkat pula pendapatan para produsen, makin lancar arus barang dan jasa yang menguntungkan konsumen....".
- TAP MPR No. II/MPR/1988, Bab IV (Pola Umum Pelita Kelima), D (Ekonomi) butir 7 (Perdagangan), huruf b: "Pembangunan perdagangan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan produsen dan sekaligus menjamin kepentingan konsumen....".
- Sedangkan TAP MPR No. II/MPR/1993, Bab IV (Pembangunan Lima Tahun Keenam), F (Kebijakan Pembangunan Lima Tahun Keenam) Ekonomi butir 4 (Perdagangan) huruf a: "Pembangunan perdagangan ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan daya saing, meningkatkan pendapatan produsen terutama produsen hasil pertanian rakyat dan perdagangan, melindungi kepentingan konsumen...".



Pada sisi lain konsumen<sup>112</sup> -dengan pendekatan viktimologi dapat dikatakan sebagai korban dari tindak pidana kejahatan- tidak menyadari bahwa telah menjadi korban dari kejahatan, hal ini dikarenakan sifatnya yang abstrak sebagai korban (*abstract victim*) sehingga sukar ditentukan secara jelas, dan pada akhirnya jarang konsumen melaporkan kepada pihak yang berwenang sehubungan dengan kerugian yang diderita.<sup>113</sup>

Sifatnya yang abstrak sebagai korban ini, dikarenakan menurut Richard Quinney korban adalah merupakan suatu konsepsi tentang realitas dan juga merupakan suatu peristiwa atau kejadian-kejadian yang menjadi tujuan (*a victim is a conception of reality as well as an object of event*).<sup>114</sup> Hal ini tentunya sangat berbeda jika pengertian korban bertolak dari

---

112. Istilah konsumen merupakan alih bahasa dari *Consumer*, dimana secara harfiah berdasarkan John Sinclair (ed), *Collins Cobuild English Language Dictionary*, William Collins Sons & Co, Glasgow 1988, hal. 303. berarti "Seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa atau seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu". Sedangkan berdasarkan Hornby A.S. (ed); *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, London, 1989, hal. 185 adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Sedangkan menurut Az. Nasution, S.H. *Konsumen dan Hukum*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, cet-I, hal. 69. Konsumen adalah: "Setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang/jasa untuk kegunaan tertentu".

113. Marjono Reksodiputro, *Hak Azasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, cet-I, Tahun 1994, hal. 104-105.

114. Richard Quinney, *Who is The Victim?*. Dalam Israel Drapkin and Emilio Viono, *Victimology*, D.C. Heath and Company, 1975, Second printing, hal. 103.

pengertian pandangan yang legalistik, dimana undang-undang sendiri telah menentukan siapa yang menjadi korban dari suatu kejahatan. Namun pengertian korban akan menjadi sangat kompleks jika hal tersebut dipisahkan dari hukum pidana, yang merupakan konsepsi masyarakat tentang keberadaannya dalam seluruh aktivitas yang melibatkan individu atau masyarakat yang mempertanyakan: **Siapakah yang menjadi korban.**<sup>115</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka upaya melihat konsumen sebagai korban kejahatan dan pengaruhnya terhadap kejahatan (terutama dalam kejahatan penyelundupan) dalam perspektif kriminologi sangat penting dikarenakan antara lain:

1. sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender-centered*).
2. terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran atas statistik kriminal (terutama statistik yang berasal dari kepolisian); ini dilakukan melalui survai tentang korban kejahatan (*victim surveys*);
3. makin disadari bahwa di samping korban kejahatan konvensional (kejahatan-jalanan, *street crime*) tidak kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan non-konvensional (a.l. kejahatan korporasi dan kejahatan kerah putih) maupun korban-korban dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of economic*

---

115. Ibid, hal. 104.

*The conceptions of the victim become more complicated when removed from criminal law. But it is in this realm of commonsense conceptions that gives meaning to the question: "Who is the victim?"*.

*power and/or public power*).<sup>116</sup>

Menurut I.S. Susanto, keberadaan konsumen sebagai korban, terutama terhadap kejahatan korporasi dikarenakan:

Konsumen sebagai kelompok besar-karena sifatnya yang tidak terorganisir dan karena adanya berbagai keterbatasan-mengakibatkan kedudukannya sangat lemah bila dihadapkan dengan korporasi, sehingga merupakan korban yang sangat empuk bagi kejahatan korporasi, terlebih lagi bila tidak ada atau kurangnya peraturan perundangan yang melindungi kepentingan konsumen, seperti peraturan tentang produk yang tidak berbahaya, kualitas produk, struktur harga (khususnya terhadap produk-produk yang berbau monopoli).<sup>117</sup>

Demikian juga Steven Box, mengemukakan bahwa konsumen adalah salah satu variabel yang cukup menentukan terhadap kejahatan, terutama kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, disamping persaingan (*Compettitors*), pemerintah (*Governments*), karyawan (*Employers*), dan publik (*Public*).<sup>118</sup>

Jika dilihat hubungan fungsional antara konsumen dengan kejahatan penyelundupan, kiranya dapat didekati dengan dua cara pandang yaitu pertama cara pandang yang mendasarkan pada pemenuhan akan kebutuhan (*economics approaches*) dan kedua didasarkan pada pendekatan hak (*right approaches*) yang dipunyai oleh

---

116. Mardjono Raksodiputro, Op cit, hal 102

117. DR. I.S. Susanto, S.H. Kejahatan Korporasi, Op cit, hal.40

118. Steven Box. Op cit, hal. 36.

konsumen untuk memilih (*the right to choose*), disamping haknya untuk mendapatkan produk yang aman (*the right to safety*), hak untuk memperoleh informasi (*the right to be informed*) dan hak untuk mendengarkan (*the right to be heard*)<sup>119</sup>, tentunya antara kedua pendekatan tersebut saling berkorelasi antara satu dengan yang lainnya.

Upaya memahami perilaku konsumen dalam korelasinya dengan kejahatan penyelundupan yang didasarkan pendekatan ekonomi dilandasi pada asumsi bahwa setiap individu/orang sangat memerlukan barang dan jasa (*goods and services*) sebagai perwujudan dari pemenuhan akan kebutuhan dirinya.

Konsumen dalam memenuhi kebutuhan pokoknya (*Basic Need*) dari sekian banyak barang tentunya mendasarkan pada hipotesis bahwa barang yang dipilihnya adalah barang yang menurutnya bermanfaat.<sup>120</sup> Demikian juga menurut **Jeremy Bentham** mengatakan bahwa barang yang lebih diminati

---

119. Stanley Morganstern, *Legal Protection For The Consumer*, Oceana Publication, New York, 1978, Second Edition, hal. 83.

"The consumer now possesses the right to safety, the right to be informed, the right to choose, and the right to be heard. These rights which President Johnson forecast in 1964 have come to be. They are granted to the consumer by means of legislation state consumer protection agencies, and the courts".

120. William J. Baumol dan Alan S. Blinder, *Economics, Principles And Policy Microeconomics*, Harcourt Brace Jovanovich, Fourt Edition, hal.75.

"Consumer choice based on the hypothesis that each consumer spends his or her income int the way that yields the greatest amount of satifaction, or utility"

menyuguhkan kepuasan yang lebih besar dari barang yang kurang diminati.<sup>121</sup>

Namun demikian dalam perkembangannya ternyata keputusan konsumen dalam upaya memenuhi kebutuhannya mengalami pergeseran, searah dengan meningkatnya kondisi konsumen, misalnya peningkatan pendapatan, status sosial. Sehingga menurut James F. Engel konsumen dalam membelanjakan uangnya (*spends his or her income*) tidak hanya didasari oleh pendekatan kemanfaatan dari suatu barang tetapi sudah mengarah pada motif-motif tertentu baik motif pribadi maupun motif sosial.<sup>122</sup>

Motif pribadi dari berbelanja dapat dilihat bahwa berbelanja tidak hanya merupakan upaya memenuhi kebutuhan pokok, tetapi sudah merupakan bagian dari peran tertentu di dalam masyarakat, hiburan, pemuasan diri, belajar dari trend baru, aktivitas fisik, maupun manifestasi dari stimulasi indera. Demikian juga motif sosial, bahwa berbelanja merupakan pengalaman sosial di luar rumah, komunikasi dengan orang lain yang memiliki minat sama, daya tarik kelompok sebaya, status dan otoritas serta adanya kesenangan dalam

---

121. Walter Nicholson, *Microeconomic Theory; Basic Principles and Extensions*, disadur oleh Drs. Daliarnov, M.Sc. Teori Ekonomi Mikro I. Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1989, cet-I, hal 33.

122. James F. Engel, dkk. *Consumer Behavior*, Alih bahasa oleh: Drs. Budijanto, *Prilaku Konsumen Jilid 2*, Binarupa Aksara, Jakarta, cet- I, 1995, hal. 252.

tawar menawar.<sup>123</sup> Namun demikian sebenarnya pergeseran motif dalam memenuhi kebutuhan konsumen ini sesuai dengan asumsi yang terdapat dalam fungsi kemanfaatan (fungsi utility) yaitu mempunyai lebih banyak barang lebih baik dari pada mempunyai sedikit barang.<sup>124</sup>

Pada sisi lain secara alami, barang sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia (konsumen) sifatnya terbatas, karena keterbatasannya inilah maka kelangkaan (*scarce*) merupakan salah satu masalah pokok setiap masyarakat.<sup>125</sup> Namun hal ini bukan berarti masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, upaya pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan cara misalnya melakukan impor dari daerah atau negara lain terhadap barang yang diperlukan, dan juga sebaliknya.

Paralel dengan upaya pemenuhan kebutuhan, langkanya barang sebagai alat pemenuhan kebutuhan, serta bergesernya sifat pemenuhan kebutuhan dari konsumen, adalah hak memilih (*the right to choose*) yang dimiliki oleh konsumen. Dalam hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap nilai kualitas dari barang

---

123. Ibid, hal. 256.

124. Walter Nicholson, Op cit, hal. 36.

125. Dominick Salvatore, Teori Mikroekonomi, Alih bahasa oleh: Rudy Sitompul. dkk, Penerbit Erlangga, Tahun 1990, cet-III, hal. 1.

yang diminta (*demand*) oleh konsumen.

Hak memilih inilah yang pada dasarnya memberikan jenis dan kualitas barang yang semakin bervariasi. Tuntutan akan kualitas yang baik di samping jumlah barang (kuantitas) yang besar adalah warna lain yang dewasa ini merupakan kebutuhan yang utama dari konsumen. Kebutuhan akan kualitas yang baik juga merupakan dasar dalam memberikan keputusan bagi seorang konsumen untuk membeli atau tidak suatu barang.

Sehingga dengan demikian hak memilih (*the right to choose*) yang dipunyai oleh konsumen sebagai bagian hak yang dimiliki oleh konsumen, dalam realitasnya sangat terapresiasi dengan keadaan, jenis serta ketersediaan barang dipasar.

### 3. Tinjauan Upaya Penegakan Hukum Sebagai Organisasi, Birokrasi dan Sistem Peradilan Pidana.

Penegakan hukum (pidana)<sup>126</sup> adalah rangkaian dari upaya melaksanakan hukum (Undang-Undang) dari keseluruhan sistem hukum yang paling rumit dan krusial sifatnya, hal ini dikarenakan pembicaraan masalah penegakan hukum tidak lain pada dasarnya pembicaraan mengenai masalah manusia dengan segala aspek dan keunikan yang ada pada dirinya. Sehingga tegak tidaknya suatu peraturan sangat ditentukan oleh para pelaku utama yang pada sisi lain sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel baik sosial maupun personal dari para penegak hukum itu sendiri. Sehingga sering dijumpai antara penegakan hukum yang seharusnya dilakukan dalam realitasnya memperlihatkan adanya penyimpangan dari ketentuan ataupun penyimpangan tujuan (*Displacement of goals*) yang telah ditentukan atau diatur sebelumnya.

---

126. Dilihat dari politik kriminil yaitu sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, maka penegakan hukum pidana merupakan bagian kebijakan, penanggulangan kejahatan, lihat Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana. 1977, Op cit, hal. 38. Disamping itu Sudarto juga memberikan pengertian politik kriminil dalam arti sempit, arti lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminil itu diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. dalam arti yang lebih luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedang dalam arti yang paling luas kebijakan kriminil merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Periksa juga Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni 1986, 113-114.



Hal ini tentunya secara teoritis tidak berarti macetnya atau terhambatnya upaya penegakan hukum tersebut hanya dikarenakan sikap personal yang tidak baik, namun kondisi yang kompleks meliputi para penegak hukum itu sendiri, misalnya disebabkan oleh adanya ketidakjelasan peraturan perundang-undangnya sendiri atau di dalamnya menyangkut faktor budaya dan masyarakat setempat, fasilitas dan sarana yang tersedia sehingga meningkatkan mobilitas yang cukup tinggi.<sup>127</sup>

Demikian juga terhadap kondisi yang sifatnya personal, latar belakang sosial dan keterlibatannya dalam aktivitas sosial dan agama serta sampai kepada persoalan moralitas para aparat penegak hukum itu sendiri memperlihatkan pengaruh yang cukup besar dan menentukan para penegak hukum dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Kesemua faktor tersebut sifatnya saling interdependensi satu sama lainnya dan bagaimana kausalitas dan relasitas antara kondisi tersebut sifatnya sulit ditentukan.

Jika upaya penegakan hukum dipandang sebagai suatu kegiatan yang terorganisir dalam suatu wadah maka persoalannya yang timbul antara lain menyangkut

---

127. Prof.Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, cet-I, Tahun 1983, hal. 10.

persoalan sistem birokrasi dan koordinasi antara para pihak yang berkompeten dan mempunyai kapasitas yang sama dalam upaya penegakan hukum, sampai pada akhirnya idiologi para penegak hukum itu sendiri juga sangat besar pengaruhnya dalam aktivitas penegakan hukum.

Menurut Goldstein sebagaimana dikutip oleh Muladi membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga yakni:

Pertama Total Enforcement yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crimes*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penentuan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *area of no enforcement*.

Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni *full enforcement*, dalam ruang lingkup mana para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.

Tetapi oleh Joseph Goldstein harapan ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, persolan, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya ini mengakibatkan keharusan dilakukannya *discreations*. Dan yang tersisa adalah *actual enforcement*.<sup>128</sup>

Khusus terhadap *full enforcement*, R. Quinney berpendapat bahwa hal tersebut jauh dari kemungkinan

---

128. Prof. Dr. H. Muladi, S.H. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Op cit, hal. 16-17.

untuk diterapkan hal mana dikarenakan lingkungan dan keterbatasan yang besar, misalnya:

*Pertama* menyangkut pembatasan prosedur yang telah ditentukan.

*Kedua* menyangkut kebebasan interpretasi, sebagai hasil dari adanya ambiguitas kata-kata dalam peraturan perundang-undangan, sehingga membolehkan beberapa diskresi terhadap apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

*Ketiga* secara teknis menyangkut masalah pencampuradukan penegakan hukum, misalnya waktu yang terbatas, personil, dan peralatan untuk mendeteksi dan investigasi kejahatan.

*Keempat* menyangkut norma organisasional yang memberikan pedoman untuk menegakan atau tidak menegakan hukum.

*Kelima* menyangkut masalah orientasi idiologi atau nilai yang memberikan dasar untuk melakukan penegakan hukum secara selektif.

*Keenam* tekanan sosial yang mencegah dilakukannya Full enforcement terhadap hukum pidana. Tekanan ini adalah berkenaan dengan kesenjangan antara hukum pidana dan norma-norma yang berlaku, kegagalan atau lalainya korban dan masyarakat untuk melaporkan pelaku kejahatan, dan bahaya sosial yang mungkin sebagai akibat ikutan dalam penegakan hukum pidana.<sup>129</sup>

Lebih lanjut oleh R. Quinney mengatakan bahwa apapun alasannya penegakan hukum adalah masalah pembuatan

---

129. Richard Quinney, *Criminology, Analysis and Critique of Crime in America*, Little, Brown and Company Boston/Toronto, 1975. hal. 173. Menurutny:

"Full enforcement of criminal law, however, is far from possible because of numerous limitations and circumstances. First, is a few procedural restrictions limit the enforcement of some laws. Second, interpretational latitude, resulting primarily from ambiguous wording in many constitutes a criminal offense. Third, technical matters confound law enforcement, such as limited police time, personnel, and equipment for detecting and investigating crime. Fourth, organizational norms of local police departemen provide guides for both the enforcement and nonenforcement of criminal law. Fifth, ideological arientations or values of police provide a basis for selective law enforcement. Sixth, societal pressures prevent full enforcement of some criminal laws. These pressures are a lack of correspondence between criminal statutes and current norms, failure of victim and the public to report offenses, and the harmful social consequences that might follow enforcement of some criminal laws".

keputusan diskresi.<sup>130</sup>

Jika dilihat dari pernyataan tersebut di atas maka kiranya dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum pada dasarnya suatu upaya yang memang dalam pelaksanaannya banyak menemui kendala yang cukup berarti.

Dalam melihat bagaimana penegakan hukum (*Law Enforcement*) dalam perspektif kriminologis, dalam arti sampai sejauhmana upaya penegakan hukum itu sendiri dapat menimbulkan kejahatan disatu sisi, hal ini tentunya sangat tergantung pada persepsi bagaimana hubungan antara peran hukum itu sendiri dengan kejahatan (*crime*) yang ada dalam masyarakat, serta bagaimana para kriminolog sendiri memandang kejahatan dalam masyarakatnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Bruce L. Berg mengatakan bahwa dalam kriminologi ada tiga perspektif yang penting dalam hubungannya dengan penegakan hukum, yaitu perspektif konsensus, perspektif konflik dan perspektif interaktionis.<sup>131</sup>

---

130. Ibid.

131. Bruce L. Berg, *Law Enforcement, An Introduction to Police in Society*, Indiana University of Pennsylvania, 1992, hal. 9-11.

Menurutnya:

*"Criminologist and Sociologist may use any of a number of theoretical approaches to study values, norms, law, and their enforcement or violation. The three perspectives that are most widely used in criminology and sociology provide an introduction for how various researchers discussed later in this text (penegakan hukum-pen) have examined various aspects of policing.*

# 1. Penegakan Hukum Dalam Perspektif Konsensus

Pandangan konsensus ini sering dipercaya sebagai akar dari aliran fungsionalis dalam sosiologi. Aliran fungsionalis menekankan bagaimana tiap bagian dalam masyarakat dan institusi sosialnya memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Dalam perspektif konsensus ini berbagai kepentingan masyarakat bertujuan untuk memenuhi (*Fulfill*) kebutuhan (*Requirements*) yang berbeda dalam masyarakat.

Asumsi utama dalam perspektif ini adalah bahwa ada persetujuan yang mendasar diantara setiap orang mengenai tujuan kehidupan sosial dan peraturan atau norma yang menentukan dalam mencapai tujuan tersebut.<sup>132</sup>

Aplikasinya terhadap kejahatan adalah bahwa setiap anggota masyarakat menyetujui adanya standar yang ideal dari perilaku yang dalam hal ini diwujudkan dalam hukum (Undang-Undang), atau dengan kata lain hukum dan undang-undang dipergunakan

...Continued...

*These are the consensus, conflict, and interactionist perspectives".*

132. Ian Taylor, dkk. *The New Criminology: For a Social theory of Deviance*, Routledge & Kegan Paul, 1973, hal 237.

"...by a consensual view of society, a view which, above all else, depends upon the assumption that there is some fundamental agreement upon men as to goals of social life, and the rules, or norms, which should govern the pursuit of those goals..".

sebagai pedoman atau petunjuk perilaku setiap anggota masyarakat.

Demikian juga kejahatan didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap bentuk perilaku yang secara konsensus telah diterima (*Crime are defined as violations of these consensually accepted patterns of conduct*).

Dengan demikian dapat kiranya disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum (Undang-Undang) oleh para aparat penegak hukum seyogyanya selalu didasarkan pada kesepakatan yang ada dalam masyarakat yang tentunya berlaku sebagai hukum. Sehingga persepsi dan konsepsi masyarakat tentang kejahatan mendapatkan tempat yang penting dalam perspektif ini, bukannya kejahatan yang telah didefinisikan oleh undang-undang (penguasa).

## **2. Penegakan Hukum Dalam Perspektif (Pendekatan) Konflik**

Seperti telah diketahui bahwa perspektif konflik dalam kriminologi bertolak dari asumsi bahwa setiap masyarakat terdapat adanya perbedaan, perbedaan mana selalu mengarah pada adanya konflik kepentingan (*Conflict of interest*). Dalam perspektif konflik ini maka kejahatan dapat dijelaskan sebagai keanekaragaman bentuk dan institusi masyarakat yang bersaing untuk memperoleh

kekuasaan, kekayaan (*Material resources*) dan berusaha untuk melakukan kontrol terhadap golongan lainnya. Golongan dengan posisi kuat (*Superior possession*) atau mempunyai akses dalam bidang ekonomi dan politik menggunakan hukum, penegakan hukum dan sistem peradilan dengan maksud untuk meningkatkan kepemilikan dan kepentingannya.

Dari perspektif konflik ini kemudian hukum pidana dipergunakan dengan tujuan utama untuk melindungi golongan kaya dari yang miskin dan tetap memelihara posisinya dalam masyarakat (*From this conflict perspective, then, criminal laws serve a central purpose of protecting the haves from the have nots and maintaining their superior position in society*).<sup>133</sup>

Dalam perspektif ini terlihat jelas bagaimana upaya penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan guna melindungi kepentingan salah satu pihak yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian persoalannya maka upaya penegakan hukum pada satu sisi merupakan upaya melaksanakan peraturan yang telah ditentukan, namun pada sisi lain dapat menimbulkan kesenjangan ataupun rasa tidak puas antara satu golongan dengan golongan yang

---

133. Bruce L. berg. Op cit.

lainnya.<sup>134</sup>

### 3. Penegakan hukum dalam perspektif interaksionis

Dasar pemikiran dari perspektif interaksionis adalah bagaimana hubungan masyarakat dengan seorang individu, termasuk didalamnya bagaimana masyarakat itu membentuk seseorang, atau bagaimana para individu itu menciptakan, mempertahankan dan mengubah masyarakat. Para interaksionis memandang bahwa masyarakat adalah *product* dari interaksi yang terus menerus diantara individu dalam lingkungan sosial yang bervariasi. Orang mendefinisikan situasi sosial mereka dan berperilaku menurut interpretasinya terhadap realitas. Dengan melakukan interaksi satu dengan lainnya, setiap orang mengembangkan definisi mengenai diri sendiri dan mengharapkan bentuk perilaku yang tepat. Sehingga kehidupan sosial menjadi sistimatis (*Systematic*), terpola (*Patterned*), dapat diprediksi (*Predictable*) dan secara teratur (*Orderly*).

Hal yang terpenting dalam kaitannya dengan kejahatan dan penegakan hukum adalah bahwa dapat dilihat hubungan antara pandangan interaksionis dengan kejahatan. Dalam perspektif interaksionis kejahatan adalah merupakan produk sosial dari

---

134. Ibid



mereka yang mempunyai kedudukan yang cukup untuk mempengaruhi dalam membubuhi cap (label) penjahat dan memberikan hukuman. Hanya berbedanya dengan pendekatan konflik adalah bahwa interaksionis tidak menegaskan bahwa pengaruhnya ini dikarenakan oleh motivasi ekonomi, dengan kata lain hukum tidak diterapkan untuk melindungi kepentingan para kapitalis dari golongan atas.<sup>135</sup> Para individu menggunakan kedudukan dan pengaruhnya dalam mempengaruhi proses hukum dengan motivasi oleh sejenis perang atau pembatasan moral ("*Moral crusade*").

Dengan demikian bagaimana upaya penegakan hukum dalam perspektif interaksionis sangat digantungkan pada "*Moral entrepreneurs*" para penegak hukum.

Kompleksnya kehidupan masyarakat, semakin besarnya peranan hukum positif dalam tata pergaulan, serta semakin meningkatnya peranan negara, tentunya berimplikasi pada diperlukannya organisasi yang bertujuan untuk melaksanakan fungsi hukum dalam

---

135. Bruce L. Berg. Ibid, Hal. 11

"Unlike the conflict perspective, the interactionist view does not assert that this influence is economically motivated. In other words, laws are not necessarily enforced to preserve the capitalist interest of the upper classes".

masyarakat, sehingga pembicaraan mengenai persoalan penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari persoalan keorganisasian. Hal ini seperti dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa:

"....Kita juga bisa mengatakan, bahwa tanpa dibuatnya organisasi-organisasi tersebut, hukum tidak bisa dijalankan dalam masyarakat. Apabila keadaannya demikian, maka tentunya dalam rangka membicarakan penegakan hukum, kita tak dapat melewatkan segi keorganisasian ini. ..."<sup>136</sup>

Rasionalitas, efisien dalam kerangka otoritas legal rasional adalah merupakan ciri dari organisasi modern, sehingga menggambarkan proses birokratisasi yang sangat kompleks sekali sifatnya. Birokratisasi disatu pihak sangat diwarnai oleh bentuk, sifat, serta susunan suatu negara, namun dipihak lain persoalan birokratisasi sangat terkait pada lapisan dan mobilitas sosial, perubahan kultural, Penggunaan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang dibangun secara formal rasional, pemisahan antara kehidupan umum dan pribadi, terjadinya bentuk legalitas baru yang beralasan rasional serta meluasnya cara bertindak yang rasional dan pelembagaan semua faktor ini ke dalam sebuah administrasi modern.<sup>137</sup>

---

136. Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, BPHN, Jakarta, tt, hal. 17.

137. Max Weber dalam Hans Ditter dan Tilman Schiel. Kelompok-Kelompok Strategis; Studi Perbandingan Tentang Negara, Birokrasi dan Pembentukan Kelas-Kelas di Dunia Ketiga. Terjemahan Aan Efendi. Yayasan Obor. Jakarta. 1970. hal. 227.

Penegakan hukum yang dilakukan secara birokratis tentunya dapat menimbulkan permasalahan. Menurut Saxena, secara garis besar hambatan-hambatan pada birokrasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni: hambatan proses dan hambatan orientasi.<sup>138</sup> Birokrasi dan sentralisasi yang kuat dalam pengelolaan pembangunan telah menimbulkan struktur birokrasi yang amat hirarkis dan legalistik, sehingga prosedur lebih bertujuan untuk memenuhi tuntutan struktur dari pada manfaat.<sup>139</sup> Hal ini dikarenakan dalam birokrasi telah ditentukan norma-norma, peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai perintah pada orang yang termasuk dalam lingkupnya untuk bertindak secara efektif.<sup>140</sup> Sehingga sering norma dan peraturan yang ada mengenyampingkan atau bahkan menghilangkan tujuan utama dari dibentuknya organisasi tersebut.

Hambatan orientasi yang dapat menghalangi birokrasi dalam kerjanya, adalah dikarenakan dalam birokrasi terdapat idiologi-idiologi dan mitos-mitos yang berkembang mendahului tujuan-tujuan asli. Menurut

---

138. Saxena A.P. Peningkatan Produktivitas Tatalaksana Pemerintah, Prisma, XV:11, tahun 1986. hal. 49.

139. Sofian Effendi. Birokrasi, Pembangunan Kualitas Manusia dan Produktivitas Nasional. Makalah pada Seminar Nasional tentang Kualitas Manusia dan Produktivitas Nasional, yang diselenggarakan oleh Panitia Dies Natalis UGM ke XXXVIII berkerja sama dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM Yogyakarta, Desember 1987. hal. 8.

140. Amitai Etzioni, Organisasi-Organisasi Modern, terjemahan Suryatim, UI Pres, Jakarta, 1985. hal. 72-73.

Peter M. Blau dan Marshal W. Mayer: "Ideologi-ideologi birokratis adalah nilai-nilai yang diakui bersama yang mengidentifikasikan keseluruhan keanggotaan dengan pengaturan-pengaturan tradisional di dalam suatu organisasi".<sup>141</sup> Sehingga mengaburkan persepsi-persepsi, dan secara khusus menciptakan penolakan terhadap perubahan-perubahan dengan jalan menjunjung tinggi *status quo*.<sup>142</sup>

Kekuatan lain yang tidak tampak dalam bekerjanya birokrasi adalah kekuasaan.<sup>143</sup> Kekuasaan sebagai faktor determinisme dalam birokrasi dapat berfungsi sebagai kendali dan dapat memberikan dasar legitimasi pencapaian tujuan organisasi,<sup>144</sup> membentuk struktur organisasi, terbentuknya spesialisasi, hirarki, jabatan, keahlian para anggota organisasi dalam rangka menggerakkan organisasi. Kondisi seperti

---

141. Peter M. Blau dan Marshal W. Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Penerjemah: Gary R. Jusuf. Penerbit Universitas Indonesia, Cet- I, Tahun 1987. hal. 76.

142. Ibid. hal. 71.

143. Dalam birokrasi istilah kekuasaan ini bersumber dari pengertian *inertia*, yang oleh Max Weber disebut dengan *Herrschaft*. Namun penggunaan *Herrschaft* dalam birokrasi dijumpai dengan banyak istilah. Misalnya Alan Hunt, *The Sociological Movement in Law*, London. Billing and sons. 1978, hal 103. telah mencatat *Herrschaft* ini dengan istilah "Domination" (Fischhoff), "Imperative Control" (Person and Henderson). "Authority" (Shill).

144. Kekuasaan juga merupakan ciri terpenting dari suatu organisasi. Menurut Bertrand Russell ciri-ciri terpenting suatu organisasi adalah (1) ukurannya, (2) kekuasaannya atas anggota-anggotanya, (3) kekuasaannya atas orang-orang bukan anggota, (4) bentuk pemerintahannya. Bertrand Russell, *Kekuasaan Sebuah Analisis sosial Baru*. Penerjemah oleh: Hasan Basari. Penerbit Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. tahun 1988. hal.136.

ini tentunya mempengaruhi pada sifat dan karakter hubungan antara masing-masing anggota organisasi. Hubungannya sangat berorientasi dan dilandasi kedudukan, pangkat, dan jabatan. Sehingga hubungan manusiawi tereduksi menjadi hubungan yang mekanistik sifatnya.

Kuatnya kekuasaan atau dominasi organisasi (negara) terhadap anggota-anggotanya tidak terbatas, kecuali sejauh ketentuan konstitusi melarang dan membatasinya,<sup>145</sup> sehingga dapat menjadi sarana legitimasi untuk mengendalikan dan memberikan dasar pembenar bagi organisasi untuk mengikat para anggota organisasi menjadi segmen-segmen baik vertikal maupun horisontal, dengan maksud memaksimalkan aktivitasnya yang mengarah pada efisensi serta meningkatkan produktivitasnya. Namun demikian besarnya kekuasaan, berkembangnya idiologi birokrasi, prosedur yang formalistik sifatnya cenderung merupakan penyebab tujuan dari dibentuknya birokrasi menjadi tidak tercapai.<sup>146</sup>

Bahkan menurut **Abraham Blumberg** norma hukum sendiri jika ditempatkan dalam suatu lingkungan

---

145. Ibid

146. Miftah Thoha. *Dimensi-Dimensi Ilmu Administrasi Negara*. CV. Rajawali, Jakarta, tahun 1984. hal. 133.

kelembangan yang merupakan organisasi resmi cenderung diterjemahkan menjadi kenyataan oleh orang-orang yang ada di dalam lembaga tersebut. Hal ini terjadi dalam rangka melayani kebutuhan dan tujuan organisasi yang birokratis yang sangat menekankan pada produksi (hasil kerja) serta efisiensi.<sup>147</sup>

Pada sisi lain jika penegakan hukum dilihat sebagai salah satu lembaga dan pranata yang ada dalam *"Criminal Justice System"*<sup>148</sup> maka menurut Alan Coffey et al. penegakan hukum (misalnya Polisi/Aparat Kepabeanan, Jaksa, Pengadilan) merupakan salah satu segmen yang ada dalam sistem peradilan pidana.<sup>149</sup> Sebagai bagian dari sistem maka menurutnya bahwa: *"Criminal justice can function systematically only to the degree that each segment of the system takes into account all other segment"*.<sup>150</sup>

---

147. Abraham Blumberg. Criminal Justice. Quadrangle, Cichago. 1970. hal. 5.

*"The rule of law is not self-executing. It is translated into reality by men in institution. Traditional constitutional elements of criminal law, when placed in the institutional setting of a modern criminal court, are reshaped by a bureaucratic organization to serve its requirements and goals. In pursuit of production and efficiency, the criminal court's formal and informal organizations have harnessed the court's ideology, structure, and personnel to overcome and alter the rules and safeguards of constitutional due process."*

148. Menurut Black's Law Dictionary, yang dimaksud dengan Criminal Justice System adalah: *"The Network of courts and tribunals which deal with criminal law and its enforcement"*.

149. Alan coffey, et al. Op Cit. Hal. 82. Menurutnya: *The Criminal Justice System has many segments. Police, Courts, Prosecution-defense, Corrections, and the Law itself are all of the criminal justice system.*

150. Ibid

Dengan demikian upaya penegakan hukum (terutama pada Polisi/Kepabeanan) haruslah dilakukan secara koheren, koordinatif dan integratif antara tiap segmen agar dapat mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal. Sebab kalau tidak maka sistem tersebut akan mudah terserang pada sikap pragmentarisme.<sup>151</sup> Tidak adanya tindakan yang koheren, kordinatif, integratif yang mengarah pada pragmentarisme tentunya penegakan hukum sebagai suatu lembaga dan pranata hukum dapat merupakan faktor kriminogen terhadap terjadinya kejahatan.

---

151. Ibid. hal 82.

*"In the absence of functional relationships between segments, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation and eneffectiveness".*

#### 4. Tinjauan Terhadap Hukum (Perundang-undangan)

Upaya untuk melihat peraturan perundang-undangan sebagai faktor kriminogen dalam perkembangannya merupakan hal yang relatif baru, terlebih lagi jika hal tersebut ditujukan terhadap bagaimana suatu produk perundang-undangan dihasilkan, dan hal inilah yang menjadi sorotan yang penting dalam kriminologi kritis dalam studinya terhadap kondisi yang dapat menimbulkan kejahatan, yang tidak hanya berhenti pada kondisi yang terdapat dalam diri pelaku (penjahat) maupun yang berasal dari faktor luar pelaku (penjahat).

Dalam kriminologi kritis hukum (undang-undang) diciptakan dan diterapkan pada orang-orang tertentu, dengan mencap mereka sebagai orang yang berada di luar garis (*outsiders*) jika orang yang bersangkutan melanggar hukum (undang-undang) tersebut.<sup>152</sup> Menurut **Bertrand Russell** hukum adalah sarana utama bagi negara untuk melaksanakan kekuasaan atas warga negara yang sifatnya memaksa, namun kekuasaan yang terlihat dituangkan dalam hukum (Undang-Undang) dapat menggambarkan keadaan yang rumit.<sup>153</sup> Di samping itu hukum dalam masyarakat modern merupakan alat legitimasi, di mana menurut **I.S. Susanto** bahwa:

---

152. Howard S. Becker. Op cit.

153. Bertrand Russell. Op cit. hal. 25



Legitimasi tidak hanya memberitahukan-dalam arti memberi pengetahuan-kepada individu mengapa dia harus melakukan suatu tindakan tertentu dan tidak yang lainnya, akan tetapi juga memberitahukan mengapa hal-hal atau kenyataan-kenyataan adalah seperti adanya. Dengan kata lain, di dalam legitimasi terhadap institusi, "pengetahuan" mendahului "nilai".<sup>154</sup>

Penggunaan hukum (perundang-undangan) secara sadar oleh Pemerintah sebagai suatu sarana untuk melakukan tindakan sosial yang terorganisasi telah merupakan ciri khas negara modern. Hal ini dilakukan dengan maksud dapat membawa pada tingkat perilaku yang memang dikehendaki, terutama oleh negara. Namun demikian sering dijumpai antara harapan yang telah dituangkan dalam perundang-undangan dengan realitas yang ada di masyarakat memperlihatkan keadaan yang sebaliknya.

Hal ini sebenarnya merupakan hal yang mungkin saja terjadi dengan tentunya menyadari keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam menggunakan hukum (undang-undang) dengan maksud tujuan tersebut di atas. Di samping itu perlu juga diketahui bahwa menurut **Robert. K. Merton** hukum dalam bekerjanya mempunyai dua fungsi yaitu **fungsi latent** dan **fungsi manifest**. Fungsi manifest dari suatu hukum adalah efek yang memang dituju oleh hukum itu sendiri yang biasa disebut

---

154. I.S. Susanto. Tahun XXII. Op cit. hal 16.

dengan *categories of subjective disposition*. Sedangkan fungsi latent atau *categories of generally unrecognized but objective functional consequences* adalah fungsi atau efek yang yang tidak diketahui atau tidak diharapkan sebelumnya, namun kemudian muncul sebagai bagian dari ditetapkannya peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>155</sup> Di samping itu perlu diingat bahwa undang-undang hanyalah sekedar "janji-janji", yang berarti bahwa undang-undang bisa berbeda dengan kenyataannya.<sup>156</sup>

Peraturan perundang-undangan pada dasarnya secara tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan apabila ada ketidakkonsistenan antara Undang-Undang dengan kenyataan. Semakin jauh Undang-Undang bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum itu.<sup>157</sup> Karena itu untuk memberdayakan hukum secara maksimal, maka hukum harus

---

155. Satjipto Rahardjo, S.H. Hukum dan Masyarakat. Penerbit Angkasa Bandung. 1986. hal. 114. Lihat juga I.S. Susanto. Ibid. hal. 16.

156. I.S. Susanto. Op cit.

157. Sixth U.N. Congress On The Prevention Of Crime and The Treatment of Offender: "Often, lack of consistency between laws and reality was criminogenic, the further the law was removed from the feeling and the values shared by community, the greater was the lack of confidence and trust in the efficacy of the legal system"

didukung oleh sentimen publik.<sup>158</sup> Di samping itu adanya kekakuan (*Clumsiness*) sikap aparat kadang-kadang membuat hukum tidak berfungsi dengan baik.<sup>159</sup>

Digunakannya hukum, khususnya hukum pidana untuk pencegahan terhadap kejahatan adalah merupakan salah satu sarana yang bisa dimanfaatkan oleh negara (penguasa), walaupun jika dilihat secara menyeluruh dan proporsional maka sebenarnya upaya penanggulangan kejahatan atau dikenal dengan istilah "politik kriminal" dapat dilakukan baik dengan pendekatan penal (pendekatan dengan menggunakan hukum pidana semata) maupun non penal (pendekatan dengan tanpa menggunakan hukum pidana). G.P. Hoefnagels misalnya berpendapat bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>160</sup>

Perbedaan antara kedua pendekatan tersebut terhadap pencegahan kejahatan adalah jalur penal

---

158. Bertrand Russell. Op cit.

159. Vilhelm Aubert. Some Social Functions of Legislation. Acta sociologica. 1966. hal. 98.  
 "Sometimes, the dysfunctions of laws or the lack of enforcement are.....due to the clumsiness of its administration, or lack of knowledge about elementary marketing techniques.."

160. G. Peter Hoefnagel, The Other Side Of Criminology, Kluwer, 1969, hal. 56.

lebih menitikberatkan pada sifat "repressive" ( penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan pendapatan "non penal" lebih menitikberatkan pada sifat "preventiv" (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.<sup>161</sup>

Meskipun pendekatan non penal sangat strategis dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan melalui peniadaan terhadap faktor-faktor dan kondisi yang kondusif terhadap timbulnya kejahatan, tetapi upaya penal melalui pengaturan dan pengenaan sanksi terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana masih tetap merupakan sarana yang dianggap ampuh. Bahkan ternyata ada semacam otomatisme dalam pemegang kebijakan bahwa setiap kejahatan ataupun perilaku yang menyimpang harus ditanggapi dengan hukum pidana.

Sikap otomatisme ini didasarkan adanya kesalahfahaman-kesalahfahaman (*misunderstandings/ misconception*) dalam melihat masalah perilaku menyimpang (*deviant*) ataupun kejahatan (*crime*). Kesalahfahaman tersebut diantaranya adalah adanya anggapan bahwa perilaku menyimpang adalah suatu sikap yang tidak bermoral sehingga membawa pada konsekwensi pada

---

161. Ibid, hal. 49.

digunakannya hukuman yang keras dalam upaya pencegahannya.<sup>162</sup>

Fungsionalisasi<sup>163</sup> atau pemberdayaan hukum pidana terhadap kejahatan dalam bidang ekonomi sangat diperlukan sehubungan dengan luasnya dampak kejahatan tersebut terhadap keseluruhan tatanan kehidupan bernegara, terutama tatanan kehidupan ekonomi. Disamping itu fungsionalisasi ataupun pemberdayaan hukum pidana diperlukan sebagai salah satu upaya dalam penegakan hukum adalah dengan mengingat pertumbuhan dan kemajuan di bidang industri dan IPTEK, sehingga berdasarkan *Guiding Principles For Crime Prevention And criminal Justice in The Context Of Development And A New Economic Order* menyatakan bahwa penggunaan sanksi pidana terhadap kejahatan yang bernuansakan ekonomi sebagai motif utamanya haruslah sifatnya:

*"Special protection against criminal negligence should be ensured in matters concerning public health, labour conditions, exploitation of natural resources and the environment and the*

---

162. Roucek and Warren. *Sociology, An Introduction*. Littlefield, Adams & Co. 1957. hal. 132-133.

"An adequate, scientific approach to problems of delinquency and crime is hindered by many popular misunderstandings remaining in the folklore and common sense approach to the problem.

- The first misunderstanding is that criminals are a separate type of people.
- Another misunderstanding is the viewpoint that criminals have no moral.
- Another important misconception is the crime has a single cause.
- A Fourth important misconception is that crime is prevented by strict penalties".

163. Menurut Barda Nawawi Arief, yang dimaksud dengan fungsionalisasi hukum pidana adalah sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkrit. Dalam Prof. Dr. Muladi, S.H. dan Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.. *Op cit.* Hal. 157.

*provison of consumer goods and services".<sup>164</sup>*

Dengan demikian pemberdayaan hukum pidana terhadap kejahatan dalam bidang ekonomi mempunyai sasaran yang cukup luas sekali yaitu disamping dimaksudkan memberikan perlindungan khusus terhadap bentuk-bentuk kelalaian yang bersifat kriminal dalam bidang kesehatan masyarakat, juga memberikan jaminan akan kelayakan kondisi atau persyaratan (keamanan) tenaga kerja, serta perlindungan terhadap eksploitasi sumber-sumber alam dan lingkungan serta persyaratan barang dan jasa bagi konsumen.

Sebenarnya pemanfaatan hukum pidana melalui sanksi-sanksinya dalam rangka penegakan bidang ekonomi bukanlah hal yang baru.<sup>165</sup> Namun pemberdayaan ataupun fungsionalisasi hukum pidana terhadap kejahatan yang bernuansakan ekonomi dan pembangunan hendaknya haruslah dapat memberikan peningkatan keadilan dan kemanfaatan pada pembangunan itu sendiri (*instrumental in promoting beneficial and equitable development*).

Khusus terhadap penggunaan ataupun penerapan

---

164. Guiding Principles, Op Cit.

165. Harry. V. Ball And Lawrence M. Friedman. The Use of Criminal Sanction Int The Enforcement of Economic Legislation: A Sociologicval View. dalam Gelbert Geis and Robert F. Meier. White-Collar Crime. The Free Press. 1977. Hal. 318.

"Concern over the use of criminal sanction int the enforcement of business legislation is by no means new...."

sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dalam bidang ekonomi, Sudarto misalnya bahwa:

Peraturan perekonomian, yang secara langsung atau tidak langsung hendak mempengaruhi perbandingan ekonomi di pasar, bersangkutan paut dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dan motif-motif ekonomi yang menggerakkan orang, badan atau negara dalam tindakan-tindakan ekonominya.

Maka pengendalian perekonomian semata-mata dengan menggunakan sanksi pidana akan menemui kegagalan dan mendatangkan kecemasan belaka. Terlalu banyak menggunakan ancaman pidana dapat mengakibatkan devaluasi dari undang-undang pidana.<sup>166</sup>

Apalagi adanya anggapan bahwa ancaman hukuman merupakan suatu dorongan untuk melakukan kejahatan, oleh karena perbuatan-perbuatan yang merupakan penyelewengan, merupakan penyalur pelbagai hasrat manusia yang mengalami pelbagai tekanan.<sup>167</sup> Namun demikian keberadaan hukum pidana pada dasarnya sesuai dengan sistem hukum dalam masyarakat modern. Menurut M. Cherif Bassiouni, sifat pidana dalam masyarakat lebih memperhatikan pelaksanaan suatu proses daripada pengaruhnya langsung pada para korban dan pelanggar.<sup>168</sup>

---

166. Prof. Sudarto, S.H. Op cit, hal. 92.

167. Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.D., M.A. Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi, Penerbit Remadja Karya CV. Bandung, Cet-I, Tahun 1985, hal. 89.

168. Berda Nawawi Arief. Op cit, hal. 121.

Di samping itu sanksi<sup>169</sup> memang diperlukan dan dapat tetap dipertahankan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan, karena sanksi pidana menurut **W. Friemand** merupakan penunjang utama dalam hukum pidana sebagai suatu bentuk formal dari penghukuman terhadap perilaku yang dilarang.<sup>170</sup> Namun perlu ditempuh kebijakan yang selektif dan limitatif dalam penggunaannya dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat di satu pihak dengan perlindungan dan perbaikan individu (pelaku kejahatan) di lain pihak.<sup>171</sup>

Upaya pemberdayaan atau fungsionalisasi hukum pidana dan sanksi pidana dalam mencegah ataupun memberantas kejahatan dalam bidang ekonomi haruslah didukung oleh kondisi-kondisi tertentu agar mempunyai tingkat efektivitas yang cukup tinggi. Kondisi tersebut baik sifatnya menyangkut teknis normatif yang merupakan prinsip dasar ataupun azas yang harus

---

169. Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Op cit, hal. 62. Menurutny: "Secara konvensional dapat diadakan pembedaan antara sanksi positif yang merupakan imbalan, dengan sanksi negatif yang berupa hukuman. Hukuman merupakan penderitaan, sedangkan imbalan merupakan suatu kenikmatan, sehingga akibat-akibatnya pada perilaku seta merta akan mengikutinya".

170. Wolfgang Friedmand, Criminal Law In a Changing World, New York, Oxford University Press, 1979. Hal. 191. Mengatakan bahwa: "The purpose of the penal law is a to express a formal social condemnation of forbidden conduct, buttressed by sanction calculated to prevent it (Kejahatan-pen)".

171. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. Op cit, hal 229.



dipenuhi secara normativ terhadap suatu peraturan perundang-undangan, maupun kondisi sosial yang sifatnya mendukung terhadap upaya pemberdayaan hukum dan sanksi pidana tersebut.

Jika hal ini tidak terpenuhi dalam arti diabaikan, maka tujuan suatu undang-undang ditetapkan **(fungsi manifest)** akan tidak terlihat, justru hal-hal yang bukan merupakan tujuan semula **(fungsi latent)** yang akan muncul kepermukaan. Pada sisi lain tentunya undang-undang akan tetap merupakan sarana legitimasi bagi penyaluran dominasi suatu kelompok atas kelompok lainnya.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. LETAK DAN KEADAAN GEOGRAFIS LOKASI PENELITIAN

###### 1. Letak dan Keadaan Geografis Kabupaten Sanggau

Dengan melihat letak dan posisi Indonesia secara keseluruhan yang terletak antara dua benua dan dua samudera, hal ini membawa konsekwensi pada daerah-daerah tertentu ada yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, salah satunya adalah Propinsi Kalimantan Barat

Dilihat dari letak geografisnya, Wilayah Kalimantan Barat-terdiri dari 1 (satu) Kotamadia dan 6 (enam) kabupaten-daerah yang berbatasan langsung dengan Serawak (Malaysia Timur) sebagai negara tetangga ada 4 (empat) Kabupaten, yaitu **Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu**. Dari 4 Kabupaten tersebut terdapat 20 kecamatan yang berhubungan erat dengan negara tetangga, diantaranya 11 (Sebelas) Kecamatan berbatasan langsung dengan Serawak (disebut Kecamatan Lini I) dan 9 (Sembilan) Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan lini I tersebut (disebut dengan Kecamatan Lini II).

Adapun Perincian Kecamatan Lini I tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Sambas, terdiri dari:
  - Kecamatan Paloh
  - Kecamatan Teluk Keramat
  - Kecamatan Sejangkung
  - Kecamatan Seluas
2. Kabupaten Sanggau, hanya Kecamatan Sekayam
3. Kecamatan Sintang, terdiri dari:
  - Kecamatan Ketungau Hulu
  - Kecamatan Ketungau Tengah
4. Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri dari:
  - Kecamatan Empangang
  - Kecamatan Badau
  - Kecamatan Batang Lupar
  - Kecamatan Embaloh Hulu

Sedangkan yang termasuk dalam Kecamatan Lini II adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Sambas, terdiri dari:
  - Kecamatan Ledo
  - Kecamatan Sanggau Ledo
  - Kecamatan Bengkayang
2. Kabupaten Sanggau, terdiri dari:
  - Kecamatan Beduai
  - Kecamatan Bonti
  - Kecamatan Noyam
  - Kecamatan Kembayan
3. Kabupaten Sintang, hanya Kecamatan Ketungau Hilir.

Luas keseluruhan daerah Lini I adalah 357.059,74 Km<sup>2</sup> yang meliputi 109 Desa dan 406 Dusun, sedangkan luas Kecamatan yang termasuk dalam kategori Lini II adalah 48.677,27 Km<sup>2</sup>, yang meliputi 95 Desa dan 346 Dusun.<sup>172</sup>

Daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga tersebut sifatnya sangat spesifik.

---

172. BAPPEDA, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kal-Bar No. 353 Tahun 1987 Tanggal 9-11-1987 Tentang Penyatuan Desa Dalam Penataan Kembali Desa Di Kalimantan Barat, Pontianak.

Kekhususannya terlihat bahwa dilihat dari letaknya, maka daerah (Kecamatan) tersebut letaknya sangat terpencil dari pusat-pusat kegiatan ekonomi daerah utama seperti Pontianak, Singkawang, Sanggau, Sintang dan Putussibau. Namun karena daerah tersebut secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia Timur, maka pengaruh dari negara tetangga tersebut sangatlah besar. Sehingga ada beberapa Kecamatan tertentu yang justru lebih maju jika dibandingkan dengan daerah Kecamatan lainnya.

Dengan mendasarkan pada banyaknya daerah (Kabupaten) yang berbatasan dengan negara tetangga (Malaysia Timur), maka penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel pada satu Kabupaten saja yaitu Kabupaten Sanggau, dengan Kecamatan Sekayam, terutama desa entikong sebagai lokasi penelitian.

Dilihat secara geografis, letak Kabupaten Sanggau terletak diantara garis 1 derajat 10 menit lintang utara dan 0 derajat 35 menit Lintang Selatan serta diantara 109 derajat 45 menit dan 111 derajat 11 menit Bujur timur, dengan luas daerah keseluruhannya 18.302,00 km<sup>2</sup> atau 12,47 % dari luas wilayah Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil Registrasi Penduduk akhir Tahun 1995 Penduduk Kabupaten Sanggau berjumlah 477.121 jiwa yang dirinsi sekitar 243.428 jiwa (51,02

%) penduduk laki-laki dan sekitar 233.693 jiwa (48,98 %) penduduk perempuan dengan kepadatan penduduk 26 jiwa per km<sup>2</sup>. Berdasarkan penghitungan proyeksi, Penduduk Kabupaten Sanggau dari Tahun 1990-1998 laju pertumbuhan penduduk pertahun rata-rata 2,46 %.<sup>173</sup>

Dari jumlah penduduk tersebut di atas, penduduk usia kerja<sup>174</sup> di Kabupaten Sanggau berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 1990 berjumlah sebanyak 194.455 jiwa (63,39 %), dan angkatan kerjanya diperkirakan sebanyak 62,91 %. Sedangkan berdasarkan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) tahun 1995 diperkirakan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sanggau sebesar 64,21 %, dengan pekerja (penduduk yang bekerja) sebesar 62,96 % dan yang masih mencari kerja sebesar 1,24 %, dan dari hasil Susenas tersebut juga diketahui bahwa yang bukan angkatan kerja ada sebanyak 35,79 % dengan perincian sebagai berikut: penduduk yang masih sekolah sebesar 17,19 %, mengurus rumah tangga sebesar 13,08 % dan lainnya sebesar 5,52 %. Kemudian dari data

---

173. BPS Kabupaten Sanggau.

174. Dihidang demografi, penduduk dilihat dari angkatan kerja pada dasarnya dibagi dalam dua katagori yaitu:

1. Penduduk usia dibawah 10 tahun.
2. Penduduk usia 10 tahun ke atas.

Penduduk 10 tahun ke atas dibedakan atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

- Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan.
- Bukan angkatan Kerja adalah penduduk yang kegiatannya mengurus rumah tangga, sekolah, dan lainnya termasuk penduduk yang tidak mampu melakukan kegiatan (pensiun, cacat dsb).

Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Sanggau jumlah pencari kerja yang mendaftar pada tahun 1995 ada 2.227 orang yang terdiri dari 1.346 orang laki-laki dan 881 orang perempuan dan yang sudah disalurkan sebanyak 1.596 orang (71,67 %) yang terdiri dari laki-laki 910 orang dan perempuan sejumlah 686 orang.<sup>175</sup>

Sedangkan batas wilayahnya berdasarkan Undang-Undang Nomor: 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959) adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Malaysia Timur (Serawak).
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ketapang.
- Sebelah Timur : Kabupaten Sintang.
- Sebelah Barat : Kabupaten Pontianak.<sup>176</sup>

Dilihat dari topografinya, Kabupaten Sanggau pada umumnya merupakan daerah tinggi yang berbukit dan berawa-rawa serta diairi oleh beberapa sungai baik besar maupun kecil yang terdiri dari Sungai Kapuas, Sungai Sekadau, Sungai Sekayam, Sungai Mengkiang, Sungai Kembayan, Sungai Tayan dan Sungai Belitang.

---

175. Kabupaten Sanggau Dalam Angka, 1995. BPS, Kabupaten Sanggau

176. Pemda Tk. II Kabupaten Sanggau.

Sungai Kapuas adalah merupakan sungai yang terpanjang di Kalimantan Barat yang mengalir mulai dari Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau dan Kabupaten Pontianak.

Dengan melihat letak geografis serta keadaan topografinya, tentunya banyak persoalan baik sosial maupun fisik yang dihadapi oleh Kabupaten Sanggau pada umumnya. Salah satu persoalan sosial yang dihadapi oleh Kabupaten Sanggau adalah dibidang kriminalitas. Dari data<sup>177</sup> memperlihatkan bahwa jumlah perkara yang masuk pada selama tahun 1995 dan sisa pada tahun sebelumnya sebanyak 1.379 perkara dengan rincian perkara biasa 149, sumir 3 dan rol/pelanggaran 1.379 perkara, dari jumlah keseluruhan tersebut perkara yang diselesaikan 1.359 (98,55 %).<sup>178</sup>

Dilihat dari banyaknya narapidana ataupun pelaku menurut jenis kejahatan yang terjadi di Kabupaten Sanggau (terutama dalam hal ini yang telah dipidana) terlihat bahwa peringkat yang tertinggi adalah kejahatan **pencurian** (sebanyak 159) kemudian **panganiayaan** dan **kesusilaan** sebanyak 22 kasus, serta

---

177. Sumber: Polresta Kabupaten Sanggau

178. Dengan melihat sistem pencatatan dalam statistik kriminil yang dilakukan oleh instansi yang terkait (terutama dalam hal ini Kepolisian), dimana pencatatan tersebut dilakukan terhadap kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat maka data yang berupa jumlah perkara yang masuk belum menggambarkan keadaan sebenarnya tingkat kriminalitas yang terjadi di dalam masyarakat, sebab masih banyak *dark number* yang belum dapat terekam dalam sistem statistik kriminal. Sehingga kualitas dari statistik kriminal kiranya perlu dipertanyakan akan tingkat representativ keadaan yang sebenarnya.

kejahatan ekonomi sebanyak 12 kasus.<sup>179</sup>

Dari analisis lebih dalam terutama dalam hal ini terhadap kejahatan ekonomi (12 kasus) diperoleh keterangan bahwa keseluruhan kasus tersebut memang merupakan tindak pidana dalam bidang ekonomi, terutama yang menyangkut penyelundupan. Namun mereka atau nara pidana tersebut melakukannya sebelum tahun 1995, sehingga secara yuridis formal ketentuan yang dilanggar dan karenanya diancam dengan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang salah satu pasalnya mengatur masalah tindak pidana penyelundupan (pasal 102) belum pernah diterapkan terhadap kasus-kasus tindak pidana penyelundupan.

## **2. Letak Geografi dan Keadaan Demografi Kecamatan Sekayam**

Kabupaten Sanggau yang salah satu wilayahnya berbatasan dengan negara tetangga (Malaysia Timur) dalam perkembangan terdiri dari 20 Kecamatan dengan 228 Desa, secara rinci kiranya dapat dilihat dalam tabel I mengenai jumlah kecamatan beserta ibu kotanya dan jumlah desa yang ada dilingkungan masing-masing

---

<sup>179</sup>. Sumber: RUTAN Kab. Sanggau



kecamatan, yaitu sebagai berikut:

TABEL I  
NAMA IBUKOTA KECAMATAN PADA KAB. SANGGAU  
DAN JUMLAH DESA

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Jl. Desa
1.	T o b a	Teraju	7
2.	Meliau	Meliau	15
3.	Nanga Mahap	Nanga Mahap	11
4.	Nanga Taman	Nanga Taman	12
5.	Sekadau Hulu	Rawak	14
6.	Sanggau Kapuas	Sanggau	16
7.	Mukok	Kedukul	6
8.	Sekadau Hilir	Sekadau	14
9.	Belitang Hilir	Sungai Ayak	8
10.	Belitang Hulu	Balai Sepuak	17
11.	Jangkang	Balai Sebut	11
12.	B o n t i	B o n t i	9
13.	Parindu	Pusat Damai	14
14.	Tayan Hilir	Tayan	15
15.	B a l a i	Batang Tarang	12
16.	Tayan Hulu	Sosok	11
17.	Kembayan	Kembayan	11
18.	Beduwai	Beduwai	5
19.	N o y a n	N o y a n	5
20.	Sekayam	Balai Karang	15

Sumber: Pemda Tk. II Kabupaten Sanggau

Dilihat dari berbagai aspek antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya memperlihatkan perkembangan dan kemajuan yang tidak sama. Ada kecamatan yang memperlihatkan perkembangan-terutama dalam bidang transportasi, ekonomi-yang lebih baik jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya

Salah satu Kecamatan yang sangat maju jika

dibandingkan dengan Kecamatan lainnya adalah Kecamatan Sekayam, dengan Desa Entikongnya (merupakan lokasi utama dalam penelitian ini) sebagai pintu masuk utama. Apalagi sejak dibukanya pintu gerbang lintas batas Internasional pada tahun 1990 oleh Presiden Soeharto, membuat desa Entikong adalah pintu gerbang utama untuk keluar masuk ke dan dari negara Malaysia Timur. Sebenarnya jika dilihat secara historis, maka hubungan antara kedua masyarakat yang berbatasan tersebut sudah lama terjalin baik.

Kecamatan Sekayam memang sangat spesifik, karena salah satu wilayahnya berbatasan langsung dengan Malaysia Timur, yaitu sebelah utaranya, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tungau Hulu Kabupaten Sintang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Noyan dan Beduwai, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Air Besar Kabupaten Pontianak dan Kecamatan Seluas Kabupaten Sambas.<sup>180</sup>

Kecamatan Sekayam yang terdiri dari 15 Desa memperlihatkan jumlah penduduk yang tidak merata, sebagai contoh Desa entikong menduduki peringkat kedua sebesar 3.053 jiwa setelah Desa Balai Karangan sebesar 5.335 jiwa yang kemudian diikuti oleh Desa Suruh

---

180. Sumber: Kantor Camat Sekayam

Tembawang sebagai peringkat ketiga dengan jumlah penduduk 2.068 jiwa. Sebagai gambaran umum, kiranya tabel di bawah ini dapat memperlihatkan luas daerah di masing-masing Desa yang berada di wilayah kecamatan Sekayam beserta jumlah penduduk dan kepadatannya.

TABEL II

## LUAS, JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN MENURUT DESA

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan
1.	Balai Karangan	67.03	5.335	80
2.	Pengadang	49.13	1.675	34
3.	Kenaman	48.87	1.312	27
4.	Sotok	92.37	1.613	17
5.	Raut Muara	104.52	1.987	19
6.	Engkahan	82.56	1.561	19
7.	Semanget	62.54	1.597	26
8.	Entikong	110.98	3.053	28
9.	Nekan	100.53	1.838	18
10.	Pala Pasang	84.02	768	9
11.	Suruh Tembawang	148.82	2.068	14
12.	Bungkang	79.98	1.762	22
13.	Lubuk Sabuk	103.29	1.801	17
14.	Sui. Tekam	96.31	1.287	13
15.	Malenggang	116.56	1.779	15
Jumlah		1347.51	29.436	22

Sumber: Kantor Camat Sekayam

Dengan dibukanya jalur resmi antara Indonesia (Kalimantan Barat) dengan Malaysia Timur (Serawak), maka terlihat banyak perubahan yang terjadi pada hampir setiap lapangan kehidupan baik sosial budaya,

ekonomi, kependudukan maupun ketanagakerjaan. Sebagai contoh misalnya arus migrasi antara kedua daerah memperlihatkan adanya peningkatan yang cukup berarti. Hanya dari beberapa penelitian ternyata mereka yang bermigrasi dari Indonesia ke negara Serawak dilakukan secara ilegal.<sup>181</sup>

Disamping itu dari penelitian lain yang dilakukan oleh Tim Peneliti Daerah Perbatasan ditemukan bahwa di daerah perbatasan masih terdapat kondisi yang dapat menghambat usaha pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, diantara kondisi tersebut adalah:

**Pertama:** Sejak lama telah berlangsung migrasi tenaga kerja musiman dari wilayah Indonesia menuju beberapa tempat di wilayah Serawak. Kepergian mereka ini kadang-kadang tanpa melalui prosedur keimigrasian yang berlaku, sehingga menimbulkan kesulitan bagi instansi yang berwenang melacak mereka serta memberikan bantuan pada saat diperlukan. Kekurangan tenaga kerja di wilayah perbatasan tersebut dapat menghambat program pembangunan yang ada.

**Kedua:** Arus barang melintasi garis perbatasan terlihat semakin meningkat. Arus ini hanya tampak menyusut pada waktu penjagaan dilakukan secara ketat, namun akan naik kembali apabila penjagaan mengendur. Penjagaan secara terus menerus dengan intensitas yang konstan merupakan hal yang sulit dilakukan apabila diingat bahwa garis perbatasan antara Propinsi Kalimantan Barat dengan Serawak Malaysia membentang dari Barat ke Timur mulai dari Laut Natuna sepanjang tidak kurang dari 800 Km<sup>2</sup> sampai ke Kecamatan Benua Martinus di ujung sebelah

---

181. James Siagian, Pola Umum Migrasi Penduduk Perbatasan Kalimantan Barat-Serawak, Dalam Buletin Ringkasan Hasil-Hasil Penelitian, diterbitkan oleh Balai Penelitian Universitas Tanjungpura Pontianak, Vol. VIII, Tahun 1992, hal. 63.

Timur.<sup>182</sup>

Khusus Terhadap persoalan kedua yang ada di daerah perbatasan, yaitu meningkatnya arus barang, maka hal ini mempengaruhi pada pola pekerjaan yang ada dalam masyarakat, yaitu banyak masyarakat atau penduduk yang beralih pekerjaan dari pertanian ke sektor jasa terutama sebagai pengangkut barang, baik dengan cara digendong (Ambin) atau dengan sepeda atau sepeda motor (ojek).<sup>183</sup>

Sebenarnya dari penelitian<sup>184</sup> diperoleh keterangan bahwa pada dasarnya masyarakat yang bekerja di sektor jasa, baik berupa pengangkut barang dari negara tetangga (Malaysia Timur) dengan cara diambin adalah sudah lama, hanya persoalannya dewasa ini dilihat dari segi kuantitasnya memperlihatkan peningkatan jumlah yang sangat besar. Bahkan jika dilihat dari jenis barang yang dibawa oleh penduduk setempat memperlihatkan berbagai produk mulai dari makanan, minuman (soft drink) sampai pada

---

182. Tim Peneliti Daerah Perbatasan, Untan, Identifikasi Masalah Pembangunan Daerah Perbatasan Kalimantan Barat dan Serawak, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Tahun 1990.

183. Ign. Budimen, Dkk. Perubahan Sosial Masyarakat Perbatasan (Studi Kasus di Desa Jagoi, Kecamatan Seluas Kabupaten Sambas), Dalam Jurnal Penelitian, yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Universitas Tanjungpura Pontianak, Edisi Mei, Vol. I-Nomor 3 Tahun 1991, hal. 114.

184. Penelitian ini dilakukan terutama dengan melakukan wawancara kepada Drs. Abdullah selaku Camat pada Kecamatan Sekayam pada tanggal 28 dan 29 Nopember 1997 di Kantor Kecamatan Sekayam.

pakaianpun<sup>185</sup> dibawa oleh masyarakat.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka terlihat bahwa interaksi sosial antara masyarakat yang ada pada perbatasan cukup tinggi. Hal ini tentunya membawa pada dampak, baik dampak positif maupun negatif yang harus diperhatikan. Salah dampak yang perlu diperhatikan adalah meningkatnya arus barang yang illegal dari negara tetangga. Hal ini terjadi pada satu sisi dilihat dari sejarah kebiasaan membawa atau berdagang barang-barang yang berasal dari Malaysia pada realitasnya sudah menjadi kebiasaan yang cukup lama. Bahkan ada masyarakat yang berdomisili di daerah perbatasan-terutama yang berada di Entikong-melakukan kegiatan bertani ataupun bercocok tanam di wilayah yang masih masuk teritorial Malaysia, namun sepanjang ini memang antara kedua penduduk diperbatasan tidak pernah terjadi konflik.

Tidak adanya konflik ini terjadi dikarenakan ternyata mereka (masyarakat di kedua daerah perbatasan tersebut) menganggap masih dalam satu keturunan yaitu sama-sama dari suku Dayak Iban. Sehingga atas dasar inilah mereka menganggap antara kedua penduduk masih

---

185. Khusus terhadap pakaian yang berasal dari Malaysia, pada masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya dikenal dengan istilah "Baju Lelong" ataupun "Baju Roma" kependekatan dari "Baju Rombongan Malaysia".

dalam satu rumpun keluarga.<sup>186</sup>

Jika dilihat dari hubungan masyarakat di kedua perbatasan tersebut merupakan kondisi yang baik apalagi jika dikaitkan dengan solidaritas sesama negara Asean, namun pada sisi lain realitas memperlihatkan bahwa jika arus barang yang masuk ke Indonesia melalui transaksi yang illegal, serta jika dilihat barang-barang yang masuk tersebut notabene memperlihatkan segi kualitas yang relatif lebih baik jika dibandingkan dengan barang yang sejenis dari Indonesia, hal ini tentunya pada taraf nasional jelas akan membawa pada dampak yang negatif, terutama dari segi Ketahanan Nasional, serta pada bidang ekonomi jelas akan dapat mengancam stabilitas perekonomian bangsa.

---

186. Hal ini diperoleh dari keterangan salah satu pemuka masyarakat adat setempat yaitu bapak Lamid Niga yang menjelaskan pada peneliti bahwa mereka menganggap antara penduduk kedua daerah tersebut masih berasal dari satu keturunan, sehingga banyak ditemui persamaan adat budaya. Bahkan menurut Lamid Niga pada peneliti banyak masyarakat setempat yang melakukan perkawinan dengan masyarakat yang berdomisili di daerah perbatasan tersebut. Keterangan ini diperoleh penulis pada saat melakukan wawancara dengan informan (responden) pada tanggal 30 Nopember 1997.

## B. PERKEMBANGAN KEJAHATAN PENYELUNDUPAN DI KALIMANTAN BARAT

Keberadaan kejahatan penyelundupan sangatlah kompleks penyebabnya, baik yang bersifat ekonomi maupun yang non ekonomi. Keadaan wilayah (geografis) yang secara langsung berbatasan dengan negara lain adalah merupakan kondisi yang potensi untuk jenis kejahatan penyelundupan ini, ditambah lagi jika antara kedua negara mempunyai struktur perekonomian yang tidak sama, termasuk di dalamnya pendapatan perkapita yang memperlihatkan tingkat yang berbeda, kelangkaan suatu barang dalam negeri (*scarcity*), prosuder yang dianggap berbelit untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor, serta besarnya bea masuk terhadap barang-barang tertentu jelas merupakan sekian banya kondisi kondusif yang dapat memicu seseorang untuk melakukan aktivitas penyelundupan. Bahkan faktor sosial budaya masyarakat setempat juga memperlihatkan kondisi yang cukup dominan terhadap perkembangan kejahatan penyelundupan.

Seperti yang telah disebutkan dalam Bab I bahwa sebenarnya pengertian penyelundupan bukanlah istilah yuridis, ia merupakan pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang ke atau dari dalam



negeri dengan latar belakang tertentu.<sup>187</sup>

Sebenarnya penyelundupan sebagai salah satu bentuk perilaku yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan, keberadaannya di Indonesia sudah cukup lama. Sebagai suatu perbandingan misalnya keberadaan penyelundupan di Kepulauan Riau sudah dimulai sejak Negara Indonesia dijajah oleh Negara Belanda disatu pihak serta Malaysia dan Singapur dijajah oleh Inggris dipihak lain.<sup>188</sup>

Permasalahannya bermula dari penentuan batas-batas wilayah jajahan, dalam upaya penentuan batas wilayah tersebut terkadang diikuti oleh bentrokan antara kedua pihak sehingga menimbulkan kontak senjata diantara keduanya. Karenanya untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 1824 diadakan perjanjian yang kemudian dikenal dengan *Treaty of London* antara Inggris selaku penguasa Singapura dan Malaysia dan Belanda sebagai penguasa Hindia Belanda. yang berisikan batas wilayah antara kedua wilayah negara tersebut.

Perjanjian tersebut kemudian diikuti oleh perjanjian perdagangan lintas batas antara kedua wilayah yang diantaranya berisi mengenai pedagang atau pelintas

---

187. Lihat Catatan Kaki Nomor 19.

188. Forum Keadilan Nomor 09, hal 61.

batas tradisional dari kedua wilayah tadi dibebaskan dari ketentuan kepabeanan, sehingga pelintas atau pedagang tradisional tersebut terus dapat melaksanakan aktivitasnya tanpa harus mendapatkan hambatan baik dari struktur kekuasaan maupun peraturan yang berlaku.<sup>189</sup> Namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pengusaha yang tergolong besar, mereka tetap dibebani dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ketat mengenai kepabeanan ini.

Akan tetapi perkembangannya memperlihatkan bahwa pedagang yang tergolong besar ini dalam kegiatannya tetap berusaha menghindari peraturan yang berlaku dengan berbagai cara. Mereka yang melakukan pelanggaran ini kemudian disebut dengan istilah "*Smokkel (Smokkelaar)*" yang secara etimologis berasal dari bahasa Belanda yaitu "*Smok'kel* atau *Smokkelarij*" yang berarti penyelundup. Istilah ini terus memasyarakat sehingga *Smokkel* dipahami sebagai orang yang melakukan kegiatan bisnis tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku.

Di zaman Jepang, lewat suasana peralihan, *Kempetai* (Polisi Militer Jepang) mencoba memberantas kegiatan *smokkel* ini dengan cara menggunting jalur perdagangan lintas batas antara kedua negara, sehingga pada saat itu

---

189. Ibid

dapat dikatakan bahwa kegiatan smokkel mengalami penurunan drastis. Namun setelah Jepang dikalahkan sekutu kegiatan smokkel tersebut memperlihatkan aktivitas yang meningkat.

Kemudian setelah Indonesia memproklamirkan Kemerdekaan melalui revolusi, ternyata banyak menimbulkan akibat buruk bagi perekonomian. Devisa negara dapat dikatakan ambruk, sebagai salah satu jalan keluarnya adalah bisnis smokkel digalakan kembali. Khusus di daerah Sumatera kegiatan smokkel ini menjadi lebih marak manakala pada tahun 1950-an terjadi gerakan separatis PRRI yang banyak mengalami kesulitan biaya dalam akitivitasnya.

Namun setelah gerakan saparatis ini berhasil dipatahkan oleh Pemerintahan yang sah pada waktu itu, tiba-tiba Presiden Soekarno melancarkan perang konfrontasi dengan Malaysia yang pada satu sisi mempengaruhi kegiatan smokkel. Setelah berakhirnya perang konfrontasi dengan Malaysia tersebut pemerintah di bawah Orde Lama mengalami kesulitan perekonomian yang merupakan salah satu penyebab sehingga kegiatan smokkel tumbuh dan berkembang lagi.

Ketika Orde Baru menggantikan Orde Lama dan menyadari betapa sulitnya keadaan perekonomian, Pemerintah mulai mengarahkan perhatiannya kepada kegiatan penyelundupan, hal ini didasari oleh nilai

kerugian yang diderita oleh negara terhadap kegiatan ilegal ini, sehingga pada tahun 1967 untuk pertama kalinya istilah penyelundupan digunakan dalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967.<sup>190</sup> Kemudian tindakan lain guna mengurangi aktivitas penyelundupan barang yang berasal dari Malaysia ini dengan mengadakan perjanjian bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia Tentang Perdagangan Lintas Batas antara kedua negara. Perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 24 Agustus 1970 dan masih berlaku sampai saat ini.<sup>191</sup>

Jika dilihat perkembangan penyelundupan yang terjadi di Sumatera terutama di Kepulauan Riau memang memperlihatkan permulaan sebab yang berbeda dengan aktivitas penyelundupan yang terjadi di Kalimantan Barat,<sup>192</sup> walaupun untuk kemudian mempunyai titik

---

190. Dalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 yang dalam pasal 1 ayat 2-nya menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan dengan penyelundupan seperti yang tersebut dalam pasal 1 ayat 1 adalah perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia".

191. Perjanjian Bilateral tersebut ditandatangani oleh Prof. DR. Sumitro Djojohadikusumah selaku Menteri Perdagangan Indonesia yang bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan dipihak Malaysia ditandatangani oleh Mohd. Khir Johari selaku Menteri Perdagangandan Perindustrian Malaysia yang bertindak atas nama Pemerintah Malaysia.

192. Berdasarkan Undang-Undang (Prp) Nomor 8 Tahun 1962 tentang Pengawasan Barang-Barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 sebagai Peraturan Pelaksanaannya, serta berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 142/M/SK/1962 Jo. No: 101/SK/VIII/67, Kalimantan Barat ditetapkan sebagai salah satu tempat dalam daerah Pabeian Indonesia yang disebut sebagai daerah perbatasan, disamping 8 daerah lainnya yaitu:

1. Daerah Istimewah Aceh.

kesamaannya yaitu sama-sama mempunyai motif ekonomi sebagai dasar aktivitasnya (*profit oriented*).

Antara Indonesia dan Malaysia memang masih memperlihatkan banyak masalah terutama menyangkut perbatasan kedua negara. Masalah garis batas RI-Malaysia disungai Sematipal (perbatasan Kalbar-Serawak) misalnya masih belum ditemukan kesepakatan, serta disinyalir masih adanya kegiatan Partai Komunis Kalimantan Utara (PKKU) merupakan salah satu sebab kerja sama RI-Malaysia tetap ditingkatkan.

Demikian juga persoalan penyelundupan yang terjadi antara dua negara tetap memperlihatkan tingkat yang cukup tinggi. Penyelundupan ke Malaysia dari Indonesia terutama adalah kayu yang dibawa melalui jalur laut ke Paloh dekat perbatasan Serawak dengan menggunakan Kapal yang berukuran antara 50 sampai 400 ton.<sup>193</sup> Penyelundupan kayu ke Malaysia ini terjadi karena adanya perbedaan harga yang cukup besar jika dibandingkan dengan harga lokal

---

...Continued...

2. Daerah Sumatera Timur (ex. keresidenan Sumatera timur).
3. Kepulauan Bangka dan Belitung.
4. Dati I Riau.
5. Dati I Jambi.
6. Dati I Kalimantan Timur.
7. Dati I Sulawesi Utara.
8. Dati I Maluku Utara.

193. Data yang diperoleh dari Bea dan Cukai Malaysia di Sematan memperlihatkan bahwa stiap hari rata-rata kapal yang masuk ke Serawak melalui jalur Paloh ini sekitar 4 kapal. Adapun Jarak tempuh melalui jalur laut dari Paloh menuju perbatasan Serawak (Kabupaten Sambas) berkisar 8-10 jam.

sehingga keuntungan yang diperkirakan para pelaku penyelundupan adalah sangat besar.<sup>194</sup>

Pada mulanya sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat yang berdomisili di daerah perbatasan untuk melakukan kegiatan perdagangan di wilayah Malaysia (terutama di daerah yang relatif jaraknya tidak jauh dari perbatasan, misalnya **Sirian**). Dalam bentuknya yang masih sederhana maka transaksi tersebut dilakukan dengan sistem **barter**, antara suatu barang dengan barang lainnya yang memiliki fungsi relatif sama guna memenuhi kebutuhan hidup.

Dari suatu penelitian yang dilakukan ternyata memperlihatkan bahwa ada mereka yang melakukan transaksi dagang sudah merupakan tujuan semula dalam arti mereka pergi ke daerah tersebut memang bertujuan untuk melakukan transaksi dagang (barter) atau juga merupakan suatu kegiatan sampingan dalam arti mereka pergi ke daerah Malaysia hanya mengunjungi sanak keluarga, kemudian mereka pada saat pulang melakukan pembelian suatu barang baik barang tersebut sebagai oleh-oleh (buah tangan) untuk sanak keluarga mereka yang berdomisili di Kalimantan maupun guna mencukupi kebutuhan hidupnya. berupa membeli atau menjual barang yang pada umumnya

---

194. Menurut Bapak Paima sebagai Petugas P2 pada Bea dan Cukai Kalimantan Barat ternyata Harga kayu di Kuching (Malaysia Timur) bisa tiga kali lipat dibandingkan dengan harga di Kalbar. Sebagai contoh kayu jenis Bengkirai ukuran 12 x 12 x 4 meter harganya berkisar Rp 200.000/kubik, sementara di Kuching mencapai 700 atau 800 ringgit Malaysia (jika kurs satu ringgit Malaysia sehesar Rp 900, maka harga kayu tersebut berkisar Rp sekitar Rp 630.000 - Rp 720.000).

merupakan hasil alam.

Ada dua pertimbangan yang melingkupi mereka melakukan barter pada masyarakat di kedua perbatasan tersebut *pertama* yang menyangkut keadaan geografis, *kedua* alasan yang menyangkut kekerabatan. Sebelum jalur transportasi antara Kecamatan Sekayam (terutama desa Entikong) dibuka maka daerah ini relatif merupakan salah satu daerah yang terisolir yang ada di wilayah Kabupaten Sanggau, karena letaknya yang jauh dari Ibukota Kabupaten (Sanggau) sehingga dirasakan kurang atau tidak efektif melakukan transaksi di Ibukota Kabupaten, apalagi kendaraan yang dapat dijadikan alat transportasi pada waktu itu tidak ada sehingga harus dilakukan berjalan kaki.<sup>195</sup>

Sedangkan alasan kekerabatan dimaksudkan bahwa antara masyarakat yang berdomisili di daerah perbatasan tersebut merupakan satu keturunan yaitu berasal dari suku Dayak Iban, bahkan diantara kedua masyarakat yang berdomisili di kedua daerah tersebut ada yang melakukan perkawinan sehingga hubungan masyarakat kedua daerah tersebut semakin erat. Sebagai manifestasi kekerabatan

---

195. Merupakan keadaan umum wilayah yang ada di Kalimantan Barat bahwa banyak daerah-daerah yang masih terisolir, belum terbukanya jalur transportasi yang menghubungkan antara daerah ke daerah lainnya merupakan salah satu alasan yang cukup kuat sehingga masyarakat harus berjalan kaki guna pergi ke daerah lainnya. Disamping itu alasan lain ditemukan bahwa mereka melakukan jalan kaki ke suatu daerah guna menyingkat jarak perjalanan. Cara ini dilakukan dengan cara memotong jalur perjalanan yang sudah ada.

tersebut, maka antara kedua masyarakat sering melakukan kunjungan baik yang sifatnya formal maupun yang informal<sup>196</sup> guna mengetahui keadaan pada masing-masing keluarga.

Pada saat melakukan kunjungan tersebutlah biasanya transaksi dilakukan dengan kuantitas barang yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hubungan demikian pada satu sisi dapat digambarkan sebagai sistem ekonomi tradisional yang memperlihatkan tidak adanya peningkatan tuntutan-tuntutan kebutuhan.<sup>197</sup>

Keadaan demikian ternyata dalam realitasnya memperlihatkan tidak bertahan, hal ini sejalan dengan

196. Kunjungan yang sifatnya formal dilakukan jika salah satu keluarga melakukan hajatan (yang dalam bahasa setempat disebut gawai) baik berupa perkawinan, ataupun acara adat lainnya. Sedangkan kunjungan yang informal sifatnya dilakukan sebagai bagian dari eratnya hubungan kekeluargaan antara kedua masyarakat tersebut.

197. Effendi Aman dkk (Tim Peneliti Aspek Ekonomi Tradisional), Sistem Ekonomi Tradisional Sebagai Perwujudan Tanggapan Aktif Manusia Terhadap Lingkungannya Daerah Kalimantan Barat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Tahun 1983, hal 4.

Yang dimaksud dengan tradisional disini adalah pola tingkah laku/tindakan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Berdasarkan tradisi yang tidak tertulis yang melembaga dan berkembang dalam masyarakat sebagai warisan dari generasi yang lalu. Dalam sistem ekonomi tradisional setidaknya-tidaknya ada beberapa ciri yaitu antara lain.

- a. usaha yang dilakukan baru untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. alat-alat yang dipergunakan masih sangat sederhana.
- c. belum terlihat adanya spesialisasi pekerjaan dalam usaha memenuhi kebutuhan.
- d. belum terlihat adanya pemisahan antara hubungan yang bersifat ekonomis dengan hubungan yang bersifat sosial dalam menghasilkan benda-benda kebutuhan.
- e. masih besar semangat dan jiwa gotong royong dalam kegiatan menghasilkan benda-benda kebutuhan.
- f. pada umumnya belum terlihat peranan dan fungsi pasar sebagai tempat distribusi benda-benda.



perubahan yang terjadi dalam masyarakat terutama perubahan yang disebabkan oleh pembangunan yang terus dilakukan. Pembangunan yang dilakukan pada hakekatnya merupakan pembaharuan disegala bidang, bahkan dampak dari pembangunan tersebut mempengaruhi pada pola hubungan kerahatan yang ada.<sup>198</sup>

Aktivitas yang semula hanya didasari oleh kepentingan yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sudah mengarah pada kepentingan yang bersifat ekonomi dalam arti bahwa aktivitasnya dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan pendapatan keluarga dengan cara melakukan transaksi antara mereka dengan masyarakat yang membutuhkan barang/produk dari Malaysia. Bahkan dengan melihat letak geografisnya, aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai penyelundupan tidak hanya berupa barang saja, tetapi sudah berupa penyelundupan **Tenaga Kerja Indonesia (TKI)** dimasukkan secara ilegal ke Malaysia.

Seperti apa yang telah disebutkan di atas, bahwa salah satu penyebab dari sekian banyak penyebab dilakukannya aktivitas penyelundupan adalah prosedur yang

---

198. Drs. Sunyamin, MS dkk. Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan di Kalimantan Barat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Tahun 1984 hal. 95-106.

berbelit dalam melakukan ekspor suatu barang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kelangkaan suatu barang di pasaran (dalam negeri). Hal ini terjadi akibat cukup besarnya peranan dan campur tangan negara dalam sistem perekonomian dengan maksud untuk turut serta melindungi rakyat dari eksploitasi para pengusaha dengan jalan turut serta menjaga stabilitas harga dan keberadaan suatu barang di pasaran.

Upaya tersebut dilakukan dengan cara mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai tata niaga untuk produk-produk tertentu yang dianggap mempunyai hubungan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sehingga untuk produk-produk tersebut dikenal dengan suatu istilah produk yang *"Highly Regulated"* artinya suatu produk yang mempunyai tingkat proteksi yang cukup tinggi dan sangat diatur. Gula dan Bawang putih misalnya adalah produk yang sebelumnya<sup>199</sup> mempunyai tingkat pengaturan yang sangat tinggi, mulai dari penentuan harga, distribusi hingga pemasaran.

Sebagai contoh dalam tata niaga gula terdapat empat kelompok pelaku yang dapat mempengaruhi penentuan harga,

---

199. Sampai dengan penelitian ini dilakukan sistem tata niaga gula masih tetap mempunyai karakteristik sebagai suatu produk yang *"Highly Regulated"*, sebab sekarang ini pemerintah telah mengeluarkan suatu ketentuan baru yang dikenal dengan Paket Kebijakan 3 November 1997 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1998 sebagai salah satu upaya untuk menghapuskan tata niaga produk-produk tertentu yang dianggap berbelit-belit. Gula Pasir, Bawang Putih adalah salah satu produk yang terkena dari Paket Kebijakan 3 November 1997 tersebut.

kelompok tersebut adalah kelompok produsen, penyalur, importir, dan Bulog. Dengan pola tata niaga itu pula dikenal adanya empat jenis harga. Pertama harga produsen (*provenue*) atau harga beli Bulog dari pabrik gula/petani, kedua harga jual Bulog (*ex-mill*) atau harga beli pengecer, ketiga harga eceran (*retail*) atau harga beli masyarakat, dan keempat adalah harga jual Bulog untuk gula impor. Harga produsen dan harga jual Bulog diatur langsung pemerintah melalui SK Menkeu<sup>200</sup> sedangkan harga jual eceran tidak diatur secara langsung, tetapi melalui kebijaksanaan pengontrolan pasok. Di samping itu praktek tata niaga gula di Indonesia telah terjadi sistem kartel<sup>201</sup> yang hanya menunjuk pada pihak-pihak tertentu yang dapat melakukan impor dan pendistribusian gula di pasaran untuk dikonsumsi langsung oleh konsumen.

Kondisi demikian jelas akan mempengaruhi keberadaan barang di pasaran domestik, sehingga tentunya akan merupakan kondisi yang dapat memicu untuk memasukan

---

200. Menurut SK Menkeu No. 139/KMK.016/1995 harga gula impor dari Bulog sebesar Rp 1.300 per Kg. Yang menarik dari ketentuan mengenai harga ini adalah ternyata harga gula domestik lebih tinggi dari harga impor gula di pasar dunia, terjadinya perbedaan harga gula domestik dengan harga gula impor dunia terjadi karena adanya ketentuan PPh 10 persen bagi gula impor, biaya distribusi, pemasaran dan *management fee* yang dibebankan kepada masyarakat sehingga harga gula domestik relatif lebih tinggi dari harga gula impor dunia (Kompas, 22 Agustus 1996)

201. Sistem Kartel ini terjadi karena atas dasar menjaga stabilitas pasok gula, pemerintah melakukan intervensi dengan empat tindakan. Pertama melakukan pembelian 100 pesen gula yang diproduksi pabrik gula BUMN dengan harga *provenue*. Kedua, mengatur jumlah dan harga impor. Ketiga, menyalurkan gula dengan harga tertentu kepada para penyalur yang sudah ditunjuk. Keempat, dibantu pengecer mendistribusikan gula secara luas dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya.

barang dengan cara illegal dari negara tetangga, tentunya dengan dasar pemikiran bahwa margin keuntungan yang akan diperoleh oleh pelaku impor illegal tersebut cukup besar karena tidak dikenai ketentuan-ketentuan yang sifatnya dapat menambah pengeluaran biaya serta mengurangi margin keuntungan yang akan diperoleh.

Menyadari akan sistem yang dapat mendorong orang untuk melakukan praktek-praktek yang illegal (penyelundupan), maka pemerintah telah mengeluarkan **Paket Kebijakan 3 November 1997** yang berisi mengenai penghapusan tata niaga impor untuk produk-produk tertentu termasuk misalnya Gula Pasir, Bawang Putih, Kacang Kedelai dan Gandum.<sup>202</sup> Dengan kebijakan baru ini diharapkan nantinya meningkatkan efisiensi perekonomian, serta persediaan barang di dalam negeri tetap terjamin termasuk harganya yang bersaing dengan pasaran luar negeri. Sehingga pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi aktivitas illegal berupa memasukkan barang dari luar negeri (penyelundupan).

---

202. Dalam Paket Kebijakan 3 November 1997 diumumkan oleh Menperindag Ir. Tunky Ariwibowo, Menkeu Mar'ie Muhammad, dan Gubernur BI Soedradjad Djiwandono. Dalam Paket 3 November 1997 terdapat adanya deregulasi berbagai bidang dengan maksud utamanya adalah meningkatkan efisiensi perekonomian, sehingga menaikkan daya saing pasar global.

Khusus menyangkut kelancaran pengadaan barang dari luar negeri (termasuk gula dan Bawang putih), sistem tata niaga yang selama ini diberlakukan disederhanakan dengan Kep. Menperindag No. 406/MPP/Kep/11/97, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1998, sedangkan bagaimana mekanismenya diatur dalam Keputusan Menperindag No. 407/MPP/Kep/11/97 dimana Bulog ditunjuk sebagai distributor di dalam negeri, lalu mendistribusikan ke industri makanan, industri kecil, grosir, pengecer, dan konsumen.

### C. ANALISIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN

Dari apa yang telah diuraikan tersebut di atas, setidaknya-tidaknya dapat disimpulkan bahwa ternyata ada pergeseran motivasi dan makna dari aktivitas masyarakat perbatasan setempat (Entikong) sehubungan dengan kegiatan yang dilakukannya. **Pertama** kegiatan hanya merupakan manifestasi dari rasa keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup, **kedua** karena faktor geografis dalam arti bahwa keadaan dan jarak antara Entikong dengan ibukota Kabupaten (Sanggau) pada masa itu relatif dapat dikatakan masih terisolir.

Namun ternyata aktivitas tersebut mengalami perkembangan, baik yang menyangkut motivasi maupun tujuan yang hendak diperoleh dari kegiatan tersebut. Namun perlu digarisbawahi bahwa adanya perkembangan yang terjadi dari aktivitas masyarakat, ternyata dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang dapat mengubah persepsi masyarakat mengenai kegiatannya, seperti misalnya masyarakat mulai menyadari bahwa barang yang dibeli dari Malaysia ternyata merupakan salah satu barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi (misalnya Bawang Putih dan Gula Pasir).

Oleh karena itu adalah menarik untuk diketahui lebih jauh pergeseran makna dari aktivitas masyarakat ini yang pada satu sisi dapat dikategorikan sebagai penyelundupan yang tentunya mempunyai implikasi bahwa

perbuatan tersebut dapat dipidana karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995).

Dari suatu penelitian terlihat bahwa kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat ke Negeri Malaysia bukanlah satu-satunya jenis pekerjaan (Domain yang berkaitan dengan jenis) utama yang dilakukan oleh masyarakat (Entikong), karena bidang pertanian adalah bidang pekerjaan yang pada umumnya ditekuni oleh masyarakat setempat, disamping tentunya perkebunan, bahkan terlihat bahwa kegiatan tersebut merupakan pekerjaan sampingan yang mempunyai nilai ekonomis (dalam arti pendapatan) yang cukup besar.

Jenis barang yang dibeli masyarakat pada umumnya adalah jenis barang yang dapat dikategorikan dalam jenis barang konsumsi/pangan misalnya, barang sandang seperti baju (yang dikenal dengan istilah **Roma** kependekan dari Rombongan Malaysia) bahkan sampai barang-barang elektronikpun dapat dijadikan obyek masyarakat yang melakukan transaksi jual beli diperbatasan tersebut.

Yang cukup menarik dari jenis pekerjaan ini adalah bahwa ternyata jenis pekerjaan ini pada umumnya dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga atau oleh kaum wanita. Berbagai alasan (Domain yang berkaitan dengan rasional atau alasan) mengapa justru pekerjaan ini dilakukan oleh kaum wanita/ibu rumah tangga ditemui adalah antara lain bahwa

hal ini dilakukan sebagai salah satu wujud dari kesadaran kaum wanita/ibu rumah tangga untuk membantu para suami mereka dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>203</sup> Alasan lain yang sifatnya lebih praktis ditemui bahwa ternyata jenis pekerjaan ini dilakukan oleh kaum wanita/ibu rumah tangga adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi kemungkinan kesulitan yang dihadapi jika pekerjaan tersebut diketahui dan atau tertangkap oleh petugas. Karena menurut mereka para petugas (baik itu Kepolisian maupun pejabat Bea dan Cukai) jarang atau tidak akan mengambil suatu tindakan jika yang melakukan tersebut adalah kaum wanita/ibu rumah tangga.

Dalam melakukan aktivitasnya, masyarakat diperlengkapi dengan alat (Domain yang berkaitan dengan jenis peralatan yang digunakan) yang cukup sederhana yang dikenal dengan **pengambin**<sup>204</sup> yaitu wadah yang digunakan untuk membawa barang. Semula alat ini digunakan masyarakat untuk membawa benih padi yang akan ditanam atau disemai ataupun membawa hasil-hasil pertanian dan

---

203. Dari Penelitian yang dilakukan Oleh Drs. Bunyamin Ms, dkk. (op cit hal. 100 dst) memperlihatkan ternyata di Kalimantan Barat telah terjadi pergeseran kedudukan istri dalam rumah tangga, namun demikian kedudukan istri sebagai pendamping suami dalam mencapai apa yang disebut sebagai keluarga sejahtera tetap diakui keberadaannya semula. Salah satu pergeseran kedudukan ini adalah berupa perubahan dari sebagai pendamping suami menjadi partner yang turut aktif dalam kebijaksanaan rumah tangga, sungguhpun demikian status suami sebagai kepala rumah tangga tampaknya masih belum berubah.

204. Pengambin adalah suatu wadah yang terbuat dari anyaman bambu atau rotan, bentuknya semacam silinder dibagian atas dilengkapi dengan tali sebagai pegangan. Cara membawanya diletakkan di belakang badan dengan menyangkutkan talinya pada kepala atau bahu, seperti ransel.

perkebunan lainnya.

Barang-barang yang dibeli masyarakat dari Malaysia pada dasarnya dapat digolongkan pada dua jenis barang yaitu pertama barang yang sebelumnya sudah dipesan oleh pihak lain, dan kedua barang yang dibeli atas inisiatif masyarakat sendiri.<sup>205</sup> Khusus terhadap barang yang dibeli sendiri oleh masyarakat maka barang tersebut tidak langsung dibawa dan dijual dipasaran konsumen akhir, tetapi barang tersebut dibawa hanya pada batas daerah tertentu yang untuk kemudian barang tersebut dibawa oleh para pengangkut dengan menggunakan kendaraan roda dua (*Ojek*) melalui jalur utama ke terminal Desa Entikong.<sup>206</sup> Dari terminal desa Entikong ini barang tersebut dibawa dengan menggunakan kendaraan roda empat ke terminal Kecamatan Sekayam. Hal ini dilakukan karena seakan ada

---

205. Dari penelitian terhadap masyarakat (responden/ informan), Khususnya terhadap barang yang dibeli atas pesanan pihak lain, ternyata masyarakat tidak mengetahui secara pasti siapa dan untuk siapa barang tersebut dibeli, masyarakat biasanya hanya menerima dari orang yang mereka kenal sebelumnya. Akan tetapi orang tersebut tidak pernah mau memberitahukan untuk pihak siapa dia bekerja.

Hal ini jelas membuktikan bahwa dalam aktivitasnya ternyata terdapat jaringan yang menggunakan masyarakat sebagai salah satu alat untuk suatu kepentingan pihak tertentu guna memperoleh keuntungan di balik rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat.

206. Untuk menuju ke perbatasan Indonesia-Malaysia dengan menggunakan jalur/jalan darat harus dilalui dengan dua cara. Pertama jika menggunakan kendaraan roda empat baik kendaraan pribadi maupun Penumpang terutama dengan menggunakan jasa *travel*, maka kendaraan tersebut dapat secara langsung dari terminal kecamatan ke daerah perbatasan (*border gate*) tanpa harus berhenti dan mengganti kendaraan di terminal yang ada di desa Entikong. Kedua jika menggunakan kendaraan penumpang (yang bukan jasa *travel*), maka kendaraan tersebut harus berhenti di terminal Kecamatan Sekayam. Kemudian untuk dapat pergi ke daerah perbatasan harus menggunakan kendaraan penumpang roda empat (*oplet*) dan berhenti di terminal Desa Entikong untuk kemudian menggunakan jasa kendaraan roda dua (*Ojek*) untuk sampai ke *Border Gate* Indonesia-Malaysia.



semacam kesepakatan tidak tertulis antara masyarakat disatu pihak dengan para pengangkut (ojek) baik kendaraan roda dua maupun roda empat, sehingga menurut mereka akan terjadi pendistribusian pendapatan (**dalam bahasa mereka adalah bagi-bagi rezeki**) yang relatif merata diantara mereka yang bergerak disektor jasa angkutan.

Yang cukup menarik dari rentetan arus barang yang dibawa masyarakat sehingga dapat dikonsumsi oleh konsumen adalah ternyata pada saat barang tersebut dibawa dengan menggunakan kendaraan roda empat menuju terminal kecamatan Sekayam, maka sebelumnya harus melalui Pos Penjagaan Polisi (Kantor Polisi Sektor Kecamatan Sekayam), sehingga dari kondisi ini seyogyanya upaya pihak keamanan untuk secara dini mencegah masuknya barang-barang ilegal dari Malaysia sudah dapat dilakukan.

Namun realitasnya memperlihatkan keadaan yang sebaliknya justru antara masyarakat (pengangkut) sering terjadi semacam transaksi yang tidak resmi dengan para aparat.<sup>207</sup> Transaksi ini disatu pihak dapat digambarkan sebagai posisi yang tidak seimbang dalam arti bahwa

---

207. Transaksi ini terjadi melalui suatu pembayaran yang dilakukan oleh pihak masyarakat (terutama pengangkut) dengan sejumlah uang yang nilainya tidak dapat dipastikan sebelumnya, tetapi disesuaikan dengan sedikit banyaknya barang yang dibawa oleh masyarakat. Hal ini dilakukan oleh masyarakat karena menurut mereka (responden/informan) untuk memperlancar sampainya barang ini kepada pemesan. Sedangkan pembayaran ini tidak menggunakan kwitansi sebagai salah satu bukti pembayaran dan penerimaan yang dilakukan.

masyarakat dalam posisi dan kedudukan yang relatif lemah jika dibandingkan dengan pihak aparat sehingga kewajiban yang dibuat dan ditetapkan oleh petugas/aparat secara sepihak masyarakat akan berusaha untuk memenuhinya. Sedangkan pada sisi lain kiranya transaksi ini dapat digambarkan sebagai sikap toleransi sosial dari aparat yang sudah tidak dapat dibenarkan.

Adapun mengenai waktu masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan di Perbatasan adalah dilakukan pada waktu dini hari (sekitar jam 05.00 pagi), hal ini dilakukan **pertama** mengingat jarak yang ditempuh relatif agak jauh sedangkan untuk mencapai ke lokasi tersebut harus berjalan kaki, **kedua** juga menurut mereka untuk menghindari dari pengawasan petugas kedua negara. Sebab menurut mereka tidak jarang aktivitas mereka diketahui dan dilakukan operasi pengejaran oleh para petugas terutama petugas dari Malaysia.<sup>208</sup>

Tidak jarang masyarakat menemui kesulitan-kesulitan dalam melakukan aktivitasnya, kesulitan ini bisa dikarenakan kondisi alam maupun yang berasal dari non alami (Domain yang berkaitan dengan atribut/

---

208. Operasi pengejaran yang dilakukan oleh petugas kedua negara (terutama petugas dari Indonesia) di karenakan petugas ini mengkhawatirkan barang yang dibawanya atau barang yang menjadi obyek transaksi antara kedua masyarakat adalah yang dapat digolongkan obat-obat terlarang (misalnya Ganja, Heroin, opium dll.) namun apabila barang yang dibawa oleh masyarakat tersebut bukan barang yang dapat digolongkan obat-obat terlarang maka oleh petugas masyarakat tersebut tidak dilakukan tindakan lebih lanjut, misalnya berupa penangkapan.

karakteristik). Kondisi alam yang sering menjadi hambatan masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya adalah antara lain hujan, karena dimusim hujan jalan yang dijadikan jalur lalu lintas masyarakat untuk menuju ke Malaysia menjadi demikian berbahaya, terutama kondisi tanahnya yang licin, sehingga tidak ada upaya mengatasinya kecuali menghentikan untuk sementara waktu aktivitas mereka sampai waktu dimana musim hujan tidak ada lagi, dan sebagai kompensasinya masyarakat melakukan kegiatan lain dibidang pertanian/perkebunan yang memang merupakan pekerjaan pokok atau utama mereka.

Sedangkan kesulitan yang relatif sering timbul adalah yang berasal dari non alami, terutama yang datangnnya dari para petugas yang setiap saat siap untuk melakukan pengejaran. Namun demikian dapat dikatakan jarang sekali para petugas melakukan penangkapan terhadap mereka, kecuali jika barang yang mereka bawa dapat dikatagorikan sebagai barang obat-obatan terlarang. Untuk mengatasi kesulitan yang berasal dari petugas ini masyarakat memang memiliki kiat yang cukup ampuh menurut mereka yaitu dengan cara memberikan sejumlah uang kepada mereka (petugas) dan petugas sendiri dalam realitasnya tidak akan mengambil tindakan lanjutan sehubungan dengan ditemui masyarakat yang membawa barang dari Malaysia tersebut.

Dari apa yang telah diuraikan tersebut di atas

kiranya dapat disimpulkan bahwa aktivitas masyarakat yang melakukan kegiatan transaksi dengan masyarakat yang ada di Malaysia umumnya dilakukan oleh mereka dari kaum wanita, dan jenis pekerjaan ini pada dasarnya bukan merupakan pekerjaan utama yang ada pada masyarakat, tetapi merupakan pekerjaan sampingan yang dilakukan. Namun demikian walaupun pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan sampingan tetapi dari segi ekonomis, terutama yang menyangkut penghasilan yang mereka peroleh dari aktivitas tersebut relatif cukup besar jika dibandingkan dengan pekerjaan utama mereka. Pada satu sisi pekerjaan utama mereka ternyata tidak dapat memenuhi tingkat kebutuhan mereka yang semakin memperlihatkan peningkatan, sehingga dirasakan sebagai suatu beban ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat. Sedangkan pada sisi lain kiranya diakui masyarakat dengan keterbatasan yang mereka miliki terutama yang menyangkut pendidikan membuat mereka tertutup kemungkinan untuk masuk pada sektor lainnya (terutama sektor formal), sedangkan untuk melakukan kegiatan yang mengacu pada penciptaan lapangan pekerjaan baru diakui oleh mereka (masyarakat) adalah sangat tidak mungkin karena diperlukan keterampilan dan pengetahuan yang khusus disamping tentunya dana yang cukup besar.

Demikian juga dalam melakukan aktivitasnya ternyata masyarakat secara tidak disadari telah dijadikan alat oleh pihak lain dalam memperoleh keuntungan dibalik

aktivitas rutinitas yang dilakukannya, sehingga pada akhirnya dapat dikatakan bahwa kejahatan penyelundupan tersebut sudah mengarah pada bentuk kejahatan terorganisir (*Organized Crimes*)

Di samping itu kiranya dapat dikatakan bahwa aktivitas mereka dalam melakukan kegiatan tersebut sudah didominasi oleh kepentingan ekonomi dibandingkan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka saja, dan ini pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang rasional dari seseorang untuk melakukan pilihan atas sekian banyak alternatif pilihan yang merupakan tujuan individu.<sup>209</sup> Demikian juga halnya dengan keadaan dimana tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah dapat menciptakan berkembangnya sub kebudayaan delinkuen,<sup>210</sup> karena kondisi demikian dapat diartikan sebagai reaksi masyarakat dari kondisi kehidupan yang tidak mungkin diperolehnya serta merupakan respon-respon rasional dari masyarakat terhadap bekerjanya sistem ekonomi yang ditandai oleh persaingan serta pelbagai bentuk ketidakmerataan.

---

209. Lihat Catatan Kaki No. 107, hal.63.

210. Lihat Catatan Kaki No. 108, hal. 64.

#### D. ANALISIS TERHADAP PERILAKU KONSUMEN

Dewasa ini upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia sudah tidak mungkin dipenuhi sendiri, hal ini di samping tidak ekonomis juga hal tersebut tidak mungkin karena kebutuhan manusia setiap saat mengalami peningkatan terus menerus. Kebutuhan manusia terus mengalami peningkatan mulai dari yang sifatnya pemenuhan akan kebutuhan primer, sekunder sampai kebutuhan tersier (barang mewah). Demikian juga jenis suatu barang mengalami pergeseran tempat pada tingkat kebutuhan, pada waktu tertentu mungkin suatu barang masuk sebagai bagian dari kebutuhan tersier (mewah), namun pada waktu yang lainnya barang tersebut bergeser menjadi bagian dari kebutuhan primer. Hal ini pada satu sisi tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat yang pada akhirnya akan menggeser tingkat kebutuhannya pada tingkat yang relatif lebih tinggi.

Sebenarnya kesadaran akan ketidakmampuan dalam upaya memenuhi kebutuhan sendiri sudah lama disadari oleh manusia, terbukti dengan dilakukannya "**barter**" sebagai salah satu mekanisme pemenuhan akan kebutuhan suatu barang. Hanya terlihat dalam sistem barter barang yang dipertukarkan adalah barang yang mempunyai fungsi yang relatif sama. Sehingga pada barter ditemui para pihak pada posisi yang sama, artinya sama-sama membutuhkan barang, sehingga kemungkinan suatu pihak mengeksploitasi

pihak lain adalah hampir tidak mungkin, karena mereka mempunyai kedudukan yang sama, sebagai pihak yang sama-sama membutuhkan suatu barang sebagai upaya pemenuhan akan kebutuhan hidupnya.

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan suatu barang, serta dalam realitasnya manusia tidak mungkin mampu memenuhi sendiri kebutuhan tersebut, maka dalam perkembangannya dibutuhkanlah pasar sebagai suatu tempat pertemuan antara kebutuhan akan suatu barang dengan penawaran akan suatu kebutuhan. Bahkan dalam perkembangannya pasar juga diartikan sebagai tempat penawaran dan permintaan akan jasa.

Dalam pasar akan ditemui banyak sekali peralihan akan barang dan jasa dari seseorang kepada orang lain. Peralihan ini juga dapat berupa peralihan kepemilikan, peralihan untuk penikmatan atau peralihan untuk mencapai sesuatu sasaran tertentu, seperti sasaran komersial atau non komersial ataupun lain-lain alasan peralihan.

Struktur pasar yang berkembang dewasa ini memang sangat berbeda dengan pasar dalam sistem barter. Pihak-pihak yang bertemu melakukan penawaran dan permintaan dalam perkembangannya sudah tidak hanya bersifat individu atau orang perseorangan saja, tetapi sudah mengarah pada hubungan hukum antara individu dengan badan hukum (*corporate*) atau juga sesama badan hukum. Juga jika dilihat dari jumlah dan jenis barang memperlihatkan

keanekaragaman yang sangat bervariasi, dengan sistem penawaran dan penggunaan media yang semakin maju.

Struktur pasar yang demikian pada satu sisi jelas memperlihatkan arah perkembangan yang maju dalam sistem dan mekanisme pasar sebagai salah satu sarana dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia, namun pada sisi lain berkembangnya jenis pasar dan transaksi di atas dapat menimbulkan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Permasalahan tersebut mungkin ditimbulkan oleh pihak produsen<sup>211</sup> maupun pihak konsumen<sup>212</sup> sebagai pemakai/pengguna barang atau jasa, hal mana terjadi dikarenakan pada satu sisi kedudukan antara para pihak memperlihatkan ketidakseimbangan terutama pada posisi tawar menawar (*bargaining position*), dan pada sisi lain

---

211. Menurut Az. Nasution, SH, dalam bukunya *Konsumen dan Hukum*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1995, halaman 18-19 mengatakan bahwa setidaknya terdapat dua pihak yang saling berhubungan atau bermasalah, yaitu: pertama pihak penyedia barang atau penyelenggara jasa, kedua, pihak pemakai/pengguna barang atau jasa itu. Pada kelompok pertama, kelompok penyedia barang atau penyelenggara jasa, pada umumnya terlihat pihak berlaku sebagai:

- a. penyedia dana untuk keperluan para penyedia barang atau jasa (investor);
- b. penghasil atau pembuat barang/jasa (produsen dalam makna yang sebenarnya)
- c. penyalur barang atau jasa (distributor).

Sedang dalam kelompok kedua terdapat:

- a. pemakai atau pengguna (konsumen) barang atau jasa dengan tujuan memproduksi (membuat) barang atau jasa lain, atau mendapatkan barang atau jasa itu untuk dijual kembali (tujuan komersial), dan
- b. pemakai atau pengguna barang atau jasa (konsumen) untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya (untuk tujuan non-komersial).

212. Konsumen yang bertujuan memproduksi (membuat) barang atau jasa lain atau untuk mendapatkan barang atau jasa itu untuk dijual kembali disebut "*derived buyer*", "*derived consumer*", "*consumer of industrial market*" atau "*intermediate consumer*". Sedangkan konsumen yang bertujuan untuk digunakan sendiri biasanya dikenal dengan "*ultimate consumer*", "*final consumer*" atau "*end user*". Ibid. hal 19-20.



menyangkut orientasi atau idiologi masing-masing yang sangat berbeda.

Permasalahan-permasalahan yang timbul pada pihak produsen tersebut misalnya yang menyangkut jenis barang termasuk di dalamnya asal barang, keamanan barang, komposisi barang, mutu serta kualifikasi lain yang harus dipenuhi oleh seorang produsen, sedangkan pada pihak konsumen adalah yang menyangkut masalah prestasi yang harus dilakukannya.

#### **1. Analisis Prilaku Berdasarkan Pendekatan Kebutuhan Konsumen**

Meskipun terdapat adanya ketidakseimbangan kedudukan antara produsen disatu pihak dengan konsumen dipihak lain, namun antara keduanya memperlihatkan keadaan saling ketergantungan (interdependen) yang sangat erat sekali, sehingga keberadaan satu pihak tidak dapat dipisahkan dengan pihak lain, bahkan keberadaan satu pihak merupakan syarat mutlak adanya pihak lain.

Demikian pula dengan struktur fungsional terjadinya suatu tindak pidana tidaklah dapat dipisah antara pelaku kejahatan dengan korban serta adanya niat dari pelaku. Dalam kondisi tertentu peran korban sebagai pemicu terhadap kejahatan memang cukup dominan, artinya keberadaan dan kedudukan korban

sebagai faktor pendorong sehingga seseorang melakukan kejahatan memperlihatkan korelasi yang positif. Hanya permasalahannya memang sampai sejauh mana korban tersebut menyadari perannya sebagai faktor yang ikut berperan dalam suatu tindak kejahatan.

Konsumen sebagai suatu kelompok masyarakat yang dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan hayat hidupnya tidak lepas pula dari pola hubungan fungsional tersebut. Bahkan konsumen dapat dikatakan sebagai kelompok yang cukup rentan terhadap bentuk kejahatan korporasi yang bergerak dalam usaha pemenuhan akan kebutuhan konsumen.

Permasalahan konsumen sesungguhnya cukup kompleks, di dalamnya banyak terkait persoalan-persoalan yang tidak hanya bagaimana cara memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) dari konsumen, tetapi menyangkut berbagai hak yang mempunyai implikasi pada bidang-bidang lainnya, mulai dari bidang industri, perdagangan baik lokal maupun global, keamanan, sampai pada isu lingkungan hidup.

Menyadari akan hal tersebut, organisasi yang tergabung dalam konsumen internasional (*Consumer International*)<sup>213</sup> baru-baru ini telah mengadakan

---

213. Berakan Perlindungan Konsumen secara internasional mulai didirikan pada tahun 1980 yang bernama *International Organization of Consumers Union (IOCU)* oleh lima organisasi konsumen masing-masing dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Belgia dan Austria yang berkedudukan di Den

kongres pada tingkat internasional. Pada kongres tersebut dibicarakan berbagai macam isu global yang dihadapi oleh konsumen, misalnya mulai dari meningkatnya perdagangan global dan pada sisi lain terlihat konsumen juga harus menghadapi penggunaan pestisida secara berlebihan, penyuntikan hormon sentetik pada ternak, rekayasa genetik, sampai pada malpraktek di bidang kesehatan. Kondisi demikian merupakan bagian agenda dari sekian banyak agenda yang dibicarakan pada Kongres Konsumen Internasional XV yang berlangsung di **Santiago, Chili** yang dilaksanakan dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 November 1997.<sup>214</sup> Keadaan demikian semakin diperparah dengan tiadanya peraturan yang memadai terutama yang menyangkut perlindungan konsumen, sehingga membuat konsumen sangat rentan untuk dieksploitasi.

Dari pertemuan atau **Kongres Konsumen Internasional XV** ditutup dengan beberapa resolusi yang menyangkut berbagai bidang, mulai dari perlindungan konsumen, kecukupan dan keamanan pangan, standarisasi barang dan jasa, kesehatan yang dapat diakses semua orang, konsumsi yang ramah lingkungan,

---

...Continued...

Haag (Belanda).

214. Kompas, tanggal 4 dan 8 November 1997.

sampai pada keadilan dan transparansi di bidang perdagangan, ekonomi, serta kerja sama internasional. Resolusi ini didasarkan pada hak-hak yang dimiliki oleh konsumen.<sup>215</sup>

Dalam perlindungan konsumen diimbau kepada setiap negara harus memiliki peraturan perlindungan konsumen yang komprehensif dan diberlakukan efektif. Demikian juga sedapat mungkin pemerintah membuat peraturan yang ketat untuk mencegah masuknya teknologi beresiko tinggi tanpa ada evaluasi keamanan dan analisis dampak lingkungannya, yang disertai sanksi yang berat bila ada pelanggaran apalagi jika timbul korban. Di sisi lain disadari, pola konsumsi saat ini masih belum berwawasan lingkungan sehingga masih mengancam kelestarian alam, karena itu industri, pemerintah dan lembaga internasional serta pihak terkait lainnya perlu mengadopsi rencana aksi yang mendorong pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Sedangkan dibidang standarisasi barang dan jasa

---

215. Ternyata dalam perjalanannya pengertian dan jenis hak konsumen mengalami perkembangan, hal ini misalnya dapat diperbandingkan bahwa di Amerika sebagaimana dicanangkan oleh presiden Johnson pada tahun 1964 diintrodusir empat macam hak yaitu: Hak untuk memilih (*right to choose*), hak memperoleh produk yang aman (*right to safety*), Hak untuk memperoleh informasi (*right to informed*), dan hak untuk didengarkan suaranya (*right to be heard*), Lihat catatan kaki no. 119. Sedangkan pada Kongres Internasional Konsumen Internasional, telah diintrodusir beberapa hak baru yaitu antara lain: Hak untuk memperoleh lingkungan yang sehat, hak untuk memperoleh perbaikan, hak untuk mendapatkan pendidikan (Kompas, tanggal 4 dan 8 November 1997)

dipandang perlu oleh masyarakat Konsumen Internasional agar pemerintah menghasilkan desain yang aman, sesuai dengan keperluan dan kegunaan, serta jaminan perlindungan konsumen yang menyeluruh. Pada produk makanan misalnya, standardisasi mencakup informasi yang transparan dalam proses pengelolaan dan bahan baku yang tertulis dalam labelnya, terutama yang menyangkut hal-hal yang masih kontroversi seperti makanan iradiasi atau hasil rekayasa genetik. Sedangkan untuk obat-obatan standardisasi mencakup promosi penggunaan obat yang rasional sesuai dengan konsep obat esensial dari WHO, nilai terapeutik obat yang signifikan, aman dan sepadan dengan nilai uang yang dikeluarkan.

Pada tingkat global terutama yang menyangkut perdagangan, ekonomi dan kerja sama global, pemerintah dan badan-badan internasional dihimbau untuk mengurangi tarif dan hambatan pada perdagangan nontarif yang berdampak pada konsumen.

Kembali kepada persoalan keberadaan konsumen dalam struktur fungsional suatu tindak pidana kejahatan, dengan pendekatan kriminologi dapat dikatakan bahwa konsumen dapat merupakan salah satu sebab timbulnya suatu kejahatan, sedangkan dengan pendekatan viktimologi konsumen merupakan salah pihak yang cukup rentan menjadi korban suatu tindak pidana.

Hanya memang terkadang dalam realitiasnya konsumen kurang atau bahkan tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban dari suatu tindak pidana kejahatan, hal ini dikarenakan sifatnya yang abstrak sebagai korban, di samping juga adanya perbedaan persepsi mengenai pengertian korban pada konsumen.<sup>216</sup>

Salah satu jenis kejahatan yang sering melibatkan konsumen sebagai korban utamanya adalah kejahatan penyelundupan. Hal ini terjadi dikarenakan obyek penyelundupan adalah barang yang dilihat dari pendekatan ekonomi (*Economic approach*) merupakan barang yang pada umumnya dibutuhkan oleh pihak konsumen, sehingga kejahatan penyelundupan dapat dilihat sebagai suatu bentuk kejahatan yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari perilaku konsumen sebagai salah satu faktor pendorong terjadinya kejahatan penyelundupan.

Seperti diketahui bahwa dalam melihat bagaimana hubungan fungsioanal antara kejahatan penyelundupan dengan perilaku konsumen dilakukan dengan dua pendekatan utama yaitu *pertama* yang bertolak dari keinginan konsumen untuk memenuhi akan kebutuhannya (*economics approaches*), serta *kedua* didasarkan pada

---

216. Lihat Catatan Kaki No. 112 dan 113.

pendekatan hak (*right approachs*).<sup>217</sup>

Dengan pendekatan ekonomi dimaksudkan bahwa setiap individu/orang sangat memerlukan barang dan jasa (*goods and services*) sebagai perwujudan dari pemenuhan kebutuhan dirinya, dan barang yang dipilihnya adalah barang yang menurutnya bermanfaat serta yang diminati karena akan menyuguhkan kepuasan yang lebih besar dari barang yang kurang diminati.<sup>218</sup>

Dari penelitian yang dilakukan, terutama dengan mendasarkan pada pendekatan ekonomi, serta dengan menggunakan analisis domain (domain yang berkaitan dengan jenis), terlihat bahwa pada umumnya barang yang diminati oleh para konsumen adalah barang sandang dan pangan (terutama makanan yang dikemas dalam kaleng, mulai dari minuman segar/soft drink, buah-buahan, susu sampai pada jenis makanan).

Barang-barang tersebut memang secara mudah diperoleh konsumen baik pada pasar yang tersedia di daerah perbatasan (Pasar di Kecamatan Sekayam) maupun di pasar-pasar swalayan yang ada di Kotamadia Pontianak (domain yang berkenaan dengan lokasi).<sup>219</sup>

---

217. Lihat Hal 70-71.

218. Lihat catatan Kaki No. 120 dan 121.

219. Di Kotamadia Pontianak tercatat sekitar 6 Pasar Swalayan yang banyak menyediakan barang-barang tersebut yang berasal dari Negara Malaysia yaitu: Pasar Swalayan Pontisari, Harum Manis, Ligo Departemen Store, Mitra Anda, Baruda Mitra, Pasar Swalayan Metro.

Khusus terhadap barang-barang sandang berupa pakaian untuk memperolehnya tersedia pasar yang memang khusus menjual barang-barang tersebut. Namun demikian dari pengamatan yang dilakukan terlihat adanya perkembangan tempat untuk memperoleh barang-barang tersebut (sandang), yaitu pada gang-gang tertentu terlihat kios-kios yang secara khusus dibuat untuk menjual barang-barang sandang yang diperoleh dari hasil selundupan tersebut.<sup>220</sup>

Berbagai alasan (domain yang berkaitan dengan rasional atau alasan dan sebab akibat) ditemui sehingga mengapa seorang konsumen senang mengkonsumsi barang-barang yang berasal dari Malaysia tersebut. Umumnya mereka beranggapan bahwa dilihat dari segi kualitas memperlihatkan mutu yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan barang yang serupa yang berasal dari produk dalam negeri.<sup>221</sup> Di samping itu ada juga

---

220. Di Kotamadia Pontianak terdapat pasar yang secara khusus menjual pakaian-pakaian yang diperoleh dari hasil penyelundupan. Pasar tersebut biasanya dikenal dengan istilah "Pasar Tengah" dan barang yang dijual terutama pakaian dikenal dengan istilah "Barang Lelong". Menurut informasi yang peneliti peroleh terutama dari mereka yang menjual barang-barang dipasar tersebut, bahwa keberadaan pasar tengah sudah cukup lama (tetapi tidak dapat dipastikan tahun berapa pasar tersebut ada). Terlihat bahwa keberadaan pasar tersebut keberadaannya diakui oleh pihak yang berwenang, hal ini terbukti dengan dibayarnya retribusi oleh para pedagang kepada pihak Pemerintah Daerah (sebesar Rp 1000/hari), sedangkan pada sisi lain pihak yang berwajib mengetahui bahwa barang yang diperjualbelikan tersebut berasal dari barang selundupan.

221. Dari pengamatan penulis serta dari wawancara penulis dengan instansi terkait, terutama Bulog Kalimantan Barat, pada produk-produk tertentu memang dijumpai kualitasnya baik, seperti bawang putih, gula pasir relatif kualitasnya lebih baik dengan barang yang sejenis yang merupakan produk dalam negeri.



yang berpendapat barang yang konsumen beli adalah barang yang keberadaannya di Indonesia (khususnya Pontianak) susah didapat atau barang tersebut dianggap langka, sehingga upaya pemenuhan kebutuhan akan barang tersebut hanya dapat dilakukan dengan membeli barang-barang yang berasal dari luar negeri walaupun barang tersebut diketahui diperoleh secara illegal.<sup>222</sup>

Demikian juga yang menyangkut cara (domain yang berkaitan dengan cara), dalam hal ini dapat dibedakan pada dua cara pertama cara memperoleh barang tersebut dan kedua cara melakukan transaksi. Cara memperoleh barang tersebut dapat dengan cara pergi langsung pada pasar yang terdapat di Kecamatan Sekayam ataupun pergi di pasar-pasar yang terdapat di Kotamadia Pontianak yang secara khusus menjual barang-barang tersebut. Sedangkan cara melakukan transaksi antara konsumen dengan pihak penjual pada umumnya dilakukan secara tunai artinya transaksi tersebut mengikuti pola mekanisme pasar pada umumnya, dan konsumen biasanya datang sendiri pada tempat-tempat di mana barang-barang selundupan tersebut tersedia. Namun demikian di

---

222. Menurut Konsumen yang dijadikan informan atau responden dalam penelitian mengatakan bahwa produk atau barang (sekedar contoh seperti obat-obatan) tertentu yang berasal dari negeri Cina adalah lebih mempunyai daya kerja yang cukup baik untuk mengobati penyakit tertentu, dan obat-obat tersebut tidak tersedia di toko obat ataupun di apotik-apotik, tetapi hanya tersedia di toko obat tradisional Cina.

samping transaksi antara penjual dengan konsumen dilakukan secara tunai, pada hal-hal tertentu transaksinya juga dilakukan secara sistem kredit, konsumen melakukan pembayaran dengan beberapa kali.

Adalah menarik untuk diketahui bagaimana sebenarnya peranan berbelanja pada konsumen, apakah berbelanja masih dalam makna sebenarnya yaitu berupa upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, atau telah mengalami pergeseran makna semula.<sup>223</sup> Ternyata telah terjadi pergeseran makna berbelanja dikalangan konsumen, pada sisi tertentu berbelanja merupakan salah satu media hiburan, pemuasan diri, ikut terpengaruh kecenderungan baru.<sup>224</sup> Demikian juga pada motif sosial yang meliputi alasan seseorang melakukan transaksi pembelian barang-barang merupakan manifestasi dari pengalaman sosial di luar rumah, adanya pengaruh dari orang lain serta ada juga berbelanja barang-barang selundupan tersebut merupakan manifestasi dari status seseorang. Hal ini bertolak dari adanya asumsi yang berpendapat bahwa barang yang

---

223. Lihat catatan kaki no. 122

224. Adanya kecenderungan konsumen untuk mengikuti trend baru dalam upaya memenuhi kebutuhannya didasarkan pada kenyataannya bahwa umumnya konsumen mengetahui barang atau produk yang baru tersebut dari media Televisi Malaysia yang banyak menyiarkan produk-produk yang sifat dan jenisnya baru jika dibandingkan dengan produk yang ada di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena konsumen (Masyarakat Kal-bar pada umumnya) mempunyai antena parabola yang dapat menangkap siaran dari Malaysia, dan pada umumnya pula masyarakat Kal-Bar sangat gemar menonton tayangan yang disiarkan oleh Televisi Malaysia (RTH, TV1, TV2 dan TV3).

dibelinya tersebut merupakan barang impor dari luar negeri (Malaysia).

Memang terlihat adanya perbedaan tingkat dan jenis barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Dari penelitian dan analisis (terutama analisis komponensial) yang dilakukan terlihat barang-barang pangan umumnya diminati oleh ibu-ibu rumah tangga, sedangkan barang sandang peminatnya adalah mereka-mereka yang tergolong pada kaum pria, namun demikian terdapat juga ibu-ibu rumah tangga yang berminat terhadap barang-barang sandang tersebut.

Barang-barang pangan yang digemari oleh ibu-ibu rumah tangga misalnya gula pasir, bawang putih, barang-barang kiramik, mesin cuci, spring bed dan susu (*misalnya susu Ducht Lady, F&N*) sebagai pelengkap makanan yang diberikan kepada bayi. Sedangkan minuman ringan (soft drink, seperti coca-cola, seven up, dll.) dikonsumsi oleh konsumen pada hari-hari tertentu misalnya pada hari raya, natal dan tahun baru. Sedangkan barang sandang umumnya digemari oleh konsumen pria, terutama baju dengan berbagai macam merek (*misalnya cap crocodile, unbrella, levis*) yang harganya relatif dibawah harga pasaran resmi, dengan

kualitas yang relatif sama.<sup>225</sup>

Demikian juga tempat memperoleh barang-barang tersebut, khususnya untuk konsumen wanita (yang mengkonsumsi barang pangan) umumnya diperoleh dari Pasar Swalayan yang ada di Kotamadia Pontianak. Sedangkan untuk konsumen pria yang umumnya senang mengkonsumsi barang sandang mereka memperolehnya pada tempat-tempat atau pasar yang memang secara khusus menjual barang-barang tersebut, atau pada rumah tertentu yang secara khusus menyediakan barang-barang yang dibutuhkan, atau juga dapat diperoleh pada kios-kios yang ada diujung gang-gang disekitar Kotamadia Pontianak. Atau juga mereka langsung membeli di pasar-pasar yang ada di Kecamatan Sekayam.

## 2. Analisis Prilaku Berdasarkan Pendekatan Hak Konsumen (*Right Approach*)

Pendekatan lain di samping pendekatan ekonomi (*economic approach*) yang dapat memberikan klarifikasi keterkaitan antara kejahatan penyelundupan dengan keberadaan konsumen adalah dengan melakukan analisis terhadap hak-hak yang dimiliki oleh seorang konsumen.

---

225. Sebagai perbandingan murahanya barang yang berasal dari selundupan adalah bawang putih. Bawang putih yang berasal dari Malaysia tersebut (sampai dengan penelitian ini) dilakukan adalah Rp 2500/Kg, sedangkan untuk harga bawang di pulau Jawa (Terutama di Semarang) adalah Rp 5000 s/d 7000 perKg. Sedangkan pakaian dengan merek Crocodile dapat diperoleh dengan harga Rp 20.000 s/d 40.000 perhelainya, sedangkan untuk pasaran resminya dibeberapa Departemen Store seharga Rp 75.000 s/d 150.000 perhelainya.

Sebenarnya antara kedua pendekatan tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat, namun guna lebih sistematis di dalam pembahasannya dilakukan secara terpisah antara kedua macam pendekatan tersebut.

Analisis terhadap perilaku konsumen yang didasarkan pada pendekatan hak, dengan maksud berupaya mencoba melihat hubungan fungsional antara tindak pidana kejahatan penyelundupan dengan konsumen sebagai salah satu faktor penyebab (faktor kriminogen) timbulnya kejahatan dirasakan cukup sulit dan kompleks persoalannya.

Hal ini dikarenakan di dalamnya memiliki dimensi yang sangat luas dan komplek, di dalamnya akan terdapat unsur kesadaran (*awareness*) konsumen akan hak yang dimilikinya, sampai sejauhmana kemauan politik (*political will*) pemerintah dalam melindungi hak konsumen tersebut, sampai sejauhmana pengetahuan dan kesadaran produsen dalam memproduksi dan menyediakan barang dan jasa bagi konsumen dengan selalu mengingat akan hak konsumen, sampai kepada persoalan sejauhmana juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat (yang bergerak dalam perlindungan dan advokasi terhadap hak-hak konsumen) mampu meningkatkan kinerjanya dalam upaya meningkatkan kesadaran akan hak yang dimiliki oleh konsumen sampai pada usaha perlindungan yang diberikan.

Dimensi kemauan politik dari pemerintah termasuk di dalamnya adalah tersedianya peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan dan perlindungan akan hak konsumen terhadap berbagai bentuk eksploitasi yang mungkin dilakukan oleh produsen. Sedangkan pada sisi lain tentunya tersedia peraturan perundang-undangan yang memberikan kewajiban pada produsen agar memproduksi suatu barang memenuhi ukuran-ukuran standar yang telah ditentukan, baik mengenai standar bahan baku yang digunakan, cara memproduksi dan cara pengemasannya, sampai pada bagaimana memasarkan produk tersebut melalui sistem periklanan.

Demikian juga lembaga swadaya masyarakat yang secara eksklusif bergerak dalam perlindungan terhadap hak konsumen (Misalnya, YLKI) sangat berperan sekali dalam mengenalkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang dimilikinya, yang pada sisi lain juga akan memperlihatkan dimensi ketidakterikatan pada lembaga-lembaga pemerintahan, sehingga dalam aktivitasnya tidak hanya sebagai corong pemerintah tetapi juga tidak sebagai pihak yang berafiliasi kepada kepentingan produsen.

Antara konsumen disatu pihak, produsen dan lembaga swadaya masyarakat serta pihak pemerintah dipihak lain memperlihatkan keterkaitan yang sangat erat. Sebagai suatu lembaga yang bergerak khusus dalam

upaya perlindungan konsumen, Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai peranan yang cukup besar dalam upaya memberikan informasi dan pendidikan kepada konsumen mengenai hak-hak yang dimilikinya, pada sisi lain perintah tentunya melalui lembaga yang berwenang dapat memberikan pengakuan dan landasan hukum yang kuat terhadap hak konsumen tersebut agar konsumen mempunyai kedudukan yang sama kuat dengan produsen. Sehingga dengan demikian upaya pemahaman dan pengakuan terhadap hak akan konsumen pada dasarnya merupakan sarana etis dan hukum untuk melindungi individu, kelompok maupun golongan yang lemah terhadap kekuatan-kekuatan raksasa dalam masyarakat modern.<sup>226</sup>

Keheradaan dan kesadaran konsumen akan haknya terlihat sangat erat kaitannya dengan perkembangan kesadaran manusia pada umumnya terhadap keberadaan bumi dengan segala persoalan yang ada di dalamnya, sehingga semula hak akan lingkungan yang sehat misalnya belum mendapatkan tempat didalam serentatan hak yang dimiliki oleh konsumen, dewasa ini telah menjadi bagian daripada hak yang dimilikinya.<sup>227</sup>

Keberadaan dan kesadaran konsumen mengenai hak

---

226. Frans Magnis Suseno, Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Sosio-Kultural dan Relegi Di Indonesia, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Hak Asasi Manusia, Kerjasama Panitia Nasional HUT RI ke-50-KOHNAS HAM - UNDIP di Semarang, tanggal 10-11 Desember 1995, hal 10.

227. Lihat Catatan Kaki Nomor 104.

yang dimilikinya sangat terkait pada tahapan transaksi yang dilakukan oleh konsumen.<sup>228</sup> Tahapan yang terpenting dari serangkaian tahapan transaksi yang terjadi antara konsumen dan produsen adalah tahapan pra-transaksi, dimana transaksi secara yuridis belum terjadi, pada tahap inilah pengetahuan dan kesadaran konsumen akan haknya sangat diperlukan dalam rangka memenuhi hasrat kebutuhannya.

Pada tahap pra-transaksi ini hak memilih (*the right to choose*) dari konsumen sangat terlihat jelas, barang apa dan jenisnya pada tahap ini adalah salah satu contoh manifestasi dari hak penuh yang dimiliki oleh konsumen. Pada tahap ini informasi tentang barang atau jasa sangat memegang peranan penting, informasi yang benar dan bertanggung jawab (*informative information*) merupakan kebutuhan pokok konsumen sebelum ia dapat mengambil sesuatu keputusan untuk mengadakan, menunda atau tidak mengadakan transaksi bagi kebutuhan hidupnya. Sehingga hak memperoleh

---

228. Tahapan transeksi yang dilakukan oleh konsumen menurut Az. Nasution, S.H. ada tiga yaitu:

1. Tahap pra-transaksi konsumen.
2. Tahap transaksi konsumen.
3. Tahap purna-transaksi konsumen (Op cit, hal. 38)

Sedangkan pada kesempatan lain Az. Nasution, S.H. dalam bukunya Penulisan Karya Ilmiah Tentang Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Tahun 1995, hal 10 dan 16, mengatakan bahwa tahap transaksi yang dilakukan oleh konsumen ada dua, yaitu:

1. Tahap transaksi konsumen, dan
2. tahap purna-transaksi konsumen.



informasi yang benar

*(right to informed)* menjadi sangat penting dalam rangka memilih dan memutuskan barang dan jasa yang bagaimana yang merupakan kebutuhan yang harus dikonsumsi.

Hak untuk memilih dan memperoleh informasi yang benar dan bertanggung jawab ini juga inklusif di dalamnya terdapat hak konsumen untuk memilih produk-produk yang aman *(right to safety)* baik aman untuk dirinya pribadi maupun aman bagi lingkungannya.

Dari penelitian dan analisis yang dilakukan diperoleh keterangan bahwa pada umumnya konsumen tidak mengetahui hak-hak yang dimilikinya, terkecuali hak memilih yang dimanifestasikannya dalam bentuk keinginan dan kebebasan konsumen untuk menentukan barang atau produk apa yang akan dikonsumsi.<sup>229</sup>

Demikian juga halnya kesadaran konsumen akan haknya untuk memperoleh produk yang aman dan haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan bertanggungjawab. Pada umumnya konsumen pada saat menentukan dan memilih untuk membeli atau mengkonsumsi

---

229. Dari wawancara lebih dalam terhadap informan (responden penelitian) diperoleh keterangan bahwa konsumen kiranya tidak mau peduli terhadap hak yang ada padanya, yang terpenting adalah haknya untuk memilih barang yang mereka senangi. Bahkan dari penelitian yang dilakukan terungkap beberapa istilah yang merupakan pencerminan dari hak memilih *(right to choose)* dari konsumen misalnya "tergantung pada kita yang punya uang", "tidak mau pusing", "tidak mau susah-susah".

barang yang berasal dari Malaysia tersebut tidak membaca informasi **label** yang melekat pada barang tersebut baik menyangkut bahan dasar atau komposisi bahannya, mutu, jaminan akan kehalalan dari barang tersebut (untuk barang makanan), bagaimana barang tersebut diproduksi sampai pada waktu kadaluwarsa.<sup>230</sup> Di samping itu untuk barang-barang tertentu, terutama barang sandang (baju, celana dll) tidak tersedia label yang dijadikan informasi bagi konsumen untuk mengetahui segala aspek yang menyangkut barang tersebut.

Kondisi tersebut di atas pada dasarnya disebabkan oleh ketidaktahuan konsumen akan hak yang dimilikinya, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat kesadaran konsumen untuk mengaktualisasikan hak yang dimilikinya tersebut.<sup>231</sup>

---

230. Hal ini terjadi disamping dikarenakan sifat konsumen yang sudah begitu percaya terhadap produk luar negeri terutama yang menyangkut mutu, juga dikarenakan terbatasnya konsumen dalam pengetahuan terutama kemampuan bahasa asing (Bahasa Inggris, Cina dan Arab). Karena pada umumnya barang yang berasal dari Malaysia tersebut (barang selundupan) labelnya bertuliskan dengan menggunakan bahasa Inggris, bahkan untuk produk-produk tertentu menggunakan tulisan Cina dan Arab, sehingga informasi yang tertera di dalam label tersebut tidak dipahami oleh konsumen. Oleh karena itu konsumen seakan tidak mau peduli mengenai informasi yang tertera dalam label tersebut.

231. Dari penelitian terlihat bahwa konsumen memang tidak pernah mendengar akan hak yang dimilikinya baik dari instansi yang berwenang (pemerintah) maupun dari lembaga swadaya masyarakat (Lembaga Konsumen Indonesia Kalimantan Barat). Hanya hak memilih yang secara sadar diakui oleh para konsumen, sedangkan hak-hak lainnya dirasakan sesuatu hal yang baru bagi konsumen (responden/informan).

Kurangnya informasi dari pihak pemerintah serta Lembaga Konsumen Indonesia Kalimantan Barat dalam upaya memperkenalkan hak-hak konsumen merupakan salah satu kondisi penyebab sehingga para konsumen tidak mengetahui akan hak yang dimilikinya. Harus diakui bahwa aktivitas Lembaga Konsumen Indonesia Kalimantan barat masih bersifat pasif belum bersifat proaktif, dalam arti upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Konsumen Indonesia Kalimantan Barat baru terlihat setelah adanya keresahan dalam masyarakat menyangkut keberadaan baik yang menyangkut keamanan suatu produk.<sup>232</sup>

Oleh karena itu perlu kiranya peran aktivitas Lembaga Konsumen Indonesia (Kalbar) yang bersama-sama dengan pihak Pemerintah (Balai Pengawasan Obat dan Makanan) untuk secara bersama meningkatkan aktivitasnya guna lebih mengenalkan hak-hak yang dimiliki oleh para konsumen, sehingga konsumen yang merupakan kelompok masyarakat pada umumnya dapat terhindar dari eksploitasi kepentingan para pengusaha.

---

232. Sebagai salah contoh sikap pasif pihak Lembaga Konsumen Indonesia Kalimantan Barat terlihat akhir-akhir dengan diributkannya salah satu produk lokal berupa "Mie Kuning" yang diproduksi dengan menggunakan "Formalin" sebagai salah satu bahan baku untuk pengawetnya. Setelah timbul kecurigaan pada masyarakat dan menjadi isu yang cukup penting di Pontianak (sekitar bulan November 1997) baru pihak Lembaga Konsumen Indonesia Kalimantan Barat melakukan uji laboratorium pada Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura Pontianak terhadap produk tersebut dan menunjukkan hasil yang positif bahwa mie kuning tersebut mengandung formalin.

## E. ANALISIS TERHADAP PENEGAK HUKUM

Penegak hukum sebagai salah satu elemen dalam upaya memberantas kriminalitas di tengah-tengah masyarakat adalah besar sekali peranannya, disamping tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang jelas, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang semua tugas yang dibebankan pada penegak hukum. Bahkan dalam sistem peradilan pidana yang terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), peranan penegak hukum semakin memperlihatkan eksistensinya. Optimalisasi keberhasilan dapat dilakukan apabila dalam aktivitasnya terdapat adanya kesamaan persepsi serta memiliki tingkat koordinasi yang tinggi diantara sesama penegak hukum.

Disadari bahwa pembicaraan mengenai penegak hukum merupakan sesuatu yang krusial sifatnya, hal ini dikarenakan pada dasarnya membicarakan manusia dengan segala aspek dan keunikan yang ada pada dirinya. Sehingga tidak jarang ditemui bahwa dalam aktivitasnya sering ditemui adanya penyimpangan tujuan (*Displacement of goals*) semula, meskipun tujuan tersebut telah secara eksplisit dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu ciri hukum yang terdapat dalam negara modern, maka pelaksanaan hukum dalam masyarakat dijalankan oleh suatu institusi atau organisasi yang

secara khusus diciptakan guna kepentingan tersebut.<sup>233</sup> Institusi atau organisasi tersebut merupakan representasi dari berbagai kepentingan yang ada di dalam masyarakat, yang dalam realitasnya sudah direduksi bahkan terkadang memperlihatkan personifikasi kepentingan berbagai pihak di dalam institusi tersebut. Demikian juga dengan penyaluran kepentingan masyarakat telah mengalami batasan dan sistimatis prosedural yang harus dilalui, sehingga penyaluran akan kepentingan masyarakat tidak secara otomatis dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, tetapi harus melalui suatu institusi atau organisasi yang secara khusus dibentuk untuk kepentingan tersebut. Sehingga terjadi proses birokratisasi penyaluran kepentingan.

Artikulasi kepentingan yang ada dalam suatu negara yang dimanifestasikan pada suatu lembaga atau organisasi jelas memperlihatkan nilai kemanfaatan yang sangat besar, kemanfaatan yang mendasar adalah dihindarinya kondisi ketidakberadaban manusia di mana yang kuat akan memangsa yang lemah dan dapat mencerminkan tingkat peradaban manusia yang tinggi dan modern dimana situasi dan kondisi yang dapat memusnahkan eksistensi manusia dapat dihindari. Namun demikian sebaliknya bukanlah berarti artikulasi kepentingan yang dituangkan dalam organisasi

---

<sup>233</sup>. Lihat Catatan Kaki No. 136.

tidak menimbulkan permasalahan, bahkan terkadang permasalahan yang muncul sangat besar jika dibandingkan tercapainya tujuan dibentuknya organisasi tersebut.

Sebagai contoh misalnya dalam aktivitasnya-dengan pendekatan yuridis normativ-maka setiap institusi atau organisasi selalu berpijak pada ketentuan yang berlaku atas institusi atau organisasi tersebut, sehingga otoritas yang dimiliki suatu organisasi selalu dalam konteks legal rasional. Namun pada sisi lain sebagai suatu organisasi dalam aktivitasnya selalu mendasarkan pada nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu organisasi misalnya optimalisasi hasil yang hendak dicapai, rasionalitas, efisiensi. Nilai-nilai ini pada gilirannya dapat berbenturan dengan kerangka acuan yang secara yuridis formal telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga halnya dalam suatu organisasi peraturan ataupun norma yang diciptakan dapat mengenyampingkan atau bahkan menghilangkan tujuan utama dari dibentuknya organisasi tersebut.<sup>234</sup>

Persoalan internal keorganisasian atau institusi lainnya yang dapat berbenturan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya adalah kekuasaan dan ideologi birokratis atau nilai-nilai yang diakui bersama sehingga dapat mengaburkan persepsi-persepsi serta dapat

---

234. Lihat Catatan Kaki No. 138.

menciptakan penolakan terhadap perubahan-perubahan dengan jalan menjunjung tinggi status quo.<sup>235</sup>

Demikian juga halnya dengan upaya individu untuk mempertahankan akan kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang telah dilanggar serta penyaluran akan hak yang dimilikinya dalam upaya penegakan hukum telah diartikulasikan oleh suatu lembaga atau organisasi yang secara khusus diciptakan untuk kepentingan tersebut. Bahkan terlihat adanya karakteristik yang khas jika dibandingkan dengan lembaga lainnya yang sama-sama berupaya untuk memperoleh dan mempertahankan hak lainnya misalnya hak untuk pendidikan, hak beragama dan lain sebagainya. Karakteristik ini terlihat adanya banyak lembaga yang berbeda kedudukannya namun mempunyai peranan dan fungsi yang sama yaitu sama-sama bertujuan mempertahankan dan menegakan hukum. Misalnya lembaga kepolisian sebagai lembaga penyidik, Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan serta pengadilan sebagai suatu lembaga yang memberikan solusi terhadap pihak-pihak yang mengalami konflik.

Bahkan pada lembaga-lembaga tertentu misalnya Kejaksaan dan Pengadilan dalam realitasnya juga terbagai dalam berbagai lembaga (Misalnya Kejaksaan Negeri dan Tinggi), sedangkan Pengadilan ada Pengadilan Negeri,

---

235. Lihat Catatan Kaki No. 141 dan 142.

Tinggi serta Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang ada di dalam negara) yang memperlihatkan deferensiasi tugas yang berbeda walaupun dengan tujuan yang sama yaitu bertujuan menegakkan hukum.

Secara hirarkis institusi yang paling terdepan dalam upaya penegakan hukum adalah Kepolisian, dan dalam sistem hukum acara pidana dinyatakan bahwa polisi adalah merupakan penyidik tunggal yang keberadaannya diakui oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun demikian di samping Polisi sebagai penyidik tunggal, di dalam KUHAP sendiri diakui adanya Penyidik diluar instansi Kepolisian yaitu yang dikenal dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang keberadaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengangkat pegawai negeri sipil tersebut sebagai penyidik yang diberi wewenang melakukan penyidikan bagaimana layaknya kepolisian.<sup>236</sup>

Sistem demikian yaitu adanya penyidik pegawai negeri sipil di samping kepolisian, pada suatu sisi merupakan suatu sikap yang bijaksana dalam upaya memberantas kejahatan. Hal ini dikarenakan bahwa kejahatan dewasa ini telah memperlihatkan bentuk dan jenis yang sangat kompleks sekali, sehingga diperlukan

---

236. Pasal 1 butir 1 KUHAP mengatakan, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.



tingkat profesionalisme yang tinggi dan spesialisasi yang semakin beragam. Sedangkan pada sisi lain hal ini adalah merupakan hal yang dirasakan tidak mungkin untuk dipenuhi oleh kepolisian, sehingga salah satu jalan keluarnya adalah diakuinya pegawai negeri sipil tertentu sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan terhadap bentuk kejahatan yang sifatnya khusus.

Salah satu instansi yang keberadaannya sebagai lembaga penyidik di luar lembaga Kepolisian adalah **Bea dan Cukai**. Wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap kejahatan yang sifatnya khusus (penyelundupan) secara yuridis formal dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 ini, berarti untuk tindak pidana penyelundupan lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan serta tindakan hukum lainnya adalah **Bea dan Cukai**.

Adanya pegawai negeri sipil yang diberi wewenang melakukan penyidikan bukan berarti tidak menimbulkan permasalahan di dalam prakteknya, masalah persamaan persepsi dan koordinasi adalah sekian banyak masalah yang ada sehubungan dengan adanya lembaga lain yang mempunyai wewenang dalam bidang yang sama, apalagi dalam konteks **Integrated Criminal Justice System** yang keberadaan lembaga tersebut berupaya merespon kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga terkadang sering menimbulkan

persoalan teknis prosedural yang berkepanjangan yang pada akhirnya mempunyai dampak pada kepercayaan masyarakat pada instansi penegak hukum semakin berkurang.<sup>238</sup>

Demikian juga masalah yang sering timbul dengan diberikannya wewenang yang sama pada dua institusi yang berbeda adalah masalah koordinasi. Menurut **Ateng Syafrudin** kebutuhan akan koordinasi ini diakibatkan adanya *divergerende invloeden* atau kekuatan-kekuatan yang memencar yang hidup dalam lingkungan institusi yang mempunyai wewenang yang sama.<sup>239</sup> hal ini dikarenakan institusi-institusi tersebut merasa mempunyai kewenang atau juga institusi tersebut merasa tidak berwenang lagi untuk mengurus suatu persoalan yang menurutnya bukan menjadi wewenangnya tersebut.

Besarnya peranan koordinasi antara sesama aparat penegak hukum dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan (penyelundupan) dalam rangka Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) adalah sangat penting

---

238. Salah satu contoh tidaknya adanya persepsi yang sama antara instansi yang mempunyai kewenangan yang sama serta kurangnya koordinasi adalah antara Kepolisian dan Kejaksaan yang menangani kasus korupsi dari tiga mantan direktur Bank Indonesia. Kepolisian melalui Kadit Serse Polda Metro Jaya sebagai juru bicaranya tetap bersikeras bahwa yang berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi adalah pihaknya, sedangkan kejaksaan melalui Jaksa Agungnya Singgih tetap mengatakan bahwa yang berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi adalah instansinya dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

239. Dr. Ateng Syafrudin, SH, *Pengaturan Kordinasi Pemerintahan di Daerah*, Penerbit Tarsito Bandung, Tahun 1976, hal. 68

sekali,<sup>240</sup> oleh karena itu masalah ordinasi ini menjadi salah satu item yang mendapatkan perhatian dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, hal ini terbukti dengan diaturnya hal tersebut dalam Pasal 76 ayat (1 dan 2 ) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang mengatur bahwa Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta bantuan pada angkatan bersenjata dan/atau instansi lainnya, dan instansi yang dimintai bantuan tersebut berkewajiban untuk memenuhinya.<sup>241</sup> Dengan adanya ketentuan tersebut tentunya diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara para penegak hukum (misalnya antara Bea dan Cukai dengan Kepolisian dan Angkatan Bersenjata) dalam upaya memberantas kejahatan penyelundupan.

Wewenang yang diberikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan suatu lembaga dibawah Departemen Keuangan dalam perspektif hukum pidana cukup besar, dalam arti bahwa wewenangnya tidak berbeda dengan Kepolisian yang dalam tugasnya juga dapat diperlengkapi dengan senjata api. Besarnya wewenang ini terlihat dengan diberikannya kewenangan oleh Undang-Undang kepada Bea dan Cukai untuk

---

240. Lihat Catatan Kaki No. 149.

241. Pasal 76

- (1) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta bantuan angkatan bersenjata dan/atau instansi lainnya.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angkatan bersenjata dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinya.

mengambil **tindakan yang diperlukan** (garis bawah oleh pen) guna mengamankan hak-hak negara (pasal 74 ayat 1). Hal ini tentunya selalu terbuka kemungkinan bagi penegak hukum untuk melakukan diskresi atas pelaksanaan tugasnya meskipun sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, karena undang-undang sendiri memberikan kemungkinan untuk hal itu.

Demikian juga dalam bidang bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan, Direktorat Bea dan Cukai mempunyai wewenang dan kekuasaan yang penuh dan otonom. Mulai dari penyelidikan sampai pada penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan dan juga tindakan hukum yang diperlukan misalnya pengawasan dan penyegelen (pasal 78 s/d 81), pemeriksaan atas barang impor dan ekspor terhadap barang (pasal 82 s/d 85), pemeriksaan pembukuan (pasal 86), pemeriksaan bangunan dan tempat lainnya (pasal 87 s/d 89), pemeriksaan sarana pengangkut (pasal 90 s/d 91) dan pemeriksaan badan (pasal 92). Bahkan Direktorat Bea dan Cukai juga diberi wewenang untuk melakukan penghentian penyidikan.

Permasalahan yang sering timbul sehubungan dengan besarnya wewenang yang dimiliki oleh pihak Direktorat Bea dan Cukai ini adalah selalu terbukanya penyimpangan tujuan (*Displacement of goals*) semula diberikannya wewenang tersebut dan bahkan penggunaan wewenang yang tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.<sup>242</sup> Akibat lain yang mungkin muncul sebagai akibat besarnya wewenang yang dimiliki oleh suatu institusi adalah kemungkinan interpretasi terhadap undang-undang tidak didasarkan pada interpretasi otentik/resmi sebagaimana penafsiran yang diberikan dan dikehendaki oleh undang-undang, tetapi penafsiran tersebut sudah didasarkan pada kepentingan institusi bahkan sampai pada kepentingan pribadi para *law enforcement*.

Dari penelitian hal ini terlihat misalnya pada saat memberikan atau menetapkan sanksi administratif berupa denda kepada pelaku tindak pidana penyelundupan tidaklah didasarkan pada pemikiran bahwa tindakan tersebut sesuai dengan asas dalam hukum pidana sendiri, misalnya asas *subsideritas* yang sedapat mungkin dihindari penggunaan sanksi pidana penjara terhadap pelaku kejahatan, serta tidak didasarkan pada kerangka pemikiran bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remidium*. Tetapi sebaliknya penjatuhan sanksi administratif berupa denda pada pelaku penyelundupan didasarkan pada pemikiran bahwa pertama undang-undang memberikan ketentuan sebagaimana tersebut

---

242. Banyaknya pelaku pelintas batas yang tidak dilakukan penangkapan dan penyidikan terhadap aktivitasnya yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan merupakan salah satu indikasi dari penggunaan wewenang yang tidak mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Demikian juga penerapan sanksi administratif terhadap pelaku-pelaku penyelundupan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang tergolong pada korporasi dengan maksud sebagai usaha menyelesaikan kejahatan penyelundupan, hanya didasarkan pada diskresi yang diakibatkan oleh wewenang yang besar yang dimiliki oleh institusi ini.

dalam pasal-pasalnya dan kedua adanya semacam kepentingan yang terselubung dari alasan penjatuhan sanksi tersebut, sebagai contoh ingin memperoleh sedikit margin keuntungan yang diperoleh para pelaku.

Sikap demikian tentunya mempunyai konsekwensi pada sulitnya memberantas aktivitas penyelundupan, bahkan akan memperlihatkan peningkatan aktivitas, karena hal ini disebabkan efek atau sasaran (adressat) hukuman atau sanksi sebagai *general prevention* tidak bekerja dengan baik.

#### **F. ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP UU NO. 10 TAHUN 1995**

Secara yuridis formal pengaturan masalah delik penyelundupan telah mengalami perubahan dari yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi, kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Undang-Undang ini (UU No. 10 Tahun 1995) terdiri dari 18 Bab dan 118 Pasal, dan disahkan pada tanggal 30 Desember 1995 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995, dan dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 April 1996. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tersebut, maka ketentuan tentang Kepabeanan yang selama ini masih mengacu kepada peraturan warisan kolonial mulai tanggal 1 April 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi, peraturan yang dinyatakan tidak berlaku tersebut adalah:

1. Undang-Undang Tarif (Staatsblad Tahun 1873 No. 35) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Rechten Ordonnantie Stb Tahun 1882 No. 240 sebagaimana telah diubah dan ditambah;
3. Tarief Ordonnantie Stb 1919 No. 628 sebagaimana telah diubah dan ditambah (Bab XVIII Pasal 117)..

Dengan diundangkannya UU No. 10 Tahun 1995 ini diharapkan dapat ditingkatkan peran masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran Bea Masuk dan menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan dokumen sehingga mendorong iklim laju pembangunan nasional, yang merupakan suatu kondisi yang

mutlak diciptakan dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan hukum ekonomi pada umumnya dan tindak pidana di bidang ekonomi pada khususnya dipengaruhi oleh kondisi-kondisi ekonomi internasional di samping sistem ekonomi negara.<sup>243</sup>

Jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, maka terlihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 ini, baik prosedural maupun substansial terlihat adanya beberapa kemajuan terutama dalam proses impor dan ekspor. Diantara kemajuan ataupun perubahan yang cukup mendasar tersebut antara lain adalah:

1. Yang menjadi subyek hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 bukan hanya orang saja, tetapi juga badan hukum sudah merupakan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum pidana (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12).
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 menganut azas *self assessment*, artinya importir diberi kewenangan menghitung sendiri besarnya bea masuk yang menjadi kewajibannya untuk dibayar ke Kas Negara.
3. Berdasarkan Undang-Undang ini Bea Cukai berwenang melakukan pemeriksaan barang-barang impor di pabean. Pemeriksaan pabean ini meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Sedangkan untuk barang ekspor hanya diperiksa melalui dokumen, kecuali dalam hal tertentu pemeriksaan dapat dilakukan secara fisik.

Dinyatakannya secara tegas badan hukum (pasal 1 angka 12) sebagai subyek hukum yang dapat dipidana, merupakan antisipasi dan pengakuan dari Undang-Undang yang melihat perkembangan kejahatan dalam bidang ekonomi

---

243. Muladi, Konsep Indonesia Tentang Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian. Bahan Penataran Nasional Hukum Indonesia-Belanda di Bandung, 2-22 Desember 1991.



tidak hanya dilakukan oleh orang saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh badan hukum atau korporasi (*Corporate Crime*), sehingga dengan demikian secara hukum persoalan apakah korporasi dapat dipidana jika melakukan kejahatan-terutama penyelundupan-bukanlah merupakan permasalahan lagi, hanya mungkin persoalannya sampai sejauhmana korporasi tersebut mampu untuk dimintai pertanggungjawabannya secara hukum pidana, dan ini tentunya menyangkut pelaksanaan dari perundang-undangan serta banyak terkait kepada persoalan lainnya.

Khusus terhadap penyelundupan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 mengaturnya dalam Bab XIV Tentang Ketentuan Pidana dalam Pasal 102 yang menyatakan bahwa:

Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan *penyelundupan* dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Di samping mengatur masalah penyelundupan seperti pada pasal 102, UU No. 10 tahun 1995 juga mengatur mengenai pemberian sanksi terhadap keterangan baik lisan maupun tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan Kewajiban Pabean (Pasal 103 huruf a). Demikian juga terhadap mereka yang mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean atau dari tempat Penimbunan Berikat, tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan/atau

pengutan negara lainnya dalam rangka impor, serta membuat, menyetujui atau turut serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/ atau denda paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (Pasal 103 huruf b.c.)

Demikian juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tidak hanya mengancam dengan pidana terhadap mereka yang melakukan penyelundupan sebagaimana yang diatur dalam pasal 102 tersebut, tetapi juga terhadap mereka yang menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, berdasarkan pasal 103 huruf d. dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Apabila dilihat dari isi pengaturan pasal 103 tersebut maka terlihat yang dimaksudnya adalah salah satunya konsumen sebagai pihak yang mengkonsumsi barang-barang yang berasal dari tindak pidana penyelundupan tersebut. Sehingga dari sisi pengaturannya terlihat jelas adanya integralitas pihak yang dapat dipidana, bukan hanya pelaku penyelundupan saja yang dapat dipidana tetapi konsumen juga secara yuridis formal dapat dipidana karena menggunakan barang-barang dari hasil

penyelundupan.

Dari analisis yang dilakukan ternyata terdapat perbedaan yang cukup prinsipil mengenai kualifikasi dari jenis tindak pidana penyelundupan ini. Sebelumnya seperti diketahui bahwa dibawah pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955, tindak pidana penyelundupan dikualifikisir sebagai tindak pidana ekonomi, namun berbeda dengan UU No. 10 Tahun 1995 tindak pidana penyelundupan sebagaimana yang diatur dalam pasal 102 secara yuridis formal bukanlah merupakan tindak pidana ekonomi, sehingga dapat dikatagorikan sebagai jenis tindak pidana biasa bukan tindak pidana khusus, hal mana dikarenakan tidak secara tegas dinyatakan sebagai suatu tindak pidana ekonomi.

Namun demikian jika dilakukan analisis yang mendalam terhadap substansi UU No. 10 Tahun 1995 terlihat bahwa ternyata pada hakekatnya UU No. 10 Tahun 1995 mengatur masalah hukum perekonomian pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari konsideran menimbang Undang-Undang tersebut<sup>244</sup> yang pada dasarnya mengatur masalah

---

244. Dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan dalam Konsideran Menimbangya antara lain mengatakan:

- a. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian (*garis bawah oleh pen*), termasuk bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional;
- b. bahwa dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan seperti tersebut di atas (*maksudnya perkembangan dalam bidang ekonomi-pen*) dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam garis-garis besar daripada haluan Negara dan agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek Kepabeanaan bagi bentuk-bentuk dan pabrik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangka antisipasi atas

perekonomian baik pada tataran nasional maupun global. Berdasarkan substansi yang diaturnya dapat kiranya disimpulkan bahwa kejahatan yang ditimbulkan dalam bidang Kepabeanan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan dalam bidang ekonomi.<sup>245</sup>

Sehubungan dengan persoalan sampai sejauhmana peraturan perundang-undangan dapat merupakan faktor kriminogen, tentunya menyangkut banyak masalah yang harus dipenuhi suatu peraturan yang baik, baik yang menyangkut persyaratan formal maupun substansial. Seperti diketahui bahwa perundang-undangan pada dasarnya secara tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan apabila ada ketidakkonsistenan antara Undang-Undang dengan kenyataan. Semakin jauh Undang-Undang bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum itu. Sehingga hukum perlu didukung oleh sentimen publik.<sup>246</sup>

Agar hukum mampu mencapai tujuan yang telah

---

...Continued...

globalisasi ekonomi, diperlukan langkah-langkah pembaruan;

- c. bahwa peraturan perundang-undangan Kepabeanan yang selama ini berlaku sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional dalam hubungannya dengan perdagangan internasional (*garis bawah oleh pen*).

245. Pendapat ini bertolak dari pengertian Hukum Perekonomian sebagai keseluruhan peraturan, khususnya yang dibuat oleh pemerintah atau badan pemerintah, yang secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk mempengaruhi perbandingan ekonomi dipasar-pasar. Pasar dalam arti pertemuan antara penawaran dan permintaan. Sudarto, Op cit, hal. 81.

246. Lihat Catatan Kaki No. 157 dan 158.

ditetapkan (fungsi manifest)<sup>247</sup>, maka minimal hukum tersebut haruslah memenuhi persyaratan yang menurut Soerjono Soekanto<sup>248</sup> antara lain:

1. Sampai sejauhmana undang-undang tersebut memenuhi azas-azas yang berlaku universal.
2. Suatu masalah lain yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya pelbagai Undang-Undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, pada hal di dalam Undang-Undang tersebut diperintahkan demikian.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Pada sisi lain dikemukakan pula empat hal yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak yang positif, yaitu:

- a. hukum positif tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang selaras;
- b. para penegak hukum harus mempunyai keperibadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum;
- c. fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum harus memadai; dan
- d. warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum.<sup>249</sup>

Di samping itu khusus terhadap sanksi pidana, faktor yang perlu diperhitungkan dalam menentukan efektifitasnya adalah antara lain:

- a. karakteristik atau hakekat dari sanksi itu sendiri;
- b. persepsi warga masyarakat dalam menanggung resiko;
- c. jangka waktu penerapan sanksi pidana itu;

---

247. Lihat Catatan kaki No. 156 dan 157.

248. Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit CV. Rajawali Jakarta cet-I, Tahun 1983, hal. 10.

249. Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah sosial, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal. 20-25.

- d. karakteristik dari orang yang terkena oleh sanksi;
- e. peluang-peluang yang memang (seolah-olah) diberikan oleh suatu kebudayaan masyarakat;
- f. karakteristik dari pelaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif itu;
- g. keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan.<sup>250</sup>

Dari pendapat tersebut di atas, terlihat bahwa upaya untuk mengefektifkan hukum ataupun sanksi pidana sangatlah kompleks sifatnya. Efektivitas tersebut bisa bersumber pada hukum itu sendiri, maupun pada kondisi ekstern baik masyarakat sehingga menyangkut banyak aspek sosial budaya di dalamnya, maupun para penegak hukum sendiri yang merupakan kunci utama terhadap tegaknya suatu peraturan.

Dengan melakukan penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, terlihat adanya minimal dua persoalan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu antara lain:

#### 1. Ketentuan sanksi

Jika diamati ternyata ada pergeseran peranan hukum pidana yang semula bersifat tradisional atau yang biasa disebut *Fundamentalist Approach* ke arah pendekatan yang berorientasi pada **kemanfaatan**. Dikatakan bersifat tradisional dikarenakan fungsi hukum pidana selalu diarahkan untuk mempertahankan dan melindungi nilai-nilai moral yang hidup dalam

---

250. Soerjono Soekanto, **Dampak Hukum Terhadap Pola Perilaku Manusia**, Masalah-Masalah Hukum No. 5-6 Tahun XII, 1982, hal. 25-26.

masyarakat, sehingga berimplikasi pada adanya kesalahan merupakan unsur utama dalam menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana.

Sedangkan fungsi yang berorientasi pada kemanfaatan dilandasi pemikiran bahwa sanksi yang berat dianggap merupakan salah satu dari sekian banyak sarana yang oleh masyarakat dapat digunakan untuk melindungi dirinya dari perilaku yang dapat membahayakan masyarakat, sehingga sanksi pidana dapat menciptakan kondisi yang lebih baik.<sup>251</sup>

Atas dasar kemanfaatan dan asumsi yang melatarbelakanginya, maka peranan hukum pidana dalam hampir segala lapangan kehidupan memperlihatkan peranan yang cukup besar, misalnya hukum pidana digunakan sebagai penopang pengaturan dalam bidang administrasi (*Administrative Penal Law*). Bahkan Menurut Mr. J.C. Oudijk, keberhasilan atau kegagalan upaya penegakan peraturan hukum sangat tergantung kepada sanksi pidana yang tersedia dan cara bagaimana sanksi tersebut

---

251. Muladi, Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi, Makalah Dalam Panel Diskusi Hukum dan Perkembangan Ekonomi, Himpunan Mahasiswa Jurusan Pidana FH. Undip, Semarang, 25 September 1989.

didayagunakan.<sup>252</sup>

Dalam hal demikian maka pemidanaanpun dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat dan tidak atas dasar kesalahan subyektif, sehingga pada tataran ini memunculkan pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dikenal dengan "*Strict Liability*" yang meninggalkan asas *mens rea* sebagai refleksi kecenderungan untuk menjaga keseimbangan kepentingan sosial.<sup>253</sup>

Dalam sistem hukum minimal dikenal adanya tiga sistem sanksi yang dapat dikenakan kepada seorang yang dianggap telah melakukan tindak pidana, sanksi tersebut antara lain sanksi hukum perdata, sanksi hukum administrasi dan sistem sanksi hukum pidana. Kapan dan bilamana ketiga sanksi tersebut dikenakan pada seseorang, hal ini sangat tergantung pada pembuat undang-undang. Demikian juga tidak adanya kemutlakan dalam menggunakan sanksi yang mana dari ketiga sanksi tersebut, artinya ketiga sanksi tersebut dapat dipergunakan secara bersamaan dalam suatu undang-undang.

Ketiga sistem sanksi tersebut mempunyai

---

252. Mr. J.C. Oudijk, Peran dan Fungsi Sanksi Di dalam Hukum Pidana Ekonomi Mengenai Lingkungan (Judul Asli: *De sancsies in het economisch willeustrafrecht*) Dalam Prof. Dr. D. Schaffmeister. Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek), Penerjemah Tristam P. Moeliono, S.H. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, cet-1, Tahun 1994, hal.407.

253. Ibid.



mekanisme kerja dan efek yang berbeda antara satu sistem dengan sistem sanksi lainnya. Namun demikian ketiga sistem sanksi tersebut jika didekati dengan tujuan dari sanksi jelas mempunyai tujuan yang sama, baik sebagai "*General Prevention*" maupun "*Special Prevention*".

Fungsionalisasi atau pemberdayaan hukum pidana terhadap kejahatan dalam bidang ekonomi sangat diperlukan sehubungan dengan luasnya dampak kejahatan tersebut terhadap keseluruhan tatanan kehidupan bernegara, terutama tatanan kehidupan ekonomi. Besarnya peranan sanksi pidana dalam mengantisipasi kejahatan yang bernuansakan ekonomi secara Internasional telah diakui oleh Masyarakat Internasional, yang tertuang dalam *Guiding Principles for Crime Prevention And Criminal Justice in The Context of Development And A New Economic Order*.<sup>254</sup>

Banyak pendapat meragukan efektivitas daya kerja menakuti (mencegah atau menangkal) dari beratnya bobot ancaman pidana, hal mana pada satu sisi dapat dikarenakan pelaku ataupun calon pelaku tidak mengetahui berat ringatnya ancaman pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan, dan pada sisi lain terhadap pelaku tindak pidana yang bermotifkan ekonomi

---

254. Lihat Catatan Kaki No. 164

sebagai latar belakang utama dalam aktivitasnya memang sudah memperhitungkan segala keuntungan dan kerugian terhadap aktivitas yang dilakukannya.

Analisis Ekonomi dari hukum pidana<sup>255</sup> yang mendasarkan diri pada asumsi bahwa pelaku tindak pidana selalu berupaya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena itu, pelaku tindak pidana sebelum memutuskan sesuatu selalu mempertimbangkan untung rugi dari keputusannya tersebut. Bila tindak pidana, dalam hal ini mengandung kemungkinan untuk menghasilkan saldo keuntungan, maka calon pelaku akan cenderung memutuskan untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, maka persoalan tersebut di atas terutama sanksi yang ada dalam suatu Undang-Undang yang mengancam terhadap tindak pidana (dalam hal ini penyelundupan) yang bermotivkan ekonomi haruslah mampu mencerminkan tingkat kerugian yang besar daripada keuntungan yang diperoleh jika tindak pidana tersebut dilakukan. Hal ini berarti hukuman denda tentunya mendapatkan tempat yang cukup penting, disamping sanksi berupa perampasan kemerdekaan berupa penjara sebagai *ultimum remidium* perlu juga mendapatkan perhatian dalam melakukan fungsinya sebagai salah satu

---

255. Ibid, hal. 412.

sarana pencegah yang sifatnya umum (*General Prevention*).

Besarnya peranan pidana denda dalam Undang-Undang pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pidana yang bermotivkan ekonomi dari sudut pandang ekonomi sangatlah menarik, hal ini dikarenakan *pertama* pidana denda langsung tertuju pada hasrat kerja (mencari atau memperoleh keuntungan) calon pelaku. *Kedua* merupakan pidana dengan biaya murah dan karena itu dari sudut ekonomis dapat dipertanggung-jawabkan, dan *Ketiga* tentunya dengan mendasarkan pada sifat hukum pidana sebagai ultimum remidium, sehingga upaya pengenaan sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan (penjara) hendaknya haruslah memenuhi asas *subsidiaritas*, dan walaupun harus dijatuhkan maka haruslah memenuhi asas *proportionalitas*.<sup>256</sup>

## 2. Sanksi Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995

Dari analisis yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, terdapat dua sistem sanksi yang digunakan yaitu *pertama* sanksi administratif dan *kedua* sanksi pidana. Sesuai dengan karakteristiknya sebagai *administrative penal law*, maka sanksi administratif ini pada umumnya

---

256. Prof. Mr. Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Penerbit Aksara Baru, 1983, hal. 40-46.

dijatuhkan pada perbuatan yang secara administratif diwajibkan atas subyek hukum, misalnya dalam hal ini prosedural yang harus dipenuhi oleh seseorang jika ingin melakukan ekspor dan impor suatu barang. Sanksi administratif yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tersebut berbentuk denda. Sedangkan sanksi pidana secara eksklusif diatur dalam Bab XIV Tentang Ketentuan Pidana Mulai dari Pasal 102 sampai dengan Pasal 106.

Jika dilihat sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, terlihat adanya ketidakjelasan dan tumpang tindih (overlapp) antara satu ketentuan pidana dengan ketentuan pidana lainnya. Hal ini dikarenakan hampir setiap ketentuan yang mengatur masalah kepabeanan, terutama masalah ekspor dan impor selalu dicantumkan sanksi administratif berupa denda.

Hal ini misalnya dapat dilihat dalam Bab XIV tentang Ketentuan Pidana, khususnya Pasal 102<sup>257</sup> menimbulkan ketidakjelasan dan adanya tumpang tindih misalnya dengan ketentuan lainnya, misalnya dalam hal ini pada Bab II Tentang Impor dan Ekspor terutama pada

---

257. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Tentang Kepabeanan, Pasal 102-nya menyatakan:

*Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang Ini (garis bawah oleh penulis) dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

### Paragraf I Pasal 7.<sup>258</sup>

Ketidakjelasan ini terutama menyangkut aplikasi dari sanksi baik administrasi maupun sanksi pidana yang kedua-duanya dapat didenda. Hal ini bertolak dari pengertian penyelundupan yaitu suatu perbuatan yang berkenaan dengan mengimpor dan mengekspor, atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini (garis bawah oleh pen). Persoalannya adalah penunjukkan terhadap pasal 102 ini jelas mengarah pada ketentuan mengenai ekspor dan impor sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang ini, misal termasuk di dalamnya ketentuan Pasal 7 tersebut. Sedangkan pada sisi lain terlihat antara kedua pasal tersebut secara implisit telah ditentukan sanksi terhadap mereka yang melanggar ataupun tidak mengindahkan ketentuan tersebut. Jika seandainya hal ini terjadi, persoalannya ketentuan mana yang akan diterapkan, sehingga tidak ada kepastian antara kedua pasal tersebut.

---

258. *I b i d.*

#### Pasal 7:

- (1) Barang impor harus dibawa ke Kantor Pabean tujuan pertama melalui jalur yang ditetapkan dan kedatangan tersebut wajib diberitahukan oleh pengangkutnya.
- (2) Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, dengan tanpa memenuhi ketentuan pada ayat (1), pengangkut dapat membongkar barang impor terlebih dahulu, kemudian wajib melapor hal tersebut ke Kantor Pabean terdekat.
- (3) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling sedikit Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Ketidakjelasan serta tumpang tindihnya sanksi seperti pasal 102 dan Pasal 7 tersebut, pada satu sisi tentu membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penafsiran dan dengan diskresi yang ada padanya untuk memilih salah satu sanksi diantaranya kedua ketentuan tersebut. pada sisi lain secara teoritis sasaran (*adressat*) sanksi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagai salah satu cara mencegah kejahatan penyelundupan semakin tidak jelas.

Aparat penegak hukum (Dirjen Bea dan Cukai) tentunya dapat memilih antara kedua sanksi tersebut apakah akan diterapkan sanksi administratif berupa denda atau pidana penjara (paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00). Besarnya peranan penegak hukum (Bea dan Cukai) juga terlihat dengan berpedoman pada isi Pasal 102-pada penentuan kapan seseorang atau badan hukum melakukan penyelundupan, artinya ditangan penegak hukum akan ditentukan kapan seseorang melakukan penyelundupan, sehingga wewenang untuk melakukan diskresi dari penegak hukum memperlihatkan peranan yang cukup besar.

Yang menarik dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 adalah ternyata untuk para pedagang pelintas batas tidak dikenakan kewajiban untuk membuat pemberitahuan Pabean jika barang tersebut adalah barang yang akan diekspor,

disamping juga jika barang tersebut merupakan barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 10.<sup>259</sup> Hanya permasalahan dibalik ketentuan itu adalah seberapa besar batas nilai pabean yang dimaksudkan oleh pasal 10 tersebut. Untuk itu kiranya perlu diperhatikan perjanjian bilateral yang telah diadakan antara Negara Indonesia dengan Negara Malaysia tentang aktivitas perdagangan pelintas batas kedua negara.

Berdasarkan *Basic Arrangement on Border Crossing* tanggal 26 Mei 1967 pasal II ayat 3<sup>260</sup> mengenai Perdagangan lintas batas di daratan disepakati bahwa lalu lintas barang-barang yang keluar masuk daerah-daerah perbatasan kedua Negara, disepakati bahwa nilai barang yang dibawa atau diangkat untuk maksud perdagangan lintas batas didaratan oleh setiap orang tidak diperbolehkan melebihi jumlah enam ratus dollar Malaysia ( M\$ 600 ) setiap bulannya.

---

259. Pasal 10

- (1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean.
- (2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan atas barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.

260. Isi pasal II ayat 3 dari *Basic Arrangement on Border Crossing*: "Nilai barang-barang yang dibawa atau diangkat untuk maksud perdagangan lintas batas di daratan oleh setiap orang seperti disebut pada ayat 3 dari pasal I tidak diperbolehkan melebihi jumlah enam ratus dollar (M\$. 600) setiap bulannya".

Jika dilihat perkembangan perbatasan kedua negara (Malaysia dan Kalimantan Barat) serta semakin besarnya volume perdagangan pelintas batas<sup>261</sup> antara kedua negara kiranya jumlah nilai barang dagangan yang ditetapkan oleh kedua negara sebagai suatu nilai yang tidak dikenakan Bea dan Cukai sudah tidak memadai lagi. Dengan demikian jika berdasarkan pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. pasal II ayat 3 dari Basic *Arrangement on Border Crossing* masyarakat perbatasan yang melakukan aktivitas perdagangan sebagai pedagang pelintas batas adalah mereka-mereka pelaku penyelundupan, yang secara yuridis normativ dapat dipidana karena masuk dalam rumusan pengertian penyelundupan sebagaimana diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995.

---

261. Dari penelitian yang dilakukan terlihat bahwa volume perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat di kedua perbatasan memperlihatkan nilai yang cukup besar, bahkan nilai transaksi yang dilakukannya memperlihatkan nilai yang melebihi enam ratus dollar Malaysia (M\$ 600) setiap harinya.



## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut diatas, serta mendasarkan pada kajian teoritis dan penemuan fakta di lapangan kiranya dapat disimpulkan bahwa:

1. Aktivitas penyelundupan yang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan beberapa kondisi, baik kondisi geografi, budaya. Kondisi geografi dimaksudkan bahwa daerah Kecamatan Sekayam adalah salah satu wilayah Kabupaten Sanggau (Kalimantan Barat) yang letaknya berbatasan langsung dengan daerah perbatasan (Malaysia). Sehingga berimplikasi pada dekatnya jarak antara Kecamatan Sekayam (Desa Entikong) dengan Kota Sirian (Malaysia) jika dibandingkan jarak Kecamatan Sekayam dengan ibukota Kabupaten yaitu kota Sanggau. Hal ini tentunya tingkat mobilitas baik manusia maupun arus barang lebih cepat datangnya dari Malaysia jika dibandingkan dengan barang yang datangnya dari Ibukota Kabupaten, apalagi barang yang datangnya dari Ibukota Propinsi yaitu Pontianak. Disamping faktor geografi yang sangat kondusif terhadap aktivitas masyarakat untuk melakukan penyelundupan, faktor budaya juga sangat berperan di dalam menimbulkan perilaku penyelundupan ini. Faktor budaya dimaksudkan adalah bahwa aktivitas masyarakat

yang melakukan transaksi perdagangan dengan negara tetangga relatif merupakan persoalan yang sudah lama keberadaannya dan merupakan bentuk perdagangan yang sangat sederhana dalam bentuk barter. Apalagi dengan melihat kenyataan bahwa mereka (masyarakat) dikedua perbatasan menganggap mereka merupakan keturunan dari satu rumpun yaitu suku Dayak Iban. Bahkan pada mulanya aktivitas perdagangan yang dilakukan antara kedua masyarakat perbatasan tersebut merupakan manifestasi dari hubungan kekeluargaan diantara mereka.

2. Telah terjadi pergeseran makna aktivitas masyarakat yang semula murni merupakan salah satu bentuk perdagangan (barter) menjadi suatu bentuk kejahatan. Berubahnya sifat perilaku masyarakat ini dikarenakan terjadinya interaksi antara masyarakat dengan konsumen, sehingga hukum (Undang-Undang) telah mengklasifikasi perbuatan atau aktivitas tersebut sebagai suatu bentuk kejahatan. Pergeseran atau perubahan lainnya adalah bahwa aktivitas tersebut sudah mengarah pada kepentingan ekonomi sebagai tujuan utamanya serta sudah mengarah diorganisirnya aktivitas tersebut.

3. Besarnya peningkatan kebutuhan konsumen (*Economic Approach*) akan suatu produk (terutama yang datang dari luar negeri) serta kurang tersedia produk-produk tertentu di pasaran dalam negeri (misalnya Gula pasir

dan bawang putih) serta mekanisme ekspor dan impor yang berbelit-belit merupakan kondisi yang memicu pihak-pihak untuk memasukkan barang dari luar negeri (Malaysia) secara illegal. Hal ini ditambah lagi dengan kurangnya kesadaran konsumen akan haknya terhadap keamanan suatu produk (*right to safety*), hak untuk memperoleh informasi (*right to informed*) sehingga membuka kesempatan bagi pelaku penyelundupan untuk memasukkan barang secara illegal meskipun barang tersebut tidak memenuhi standar kesehatan, keamanan yang telah ditentukan.

4. Besarnya sikap toleransi sosial penegak hukum terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas illegal, serta digunakannya diskresi yang besar dari penegak hukum dan sikap yang inkonsistensi merupakan persoalan sehingga sulit dikurangnya aktivitas illegal. Di samping kecil jumlah petugas (Bea dan Cukai) yang ditempatkan di daerah perbatasan (Bording Gate) serta besarnya cakupan serta sulitnya kondisi alam daerah yang dijadikan alur utama masyarakat dalam melakukan aktivitas illegal tersebut.
5. Peraturan perundang-undangan (hukum) memberikan label kepada masyarakat sebagai pelaku kejahatan penyelundupan (pasal 102 UU No. 10 Tahun 1995) karena aktivitas tersebut dianggap sebagai bertentangan dengan peraturan mengenai tata laksana ekspor dan

impor (*Mala in prohibita*), bukan hakekat perbuatan tersebut yang jahat (*Mala in se*).

## B. SARAN-SARAN

1. Karena daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia) relatif masih terisolir serta jaraknya jauh dari ibukota Kabupaten maupun Ibukota Propinsi, maka perlu dibukanya daerah-daerah tersebut agar tidak terisolir. Sedangkan pada tarap kebijakan ekonomi perlu kiranya pemerintah memasok barang (misalnya gula pasir dan bawang putih) yang merupakan kebutuhan konsumen, terutama pemenuhan kebutuhan pokok yang berasal dari Indonesia untuk didistribusikan pada masyarakat setempat dengan tentunya mengingat harga dan kualitas yang relatif bersaing dengan barang yang berasal dari negara tetangga.
2. Karena aktivitas masyarakat yang melakukan penyelundupan bukan merupakan jenis pekerjaan pokok tetapi merupakan aktivitas sampingan, maka perlu kiranya memberikan (dalam hal ini Pemda Tk. II Kabupaten Sanggau) menciptakan jenis aktivitas alternatif lain yang relatif lebih membuka dan membantu dari segi kebutuhan ekonomi pada masyarakat, misalnya disektor jasa (Berdagang dll) disamping tentunya tetap memperhatikan pemberdayaan jenis pekerjaan utama mereka sebagai petani dan peladang.
3. Terhadap konsumen kiranya perlu diadakan semacam

gerakan moral (*Moral Action*) guna meningkatkan kesadaran (*awariness*) dan pengetahuan (*acquaintance*) akan hak yang dimilikinya sebagai bagian hak yang diberikan hukum kepada konsumen, gerakan moral ini dapat dilakukan secara terpadu antara pemerintah (misalnya Balai POM dan YLKI sebagai lembaga swadaya masyarakat). Oleh karena itu Konsumen tidak hanya menggunakan hak pilihnya (*the right to choose*) saja dalam memenuhi kebutuhan hidup tetapi juga diintegrasikan dengan haknya untuk mendapatkan produk yang aman (*the right to safety*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to informed*) yang jelas terhadap produk yang dibutuhkan. Gerakan moral ini pada akhirnya akan berimplikasi pada persepsi konsumen akan produk dalam dan luar negeri.

4. Konsistensi sikap dan persepsi serta perlunya peningkatan kerja sama (koordinasi) sesama para penegak hukum dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan sebagai bagian integral terhadap upaya pemberantasan kejahatan penyelundupan, disamping perlunya penambahan rasio penegak hukum yang ditempatkan wilayah yang dijadikan jalur utama dalam melakukan aktivitas illegal tersebut.
5. Dari segi pelaksanaan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 10 Tahun 1995), pelaksanaannya haruslah mendasarkan pada asas subsidiaritas dan hukum

pidana sebagai *ultimum remedium*. Sebagai pelaksanaan dari asas subsidiaritas kiranya perlu dioptimalisasikan sanksi administrasi terutama denda sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 10 Tahun 1995 sehingga kerugian (finansial) negara yang timbul sebagai akibat dari aktivitas ilegal tersebut sedapat mungkin dikurangi. Disamping itu perlu kiranya diperhatikan undang-undang sebagai *ultimum remedium* terutama terhadap pelaksanaan sanksi pidana sebagaimana terdapat dalam pasal 102 UU No. 1995 yang mengatur tentang ancaman pidana terhadap mereka yang melakukan penyelundupan. Hal ini didasarkan pada pemikiran agar efek prevensi baik-*general prevention* maupun *special prevention*-dapat berpengaruh pada masyarakat pada umumnya maupun pelaku pada khususnya.

6. Secara bilateral kiranya perlu dilakukan kaji ulang terhadap kerja sama yang telah dilakukan terutama terhadap batas minimal nilai yang diperbolehkan dalam melakukan jenis perdagangan pelintas batas antara Malaysia dan Indonesia (perjanjian yang dilakukan pada tanggal 26 Mei 1967 Jo. pasal 10 ayat 2 UU No. 10 Tahun 1995). Hal ini dikarenakan batas minimal sebagaimana tersebut dalam perjanjian bilateral tersebut sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang, dimana nilai suatu barang sudah melampaui batas minimal yang diperbolehkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, **Sosiologi Kriminalitas**, Penerbit Remadja Karya, Bandung, Tahun 1987.
- Allen, Harry E. et. al. **Crime and Punishment, An Introduction to Criminology**. The Free Press. New York. 1981.
- A.P. Saxena. **Peningkatan Produktivitas Tatalaksana Pemerintah**, Prisma, XV:11, tahun 1986.
- A.S. Hornby (ed). **Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English**, Oxford University Press, London, 1989.
- Aubert, Vilhelm. **Some Social Functions of Legislation**. Acta sociologica. 1966.
- Baumol, William J. dan Blinder, Alan S. **Economics, Principles And Policy Microeconomics**, Harcourt Brace Jovanovich, Fourt Edition.
- Becker, Howard S. **Outsiders, Studies In The Sociology Of Deviance**. The Free Press. New York. 1973.
- Berg, Bruce L. **Law Enforcement, An Introduction to Police in Society**, Indiana University of Pennsylvania, 1992.
- Blumberg, Abraham. **Criminal Justice**. Quadrangle, Cichago. 1970.
- Blau, Peter M. dan Meyer, Marshal W. **Birokrasi Dalam Masyarakat Modern**, Penerjemah: Gary R. Jusuf. Penerbit Universitas Indonesia, Cet- I, Tahun 1987.
- Box, Steven. **Power, Crime and Mystification**. Tavistock Publication. London and New York.
- Budiman, Ign Dkk. **Perubahan Sosial Masyarakat Perbatasan (Studi Kasus di Desa Jagoi, Kecamatan Seluas Kabupaten Sambas)**, Dalam Jurnal Penelitian, yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Universitas Tanjungpura Pontianak, Edisi Mei, Vol. I-Nomor 3 Tahun 1991.
- Clinard, Marshal B. and Peter C, Yeager, **Corporate Crime**. The Free Press, New York. 1980.
- Coffey, Alan et.al. **An Introduction to the Criminal Justice System And Proses**. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey.
- Davis, Gordon B. **Management Information System Conceptual Foundation Structure and Development**. Mc. Graw Hill. Yokyo, Sydney, 1974.
- Ditter, Hans dan Schiel, Tilman. **Kelompok-Kelompok Strategis; Studi Perbandingan Tentang Negara, Birokrasi dan Pembentukan Kelas-Kelas di Dunia Ketiga**. Terjemahan Aan Efendi. Yayasan Obor. Jakarta. 1990.
- Drapkin, Israel and Viano, Emilio. **Victimology**, D.C. Heath and Company, 1975. Second printing.
- Effendi, Sofian. **Birokrasi, Pembangunan Kualitas Manusia**

dan Produktivitas Nasional. Makalah pada Seminar Nasional tentang Kualitas Manusia dan Produktivitas Nasional, yang diselenggarakan oleh Panitia Dies Natalis UGM ke XXXVIII berkerja sama dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM Yogyakarta, Desember 1987.

- Eitzen, D. Stanley. **Crime and Justice, Social Problem.** Allyn and Bacon, Inc. Boston. 1986.
- Engel, James F. dkk. **Consumer Behavior**, Alih bahasa oleh: Drs. Budijanto, **Prilaku Konsumen Jilid 2**, Binarupa Aksara, Jakarta, cet- I, 1995.
- Etzioni, Amitai. **Organisasi-Organisasi Modern**, terjemahan Suryatim, UI Pres, Jakarta, 1985.
- Faisal, Sanapiah. **Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi**, Penerbit Y.A.3 Malang, Cet-I, Tahun 1990.
- Friedmand, Wolfgang. **Criminal Law In a Changing World**, New York, Oxford University Press, 1979.
- Geis, Gilbert & Meier, Robert F. **White-Collar Crime**. The Free Press. 1977.
- Gibon, Don C. **Society, Crime and Criminal Behavior**. Prentice Hall. Englewood. New Jersey. 1992.
- Gottfredson, Michael R. dan Hirschi, Travis (editor). **Posistiv Criminology**, Sage Publication, 1987.
- Hamzah. A. **Delik Penyelundupan, Disesuaikan dengan INPRES Nomor 4 Tahun 1985**, Penerbit Akademika Pressindo, CV. Edisi Pertama, Tahun 1988.
- ----- . **Hukum Pidana Ekonomi**. Penerbit Erlangga, 1983.
- Hanslin, James M. **Social Problem, Second Edition**. Prentice Hall, Englewood Clifft, New Jersey. 1990.
- Hardean, Ronald A. et. al. **Confronting Social Problems**, West Publishing Company, St. Paul New York. 1984.
- Harkrisnowo, Harkristuti. **Metodologi Penelitian Dalam Kriminologi, Beberapa Alternatif**, Makalah Disampaikan Pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi yang Diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Bandungan - Semarang, dari Tanggal 14-25 November 1994.
- Hunt, Alan. **The Sociological Movement in Law**, London. Billing and sons. 1978.
- Irsan, Koesparmono. **Perkembangan Kejahatan Di Indonesia Dalam Era PJP II**, Makalah Yang Disampaikan Pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandungan-Ambarawa, dari tanggal 14 s/d Nopember 1994.
- Korn, Rochard R & Lloyd W. McCorkle, **Criminology and Penology**. Holt, Rinehart and Winston, New York, 1963.
- Kusumah, Mulyana W. **Kejahatan dan Penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi**. Penerbit Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jakarta. 1988.
- ----- . **Kriminologi dan Masalah Kejahatan (suatu Pengantar Ringkas)**. Penerbit PT Armico,



Bandung, 1984.

- Leenhouders, F. **Manusia Dalam Lingkungannya, Refleksi Filsafat Tentang Manusia**, diterjemahkan oleh K.J. Veeger M.A. Penerbit PT. Gramedia Jakarta, 1970.
- Marpaung, Leden. **Tindak Pidana Penyelundupan, Masalah dan Pencegahannya**, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet-I, Jakarta, Tahun 1991.
- Morganstern, Stanley. **Legal Protection For The Consumer**, Oceana Publication, New York, 1978, Second Edition.
- Mudhofir, Ali. **Kamus Teori Dan Aliran Dalam Filsafat**. Penerbit Liberty Yogyakarta. Tahun 1988. Cet-I.
- Muladi, **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 1995.
- -----, **Hukum Dan Hak Azasi Manusia, Makalah Pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi**, Bandung-Ambarawa, Yang Diadakan Oleh Universitas Diponegoro dari tanggal 14 s/d 30 Nopember 1994.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Penerbit Alumni, Cet- I, Bandung, Tahun 1992.
- Nasution, Az. **Konsumen dan Hukum**, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, cet-I.
- Nettler, Gwynn. **Explaining Crime**, McGraw-Hill Book Company, Second Edition.
- Nicholson, Walter. **Microeconomic Theory; Basic Principles and Extensions**, disadur oleh Drs. Daliarnov, M.Sc. **Teori Ekonomi Mikro I**. Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1989, cet-I.
- Ohmae, Kenichi. **Dunia Tanpa Batas, Kekuatan dan Strategi di Dalam Ekonomi Yang Saling Mengait**, Alih Bahasa oleh F.X. Budiyanto, Penerbit Binarupa Aksara, Tahun 1991.
- Pace, Denny F. **Concepts of Vice, Narcotics, and Organized Crime**. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, Third Edition. 1991.
- Pranasari, Kiki dan Meliala, Adrianus. **Praktek Pemberian Keterangan Yang Tidak Benar (Fraudulent Misrepresentation) Suatu Modus Penyimpangan ekonomi**, Penerbit UI, tahun 1991.
- Quinney, Richard. **Criminology, Analysis and Critique of Crime in America**. Little, Brown and Company Boston/Toronto, 1975.
- Rahardjo, Satjipto. **Masalah Penegakan Hukum**, BPHN, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. **Hukum dan Masyarakat**. Penerbit Angkasa Bandung. 1986.
- Reksodiputro, Mardjono. **Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu**. Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian. Hukum Universitas Indonesia. Cet-1. 1994.

- -----, **Hak Azasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana**, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, cet-I, Tahun 1994.
- Roucek and Warren. **Sociology, An Introduction**. Littlefield, Adams & Co. 1957.
- Russell, Bertrand. **Kekuasaan Sebuah Analisis sosial Baru**. Penerjemah oleh: Hasan Basari. Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, tahun 1988.
- Sahetapy, J.E. **Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik**, Penerbit Alumni, Bandung, Tahun 1981.
- Salvatore, Dominick. **Teori Mikroekonomi**, Alih bahasa oleh: Rudy Sitompul. dkk, Penerbit Erlangga, cet-III Tahun 1990.
- Siagian, James. **Pola Umum Migrasi Penduduk Perbatasan Kalimantan Barat-Serawak**, Dalam Buletin Ringkasan Hasil-Hasil Penelitian, diterbitkan oleh Balai Penelitian Universitas Tanjungpura Pontianak, Vol. VIII, Tahun 1992.
- Siegel, Larry J. **Criminology**, West Publishing Company, St. Paul, 1989.
- Sinclair, John (ed). **Collins Cobuild English Language Dictionary**, William Collins Sons & Co, Glasgow 1988.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. **Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik**. Penerbit CV. Agung Semarang, 1990.
- -----, **Masalah-Masalah Sosiologi Hukum**. Penerbit Sinar Baru Bandung, Cet- I. 1984.
- -----, **Studi Hukum Dan Masyarakat**, Penerbit Alumni Bandung, 1985.
- -----, **Penelitian Hukum Normatif**, Majalah Hukum No. 5 Tahun 1988.
- Soekanto, Soerjono **Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi**, Penerbit Remadja Karya CV. Bandung, Cet-I, Tahun 1985,
- -----, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit Universitas Indonesia, cet-II, Tahun 1982.
- -----, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Penerbit CV. Rajawali. Jakarta, cet-I. Tahun 1983.
- Susanto, I.S. **Kejahatan Korporasi**, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Cet-I, Tahun 1995.
- -----, **Kriminologi**, Yang Diterbitkan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 1995.
- -----, **The Spectrum Of Corporate Crime In Indonesia**, Hirodai-Undip of Law and Political Review. Diponegoro University Press Semarang-Indonesia, 1993.
- -----, **Kecenderungan-Kecenderungan Dalam Ancangan Kriminologis Di Indonesia**, Makalah Disampaikan Pada

- Seminar Kriminologi VI "*Natinal Trends In Crime*"  
Diselenggarakan Atas Kerja Sama FH. Undip  
ASPEHUPIKI dan Program Kerja Sama Hukum Indonesia -  
Belanda, Semarang, 16 - 18 September 1991.
- ----- . **Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial.**  
Dalam Masalah-Masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum  
Undip. No. 9, Tahun XXII-1992.
  - Suseno, Franz Magnis. **Berfilsafat Dari Konteks**, Penerbit  
PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, tahun 1991.
  - Sudarto, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Penerbit Alumni  
1986.
  - ----- . **Hukum dan Hukum Pidana**, Penerbit Alumni, Bandung,  
Tahun 1981.
  - Syafrudin, Ateng. **Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di  
Daerah**, Penerbit Tarsito Bandung, Tahun 1976.
  - Taylor, Ian et. al. **The New Criminology: for a social  
theory of deviance**. Rothledge & Kegan Paul. London  
and Boston. 1973.
  - Thoha, Miftah. **Dimensi-Dimensi Ilmu Administrasi Negara**.  
CV. Rajawali, Jakarta, Tahun 1984.
  - Widiyanti, Ninik dan Waskita, Yulius. **Kejahatan Dalam  
Masyarakat dan Pencegahannya**, Penerbit Bina Aksara,  
Cet- I, Jakarta, Tahun 1987.
  - Williams III, Frank P. dan Mcshane, Marilyn D.  
**Criminological Theory**. Prentice Hall, englewood  
Cliffs. New Jersey. 1988.
  - Wiyono, R. **Pengantar Tindak Pidana Ekonomi Indonesia**,  
Penerbit Alumni, 1983.

#### **Lain-Lain**

- BAPPEDA, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Kal-Bar No. 353 Tahun 1987 Tanggal 9-11-1987  
Tentang Penyatuan Desa Dalam Penataan Kembali Desa  
Di Kalimantan Barat, Pontianak.
- Black's Law Dictionary,
- Dispen Folda Kal-Bar.
- Forum Keadilan, No. 15 Tahun III
- Forum Keadilan, No. 9 Tahun IV, 14 Agustus 1995)
- **Sixth United Nations Congress On The Prevention of Crime  
and The Treatment Of Offender**, Caracas, Venezuela,  
15 Agustus-5-September 1980.
- Tim Peneliti Daerah Perbatasan, Untan. **Identifikasi  
Masalah Pembangunan Daerah Perbatasan Kalimantan  
Barat dan Serawak**, Univeristas Tanjungpura,  
Pontianak, Tahun 1990.
- **The Lexicon Webster Dictionary**, By The English-Language  
Institute of Amerika Inc. Vol. II.
- TAP MPR No. IV/MPR/1978,
- TAP MPR No. II/MPR/1988,
- TAP MPR No. II/MPR/1993,